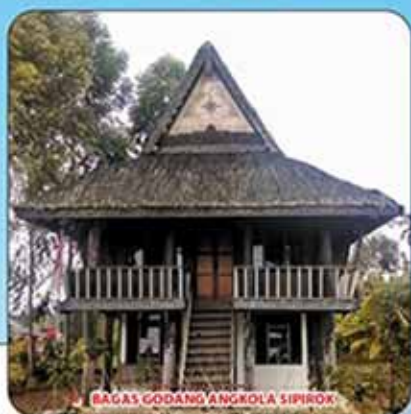


TAPANULI SELATAN

BUMI *DALIHAN NA TOLU*

(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)



BAGAS GODANG ANGKOLA SIPIROK



MASJID PERTAMA DI ANGKOLA



GKPA GEREJA DI ANGKOLA

Dr. Suheri Harahap, M.Si



TAPANULI SELATAN
BUMI *DALIHAN NATOLU*

(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)

Dr. SUHERI HARAHAHAP, M.Si.

TAPANULI SELATAN
BUMI *DALIHAN NATOLU*

(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)

Pengantar oleh:
Prof. Dr. Badaruddin, M.Si



Diterbitkan Oleh:
CV. MANHAJI Medan
2020

TAPANULI SELATAN BUMI *DALIHAN NATOLU*

(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)

Penulis :
Dr. Suheri Harahap, M.Si.

Copyright © 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak : Muhammad Hakiki, S.Kom.
Perancang Sampul : Muhammad Hakiki, S.Kom.

Diterbitkan Oleh:
CV. Manhaji Medan
Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan
e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - cvmanhaji@gmail.com

Cetakan Pertama : September 2020
Cetakan Kedua : Desember 2022

ISBN: 978-602-0746-80-7

PROLOG



Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan maha tahu segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini.

Pembangunan di Tapanuli Selatan harus mampu menggerakkan potensi budaya *dalihan na tolu* etnis Batak Angkola sebagai pilar dalam menguatkan tradisi saling tolong menolong, *marsitorangan, martahi, marsialap ari. Anggo adong namasa akkon tangi di siluluton, ette di siriaon, markoum marsisolkot marsiholongan*. Sistem sosial budaya akan mengalami dampak pembangunan dan ekonomi yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan lewat '*negosiasi ekonomi*' dan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBDesa dan CSR agar tidak dikorupsi, disalahgunakan agar kebijakan dimanfaatkan bagi kesejahteraan bersama. Moralitas atau etika pembangunan

semakin diperlukan untuk menjaga aparatur dan aktor sebagai pelaku pembangunan.

Karena itu, wilayah etnik Tapsel yang kuat agama dan budaya lokal Batak Angkola harus dijadikan spirit pembangunan kedepan. Dampak pembanguna dan masyarakat adat dapat hidup bersama dengan rukun dan saling memahami adat budaya dan istiadat, terjadi asimilasi dan akulturasi sebagai bagian dari proses modernisasi akibat perubahan sosial dari zaman ke awal sebelum kemerdekaan sampai hari ini tetap terjaga adat dan agama di Angkola dan Sipirok.

Medan, Desember 2022

Penulis,

Dr. Suheri Harahap, M.Si

KATA PENGANTAR



Seiring dengan kemajuan zaman yang berbasiskan kepada kecepatan informasi dan teknologi, kebiasaan, tradisi dan budaya lokal yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga oleh setiap suku, saat ini mengalami pelemahan. Generasi milenial sekarang ini hampir tidak mengenal lagi bagaimana adat istiadat, kebiasaan, tradisi, nilai, norma dan budaya sukunya yang menjadi cikal bakal kebudayaan nasional.

Eksistensi budaya Batak Angkola di Tapanuli Selatan tetap dipertahankan dan diturunkan ke generasi berikutnya, mereka menghadirkan adat istiadat yang dibangun untuk menjaga persaudaraan dan persatuan di bumi *Dalihan Na Tolu* termasuk kepada masyarakat tetap terjaga pola hubungan sosial yang saling menjaga, memelihara solidaritas kolektif. Perbedaan budaya itu meliputi agama, adat istiadat, bahasa, maupun segala kebiasaan yang dimiliki setiap kebudayaan masing-masing. Geertz menyatakan bahwa budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun yang di dalamnya mengandung pemahaman bagaimana setiap orang menafsirkan dunianya, menyatakan perasaan dan memberikan penilaian-penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan

diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan pengetahuan. Koentjaraningrat menyatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, sehingga budaya dapat ditafsirkan sebagai suatu sistem simbolik, yang keberadaannya haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Buku ini mencoba menafsirkan dan mengangkat budaya lokal Batak Angkola yang memiliki nilai-nilai kearifan (*wisdom*) tersendiri. Selain itu, buku ini juga berkontribusi bagi upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Buku ini akan sangat bermanfaat untuk dibaca, terutama bagi generasi milineal Batak Angkola, mahasiswa, pemerintah pusat (daerah), dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya yang berminat mendalami masyarakat adat Batak Angkola.

Medan, Desember 2022

Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

KATA SAMBUTAN



Tapanuli Selatan sama juga di daerah-daerah lain di tanah Batak lingkungan etnografis dipengaruhi oleh budaya *Dalihan Na Tolu*. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembuatan kampung (*huta*) baru. Pada umumnya di Tapanuli Selatan pembukaan *huta* berlangsung secara damai melalui musyawarah terbuka antara keluarga raja pimpinan adat dan masyarakat yang menginginkan pembukaan *huta* yang baru sebagai perluasan *huta* yang ada, atau pembukaan *huta* yang merdeka dan memiliki otonomi sendiri dalam segala urusan sosial budaya.

Etnis Batak Angkola yang mayoritas mendiami wilayah Tapanuli Selatan memiliki sejarah masyarakat yang kuat secara adat, menjunjung tinggi nilai budaya *Dalihan Na Tolu*, integrasi sosial mampu berjalan secara harmonis bersama masyarakat adat yang datang dan telah hidup bersama puluhan tahun hidup bersama baik di Angkola maupun di sipirok, akan tetapi di sisi lain, masih tersisa persoalan yang menghambat pembangunan sosial budaya baik akibat masuknya investor dalam mengelola sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Beberapa problem pembangunan yang menggeser peran masyarakat

adat Batak Angkola menarik untuk dikaji dan dijadikan model pembangunan berbasis budaya lokal di Tapsel dan saya mengapresiasi adanya buku ini sebagai bentuk kepedulian atas peran masyarakat adat Batak Angkola dalam pembangunan dan peningkatan SDM dan peran masyarakat adat terhadap pemanfaatan SDA yang unggul. Saya mengajak masyarakat Angkola Sipirok untuk bersatu menuju kesejahteraan bersama.

Medan, Desember 2022

Drs. Tajuddin Harahap, M. Pd
(Tokoh Adat Tapanuli Selatan)

DAFTAR ISI



PROLOG	iii
KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kajian Terdahulu	8
1.5 Kajian Teoritis	10
1.6 Metodologi Penelitian	13
BAB II SEKILAS PROFIL WILAYAH TAPANULI SELATAN	21
2.1 Profil Kabupaten Tapanuli Selatan	21
2.2 Sejarah Pemerintahan Tapanuli Selatan	28
2.2.1 Masa Penjajahan Kolonial Belanda	33

2.2.2 Masa Pendudukan Tentara Jepang	35
2.2.3 Masa Pemerintahan Republik Indonesia.	35
BAB III PSEJARAH AGAMA DAN ETNIS ANGKOLA	41
3.1 Masyarakat Adat Batak Angkola	41
3.2 Titik Temu Agama dan Pancasila di Bumi <i>Dalihan Na Tolu</i>	61
3.3 Kebijakan Membangun BUMD PDAM	69
3.4 Pembangunan Dalihan Na Tolu Sebagai Pemersatu...	78
3.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Adat	86
3.6 Politik Pembangunan <i>Dalihan Na Tolu</i>	144
BAB IV KESIMPULAN	155
4.1 Kesimpulan	155
4.2 Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	163

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kualitas manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan makhluk sosial terbentuk dari sebuah sejarah yang diwariskan oleh budaya. (Jay & Koentjaraningrat, 1968) menyebut kebudayaan tidak akan pernah punah selagi masih ada kehidupan. Ada peristiwa dimana negara melakukan pembantaian etnis (*genoside*), ada konflik antaretnis, ada antaragama dan sebagainya. Hidup berkelompok dalam sebuah negara senantiasa diuji oleh cara pengelolaan negara terhadap kemajemukan (*pluralitas*).

Menurut Nababan (2003) mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan terus-menerus secara turun temurun. Masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya.

Begitu pula Indonesia sebagai negara pancasila harus terus-menerus menggelorakan sebuah komitmen dan konsensus

hidup damai bersama tanpa perang dan anti diskriminasi, tanpa satu pun ada kelompok boleh mendominasi kelompok yang lain. Maka lahirlah konsep toleransi yang diatur oleh konstitusi kita. (Jay & Koentjaraningrat, 1968) mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam satu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung.

Sementara itu konsep kebudayaan sebagaimana yang dipahami adalah merupakan sistem ide atau sistem gagasan yang merupakan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial satu masyarakat. Sejumlah nilai itu di antaranya adalah bertaqwa, harga diri, harmoni, tertib, tolong-menolong, musyawarah mufakat, kreativitas, kerja keras, rukun, kebersamaan, hormat dan lain sebagainya. Semua ini adalah acuan yang mendasar, penting bernilai dan luhur, bagi kehidupan masyarakat. Sebuah nilai mungkin juga menjadi acuan dalam lebih dari satu lapangan hidup.

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Arus globalisasi yang deras menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup

konsumtif terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal.

Bangsa Indonesia memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kearifan lokal mengajarkan untuk ramah tamah, gotong royong, sopan, rela berkorban, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati, dan toleransi. Namun nampaknya kearifan lokal yang ada tersebut seolah kurang memiliki peran dan mulai pudar kekuatannya sebagai pedoman kebijakan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya agar kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang serta mengikuti arus perkembangan global. Salah satu bentuk budaya adalah kearifan local. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup (PDSPK Kemdikbud RI, 2016).

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bentuk kebudayaan yang mengacu pada lokalitas, yang tumbuh dan berkembang sebagai praktik yang khas dalam masyarakat, dipercayai, dan diakui memiliki fungsi penting dalam tatanan sosial masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka harus memahami nilai-nilai budaya apa yang memiliki fungsi sosial dalam wilayah tersebut. Sibarani (2012) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berawal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan “asset spiritual” atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap. Oleh karenanya meskipun kearifan lokal merupakan hasil produk budaya masa lalu namun patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup bangsa Indonesia

Kearifan lokal bersifat lokal artinya kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda antar wilayah dan antar suku. Namun demikian ada kearifan lokal yang tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya tertentu namun dapat pula bersifat lintas budaya sehingga membentuk kearifan lokal yang bersifat nasional.

Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat tercermin dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya, melihat pertunjukan/pameran seni, penggunaan busana daerah/tradisional, upacara adat (Samsiyah, 2020). Status kunjungan penduduk ke tempat-tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya masih rendah. Pertunjukan/ pameran seni yang sering diikuti adalah seni musik dan seni tari. Penggunaan busana daerah/ tradisional hanya dilakukan pada saat menghadiri upacara keagamaan.

Kearifan lokal dalam sistem sosial tercermin dalam keadaan masyarakat yang aman, terpeliharanya kehidupan yang

akrab dan penuh gotong royong. Dalam (PDSPK Kemdikbud RI, 2016), jumlah kejadian perkelahian selama setahun terakhir, paling banyak adalah perkelahian antar kelompok masyarakat, yaitu sebanyak 2.012 kejadian. Justru kejadian perkelahian antar suku hanya sedikit, yaitu hanya sebanyak 96 kejadian. Dalam hal penyelesaian masalah dengan jumlah desa yang kejadian perkelahian dapat diselesaikan semua sangat besar, yaitu sebanyak 2.428 desa. Ada 136 desa yang terdapat penyelesaian belum tuntas, dan terdapat 215 desa yang di dalamnya terdapat perkelahian yang tidak terselesaikan.

Selanjutnya, persentase desa dengan kebiasaan gotong royong warga adalah tinggi, yaitu sebesar 96,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa budaya gotong royong di dalam desa hampir selalu ada. Toleransi dan kepedulian sebagai wujud kearifan lokal tercermin dalam sikap persetujuan masyarakat apabila ada kegiatan di lingkungan yang dilakukan oleh suku bangsa lain maupun pemeluk agama lain (Dokhi & dkk, 2016). Toleransi juga ditunjukkan dengan sikap persetujuan masyarakat terhadap pertemanan dengan suku/ etnis lain maupun pemeluk agama lain. Kepedulian juga tercermin dari budaya menjaga sumber daya alam, utamanya mata air.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sistem sosial masyarakat ini sangatlah penting untuk dihayati, dipraktekkan dan diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya guna membentuk dan menuntun pola perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Pembangunan yang

tidak didasarkan atas kebijakan hidup dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan bangsa.

Sementara disharmoni antara Pancasila, Agama dan kebudayaan seringkali terjadi, jika keduanya telah mengalami perubahan kelamin. Posisi agama sebagai "*world-view*" atau "*addin*", dalam tataran sistem nilai merupakan "*beyond ideology*". Tetapi agama bisa berubah menjadi ideologi jika telah menfungisikan diri sebagai legitimasi *status-quo* (baca: kekuasaan) Firmansyah, 2021). Sebaliknya Pancasila bisa berubah menjadi "*pseudo-agama*" jika ia menduduki karakteristik agama sebagai doktrin yang *taken for granted, given, sami'na wa-atho'na* (mendengar dan taat), yang tidak dapat dikritik dan bersifat doktriner. Pancasila hanya akan memiliki fungsi optimal jika ia diletakkan sebagai ideologi terbuka.

Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan/atau mereduksi ikatan primordial yang potensial menghadirkan konflik. Dalam dimensi sosiologis agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai "pemecah" (*out group*) dan sekaligus fungsi manifes sebagai "perekat" (*in group*) (Jay & Koentjaraningrat, 1968). Minimnya agama ini hanya dapat dijumpai melalui konsensus bersama, yang antara lain melalui Pancasila. Sebaliknya Pancasila membutuhkan agama dalam memperkaya kedalaman makna hidup, khususnya yang berkaitan *beyond reality* (penjelasan tentang kematian, dan sebagainya).

Dengan kata lain, untuk mengetahui relasi antara Pancasila, Agama dan Kebudayaan, khususnya dalam semangat

mengkompromikan jelas membutuhkan pelacakan sejarah, baik dari aspek diakronis maupun sinkronisnya. Manfaatnya adalah selain untuk menghindari berbagai ketegangan yang tidak produktif juga untuk mencegah terjadinya "*clash of cultural*" dan/ atau "*clash of ideology*" yang bisa membawa porak-porandanya bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Masyarakat Tapanuli Selatan yang heterogen relatif dinamis dan mobilitasnya tinggi dalam hubungan kekerabatan. Karakteristik masyarakat tersebut merupakan tolak ukur dan sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Heterogenitas penduduknya yang terlihat dari segi suku, ras, agama, sistem sosial dan pola budaya telah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu dan masih terus berkembang hingga saat ini dapat merupakan potensi pembangunan dan sebaliknya dapat pula merupakan sumber konflik. Menurut Siregar (2003:6) kebudayaan etnik lokal maupun pendatang yang ada di Sumatera Utara ini mempunyai ciri khas dan mengandung aspek budaya tradisional yang dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif untuk menimbulkan persatuan dan kesatuan di dalam menunjang pembangunan daerah tempat etnik tersebut bermukim. Untuk itu peneliti dalam ingin mendalami politik pembangunan dan kearifan lokal budaya *dalihan na tolu* di Tapanuli Selatan.

1. 2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana peran etnis Batak Angkola dalam kehidupan sosial masyarakat berbasis kearifan lokal?

B. Bagaimana implementasi agama dan adat budaya masyarakat Batak Angkola?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mendeskripsikan peran etnis Batak Angkola dalam kehidupan sosial masyarakat berbasis kearifan lokal.
- B. Untuk mendeskripsikan implementasi agama dan budaya masyarakat Batak Angkola.

1.4 Kajian Terdahulu

Penelitian Sukarniti (2020) tentang Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Kemajuan Teknologi. Penelitian ini ditulis dalam Jurnal Cakrawarti, Vol 02 No. 02 Agustus- Januari 2020. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa pentingnya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal bsgi masyarakat Bali selain untuk menghadapi berbagai dampak negative perubahan sosial yang diabaikan teknologi. Gejala yang dialami masyarakat Bali kini adalah perubahan sosial budaya yang sangat mendasar. Akselerasi informasi gelombang teknologi membawa perubahan cukup signifikan pada masyarakat Bali baik pada sikap dan pola perilaku dan system nilai, pandangan hidup. Perubahan terjadi karena kontak budaya antar yang dimaknai adanya dialektika nilai-nilai baru dan nilai-nilai lama yang saling mendominasi, yang memungkinkan terjadinya homogenesis dan neoliberalisasi pada aspek kehidupan termasuk nilai-nilai budaya lokal yang

selama ini menjadi pegangan masyarakat Bali.

Penelitian Hilda (2016) yang dimuat dalam MIQOT Vol XI No.1 Januari-Juni 2016 tentang Revitalisasi Kearifan Lokal *Dalihan Na Tolu* Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. Kearifan lokal *dalihan na tolu* pada masyarakat Mandailing terancam terdegradasi oleh pengaruh globalisasi. Nilai-nilai kearifan lokal memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama sehingga perlu dilestarikan untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan. Keharmonisan lingkungan hidup masyarakat Mandailing dengan kearifan lokal *dalihan na tolu* yang melindungi lingkungan seperti marsialap ari, lubuk larangan harus dijaga kelestariannya. Kearifan local ini perlu disosialisasikan pada generasi penerus dengan mempelajarinya mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Firmando (2020) dalam jurnal *Studia Sosia Religia* Vol 3 Nomor 02 juli- Desember 2020 yang berjudul Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing Dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis). Dalam tulisan ini dijelaskan masyarakat yang beragama sangat perlu dirawat keharmonisannya agar tidak menimbulkan kecurigaan, perbedaan pandangan yang mengarah pada kesalahpahaman, pertentangan dan berujung pada konflik. Sistem kemasyarakatan *Dalihan Na Tolu* yang diorientasikan dalam nilai budaya masyarakat Batak Toba, Angkola dan Mandailing menjadi modal utama dalam membina interaksi dan solidaritas sosial antar umat beragama. Terjadinya silang budaya melalui adaptasi, akulturasi dan asimilasi antara

masyarakat lokal dan pendatang menjadi cara dalam membina interaksi dan solidaritas sosial antar umat beragama di Tapanuli Utara.

Sari (2018) menulis tentang Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembangunan masyarakat yang berbasiskan kearifan lokal melalui BUM Desa Mulyosari kecamatan Way telah berjalan efektif sesuai dengan potensi desa dan kearifan lokal yang ada di masyarakat desa Mulyusari dan sesuai dengan tujuan BUM Desa itu sendiri yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

1.5 Kajian Teoritis

(Geertz, 1973) seorang antropolog mengungkapkan tentang teori primordialisme yaitu ikatan primordialisme yang mengalami pencampuradukan antara kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial. Ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial, Hal ini terlihat dari kekuatan kelompok etnik (*ethnic group*) yang memiliki kesadaran kolektif akan kesamaan asal usul, bahasa dan adat istiadat. Sentimen primordial menjadi penting untuk menunjukkan sebuah identitas kelompok.

Menurut (Geertz, 1988) kekuasaan adalah semua hubungan diantara seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa menentukan (*Power is a relationship in which one person or group is able*) merupakan sebuah tindakan seseorang atau juga kelompok yang lainnya ke suatu arah tujuan dari pihak yang pertama (*to determine the action of another in the direction of the former's own ends*). Politik sebagai sebuah cara dalam meraih kekuasaan telah mengalami pasang surut sampai saat ini, terjadi perubahan dari sistem tradisional ke sistem modern, dan menghilangkan kekuasaan adat.

Era otonomi daerah dan desentralisasi dianggap jalan keluar bagi penyelesaian persoalan selama Orde Baru yang menggunakan cara-cara indoktrinasi, sentralisasi dan militerisasi (*security approach*). Sistem politik (pemilu) yang terus beradaptasi dengan kondisi zaman membuat kekuatan identitas budaya tidak lebih sebagai alat kekuasaan atau politisasi etnik. Konsep Pilkada (dari pemilihan perwakilan ke pemilihan langsung)) telah diuji coba agar konsolidasi demokrasi semakin baik dan demokratis.

Seorang pemikir zaman renaissance Niccolò Machiavelli dalam (Dietz & Winham, 2010), telah berhasil menciptakan sebuah teori politik-kekuasaan kekuasaan yang cukup fenomenal, sekaligus kontroversial. Pemikiran dan gagasan tentang teori "*Politik Mengalahkan Segala Cara*" itu ia tuangkan secara apik lewatkaryanya "*Principe*" (*The Prince/Sang Penguasa*). Kendati buku itu banyak mendapat kritik dan kutukan, namun diam-diam banyak juga politisi dan aktor kekuasaan yang terpesona dan menjadikannya *hand-book* dalam sejarah politik dunia, bahkan di Indonesia.

Dalam teorinya itu Machiavelli dalam (Cosans & Reina, 2018) menyebut, bahwa ‘siapa yang menguasai senjata dia akan mengalahkan yang tidak menguasai senjata’. Begitulah, senjata dalam politik adalah modal. Modal menjadi penting dalam pertarungan politik, tidak terkecuali dalam konteks kontestasi pemilihan pemimpin lewat pilkada. Dapat dipastikan, hampir *mindset* semua partai politik telah mengamini dan menguatkan teori ini, sehingga siapapun calon pemimpin harus melewati tahapan dengan perspektif modal.

Dalam aliran ideologi liberalisme, faham yang mengajarkan tentang *freedom*, kebebasan bagi individu dalam menguasai produksi sehingga muncul kekuasaan pemilik modal akan menguasai kekuatan ekonomi dan politik. Paham liberalis ini juga terus berjuang dengan menggunakan modal (kapital) dengan segala cara untuk menguasai sumber daya alam yang ada demi kepentingan politik-ekonomi global. Indonesia sebagai negara yang dilahirkan dengan ideologi Pancasila dengan falsafah gotong-royong sebagai budaya bangsa dan menggunakan politik Pancasila yang berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalism, kapitalisme, sosialisme, marxisme, komunisme dan Islam. (Pingge & Aingu, 2021) Pancasila harus digelorakan sebagai payung hukum dalam perebutan kekuasaan di Indonesia bahkan dalam mewujudkan pemikiran politik Soekarno tentang Trisakti (berdikari, berdaulat dan berkepribadian) akan terasa penting untuk dicapai oleh para pemimpin dari semua tingkatan pusat sampai daerah.

Dulu banyak pemimpin masuk penjara dulu baru jadi pemimpin, tapi sekarang jadi pemimpin dulu baru masuk penjara.

Jadi kepala daerah mensejahterakan rakyat adalah amanah konstitusi UUD 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah penyelenggara pemilu mampu melaksanakan semua tahapan pilkada sebagai wujud perebutan kekuasaan secara jurdil dan demokratis di negeri ini?

Kesiapan kita untuk melakukan transisi demokrasi dengan mendorong Pilkada yang independen dan bebas politik uang. Rakyatlah pemegang kedaulatan dalam demokrasi di Indonesia bukan uang dan kekuasaan serta bukan raja seperti dalam negara teokrasi. Disamping itu, nilai-nilai agama menjadi penting untuk meminimalisir berbagai kecurangan dan motif politik. Perilaku politisi yang bergabung dengan partai politik sedang diuji dalam berdemokrasi, sebab partai politik sebagai pilar demokrasi jangan sampai menjadi alat kekuasaan tapi sebagai tempat rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik yang bebas dan transparan.(Fitriyah, 2020)

1.6 Metodologi Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid sehingga peneliti menggunakan metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2015). Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang menekankan pada hasil fenomena dari pengamatan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari informan secara

langsung di lapangan. Penelitian yang bertujuan untuk memaahami fenomena di lapangan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam mendapatkan data yang faktual, akurat, nyata, sistematis dan obyektif (Lexy J. Moleong, 2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus sebagai tolak ukur dalam menyelidiki secara kritis dalam kehidupan nyata sehingga mampu mengungkap fenomena secara nyata ketika memperoleh data di lapangan. Selain itu, kasus yang diungkap dari data yang kurang kejelasannya perlu untuk ditindaklanjuti dan mengkajinya (Yin, 2016). Pada penelitian ini peneliti mengungkap realitas yang ada di lapangan terkait adat dan agama di Tapanuli Selatan sebagai daerah bumi *Dalihan Na Tolu*.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai instrumen kunci sehingga mampu merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, menafsirkan dan melaporkan data hasil penelitian. Kunci utama peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Keberhasilan dalam pengumpulan data melalui hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian selama proses tersebut berlangsung hingga selesai.

Oleh karena itu, peneliti mulai ke lapangan untuk survey tahap awal kepada masyarakat adat Batak

Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mulai 10 Juni 2020-17 Juni 2022. Selanjutnya untuk menggali informasi lebih mendalam maka peneliti melakukan observasi, wawancara berkeliling ke Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya wilayah masyarakat suku adat Batak Angkola dalam mengumpulkan data lapangan baik langsung tidak langsung lewat media.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif di lapangan karena peneliti bertemu langsung dengan informan yaitu penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya pada masyarakat adat Batak Angkola.

D. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini memiliki dua macam data guna memperoleh hasil yang relevan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung diamati, didengar, dicatat dan direkam dalam memori kognitif seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait. Data primer yang diperoleh oleh peneliti kepada informan harus benar-benar orang yang dianggap mengetahui, memahami dan mengalami secara langsung konteks permasalahan secara jelas yang tertera di lapangan. Dengan demikian dalam menggali data yang mengacu pada sumber data penelitian melakukan langkah sebagai berikut:

1. Informan utama yang dipilih oleh peneliti merupakan tokoh adat sosok yang memiliki informasi yang mendalam secara mendalam tentang komunitas agama dan budaya.
2. Selanjutnya guna memperoleh informasi lebih detail yang dipilih oleh peneliti merupakan tokoh agama dan adat yang memiliki informasi yang mendalam secara mendalam tentang Tapanuli Selatan bumi *dalihan na tolu*. Budaya Lokal Batak Angkola.
3. Untuk memperluas informasi peneliti lebih spesifik kepada masyarakat penduduk asli sekitar yang mengetahui informasi sejarah budaya lokal Batak Angkola.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui foto, video, tulisan dan rekaman yang berkaitan dengan budaya lokal suku adat Batak Angkola.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan melalui prosedur secara sistematis guna memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan berupa pengamatan, pencatatan, dan menggunakan dengan indera

sebagai penunjang kelancaran dalam penelitian saat terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan bahwa peneliti terlibat dalam kegiatan penelitian yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan mulai sejak 10 Juni 2021-10 Agustus 2022.

2. Wawancara

Pada tahap wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan data dan menemukan jawaban pada fokus penelitian. Pertanyaan yang ada pada fokus penelitian ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar adat Batak Angkola.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan untuk memperkuat penelitian dengan tertulis, no-tertulis foto, video, surat, rekaman dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya lokal suku adat Batak Angkola.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman,(Sugiono, 2016) antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sejak memasuki lapangan penelitian mencari

kesesuaian dari kedua situs hingga semua data yang diperlukan telah terkumpul. Dengan demikian data yang diperoleh oleh peneliti melalui data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan cara menyederhanakan data penelitian dalam memilih dan memilah dalam meringkas data di lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini melakukan kegiatan dengan mengkode data dan mengidentifikasi data. Ada tiga kolom dalam pengkodean data yang digunakan terdiri dari nomor, aspek pengkodean dan kode sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengkodean Data

No	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Teknik Pengumpulan Data	
	a. Observasi	O
	b. Wawancara	W
	c. Kabupaten Tapanuli Selatan	KTS
2.	Sumber Data	
	a. Tokoh Adat	TA
	b. Tokoh Agama	TAg
	c. Tokoh Masyarakat	TM

3.	Fokus Penelitian	
	a. Budaya Lokal	BL
	b. Kehidupan Sosial Masyarakat	KSM
	c. Dimensi Politik	DP

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai tahap mengorganisasikan data yang telah direduksi. Data yang disajikan secara terpisah antara tahap satu ketahapam lainnya, namun setelah kategori terakhir direduksi. Setelah itu seluruh data disajikan dan dirangkum secara terpadu.

d. Verifikasi Data

Pada tahap verifikasi data sebagai tahap terakhir yaitu menyimpulkan secara keseluruhan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian adanya penarikan kesimpulan yang dilakukan yang benar-benar relevan sehingga dapat digunakan pada tahap selanjutnya dan mampu dipertanggungjawabkan keabsahan datanya setelah selesai dalam pengumpulan data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sebagai unsur yang penting dalam penelitian. Keabsahan data bertujuan

untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar-benar relevan dan valid melalui pemeriksaan secara detail. Pemeriksaan yang digunakan dalam keabsahan data memiliki empat kriteria (Creswell, 2015).

BAB II

SEKILAS PROFIL WILAYAH TAPANULI SELATAN



2.1. Profil Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak geografisnya berada pada 0°58'35' sampai dengan 2°7'33' lintang utara dan 98°42'50' sampai dengan 99°34'16' bujur timur dengan luas daerah 444.482,30 Ha terdiri dari 15 kecamatan, 36 kelurahan, 212 desa atau 248 desa/kelurahan. Tahun 2018 terdapat pemekaran Angkola Muara Tais sehingga menjadi 15 kecamatan di Tapanuli Selatan. (data BPS Tapsel Dalam Angka 2019). Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk (SP) 2010 sekitar 264.480 jiwa. Tahun 2019 sekitar 281.931 jiwa.

Secara administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal

Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebelah Barat : Kabupaten Mandailing Natal dan Sumatera Hindia

Wilayah kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas sekitar 4.355,36 km² (435.535,00 Ha). Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1.985 m di atas permukaan laut. Daerah yang berada di ketinggian 0 meter umumnya terdapat di daerah Pantai Barat Tapanuli Selatan, yaitu di desa Muara Upu kecamatan Muara Batang Toru.

Sementara keadaan iklim di kabupaten Tapanuli Selatan untuk curah hujannya cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada bulan desember terjadi curah hujan tertinggi (331,67 m²) dan terendah di bulan september (89,43 m²). Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan desember 25 hari, sebaliknya hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Juli yaitu 9 hari.

Berdasarkan topografinya daerah Tapanuli Selatan merupakan daerah yang terletak di hamparan pegunungan muda Bukit Barisan yang membentang di daerah barat pulau Sumatera, mulai dari utara di Propinsi Aceh hingga ke selatan di Propinsi Lampung. Di daerah ini terdapat beberapa gunung diantaranya gunung Sopuncin dengan ketinggian puncaknya 2.199 meter, gunung Kulabu dengan ketinggian puncaknya 2.171 meter, gunung Sorik Merapi dengan ketinggian puncaknya 2.145 meter, gunung Tampulon Anjing dengan ketinggian puncaknya

2.009 meter, gunung Lubuk Raya dengan ketinggian puncaknya 1.686 meter dan beberapa anak gunung seperti Sibual-buali, Sanggararudang.

Terdapat gunung dan anak-anak gunung di daerah ini terdapat juga *Tor* (bukit) dan *Dolok* (gunung) seperti *Tor Sihite*, *Dolok Makator*, *Gon-gonan*, *Tor Simago-mago*, *Tor Sibohi* dan lain sebagainya. Di samping itu di daerah ini mengalir sungai tidak kurang dari 486 sungai besar dan kecil, diantaranya adalah sungai Batang Gadis memiliki lebar ± 50 meter dan mengalir hampir sepanjang 137,5 kilometer yang bermuara ke pantai Barat Sumatera. Aek Batu memiliki lebar ± 25 meter dan panjang aliran $\pm 102,5$ kilometer, Batang Toru memiliki lebar ± 75 meter dan mengalir sepanjang ± 90 kilometer, Barumon memiliki ± 80 meter dan mengalir sepanjang ± 80 kilometer, Batang Pane memiliki lebar ± 60 meter dan mengalir sepanjang ± 80 kilometer, Batang Parlampungan dengan lebar ± 35 meter dan mengalir sepanjang $\pm 47,5$ kilometer. Disamping itu terdapat juga sungai dan anak-anak sungai hampir disetiap daerah kecamatan.

Daerah Tapanuli Selatan ini memiliki ketinggian dari permukaan laut dari 0 hingga 1,915 meter, suhu rata-rata $18,4^{\circ}$ C sampai $28,8^{\circ}$ C dengan kelembaban udara rata-rata per bulan 83%. Arah angin pada bulan Juni hingga Agustus berhembus dari arah Barat dan membawa hujan bulan September hingga Desember merupakan musim pancaroba ke arah musim kemarau dan Januari hingga Februari berhembus angin timur yang kering dan Maret hingga Mei merupakan musim pancaroba ke musim hujan dengan arah angin yang berubah-ubah. Curah hujan di daerah ini rata-rata $961,2 \text{ m}^2$ pertahun.

Keadaan topografis kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Daerah ini dikelilingi oleh gunung Gongoan di kecamatan Batang Angkola, gunung Lubuk Raya di kecamatan Angkola Barat dan gunung Sibual-buali di kecamatan Sipirok.

Berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dibagi dalam 4 (empat) kawasan yaitu:

1. Kawasan gunung Olan perbukitan sebagian besar adalah jalur pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung (kemiringan diatas 40%) yang harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di daerah kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan gunung dan perbukitan terdapat disebagian besar kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah.
2. Kawasan bergelombang hingga berbukit (kemiringan 15-49%) merupakan kawasan potensial untuk pertanian dan perkebunan rakyat meliputi kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, dan Batang Toru.
3. Kawasan landai sampai bergelombang (kemiringan 2 – 15%) adalah kawasan pertanian dan perkebunan meliputi kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, dan Batang Toru.
4. Kawasan daratan (kemiringan 0-2%) sebagian besar merupakan lahan sawah. Padang rumput yang potensial sebagai kawasan pengembalaan ternak yang meliputi kecamatan Batang Angkola dan sebagian daratan

adalah adalah merupakan kawasan Pantai dengan garis pantai sepanjang $\pm 17,5$ km yang terdapat di kecamatan Muara Batang Toru merupakan kawasan potensial bagi pengembangan usaha tambak dan perikanan darat serta potensi pariwisata.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010 bahwa jumlah penduduk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Batang Angkola	10.140	10.939	21.079	3,84
2	Sayur Matinggi	12.259	12.667	24.926	0,77
3	Angkola Timur	9.521	10.027	19.548	0,57
4	Angkola Selatan	15.362	13.475	28.837	0,87
5	Angkola Barat	12.489	12.919	25.408	0,59
6	Batang Toru	16.442	17.193	33.635	1,93
7	Marancar	4.822	4.812	9.634	0,31
8	Sipirok	15.625	15.907	31.532	0,37
9	Arse	3.966	4.119	8.085	0,27
10	Saipar Dolok Hole	6.546	6.505	13.051	0,30
11	Aek Bilah	3.342	3.114	6.554	0,25
12	Muara Batang Toru	6.219	5.862	12.081	0,63

13	Tano Tombangan Angkola	7.138	7.787	14.927	0,38
14	Angkola Sangkunur	9.739	9.580	19.548	0,57
15	Angkola Muara Tais	6.514	6.801	13.315	0,58
Jumlah		133.531	135.293	281.931	0,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2019

Penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam bersuku dan berkebudayaan adat istiadat, yakni Angkola Sipirok dan Mandailing. Umumnya hubungan kekeluargaan menurut garis bapak (*patrilineal*). Upacara - upacara adat masih terpelihara dilingkungan adat budaya Tapanuli Selatan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
1	Batang Angkola	37.121	205	1.714	-	-
2	Sayur Matinggi	20.090	282	2.631	-	-
3	Angkola Timur	19.178	-	-	-	-
4	Angkola Selatan	18.802	1.471	3.839	-	-
5	Angkola Barat	23.823	764	169	-	-
6	Batang Toru	25.450	837	3.560	-	-

TAPANULI SELATAN BUMI *DALIHAN NATOLU*
(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)

7	Marancar	10.519	-	40	-	-
8	Sipirok	20.090	99	1.806	-	-
9	Arse	7.437	-	580	-	-
10	Saipar Dolok Hole	11.076	-	1.682	-	-
11	Aek Bilah	6.918	-	775	-	-
12	Muara Batang Toru	10.172	-	1.212	-	-
13	Tano Tombangan Angkola	4.519	455	10.758	-	-
14	Angkola Sangkunur	9.742	1.061	2.272	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan 2019

Kabupaten Tapanuli Selatan masih memiliki cadangan lahan yang cukup luas bagi pengembangan daerahnya, terutama bagi pengembangan pertanian dan perkebunan. Hal ini didukung oleh letak geografisnya yang strategis dan dilalui oleh jalan lintas nasional. Potensi pertanian sangat berperan, dapat dilihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Tapanuli Selatan yang mencapai 39,83 persen. Sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor industri yang memberikan kontribusi sebesar 28,40 persen.

Sektor lain yang juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian kabupaten Tapanuli Selatan

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan telah memiliki pasar, bahkan di beberapa kecamatan terdapat pasar yang rutin ada setiap hari.

2.2 Sejarah Pemerintahan Tapanuli Selatan

Sebuah *huta* dikepalai oleh seorang raja atau dalam istilah pada masyarakat Tapanuli Selatan disebut sebagai *Raja Pamusuk*. Federasi beberapa *huta* dipimpin oleh seorang *panusunan bulung* atau dalam istilah yang lebih akrab bagi masyarakat Tapanuli Selatan disebut raja *panusutan bulung*. Pemilihan raja *panusunan bulung*, dilakukan secara demokratis, dan raja *panusunan bulung* dibantu oleh seorang wakilnya yang disebut dengan raja *pangundian* yang juga berasal dari salah satu *huta* di dalam wilayah federasi *huta* yang ada. Gagasan pembukaan *huta* dapat juga timbul dari kerabat raja *pamusuk* atau dari masyarakat dalam wilayah kekuasaan raja *pamusuk*. Pembukaan *huta* seperti ini terkadang menimbulkan banyak masalah yang terkadang berujung pada konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Masyarakat adat *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli Selatan memiliki banyak kemiripan dengan masyarakat *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli Utara. Tapanuli Selatan terdapat *marga-marga* yang juga terdapat di Tapanuli Utara, namun juga ada *marga* yang sama sekali tidak terdapat di Tapanuli Utara. Dari penyusunan *marga-marga* dan *huta-huta* yang ditempatinya di Tapanuli Selatan, hasil inventaris keberadaan *marga* dan *huta* serta wilayah penyebarannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daerah, *Huta* dan Penyebarannya

No.	Marga	Daerah, <i>Huta</i> dan Penyebarannya
1	Babiat	Tambiski, Napagadung Laut
2	Baumi	Marancar
3	Dalimunthe	Muara Tais, Sigalangan, Sihulambu, Lobu Tayas, Gunung Tinggi, Janji Lobi
4	Dasopang	Silangge, Pangirkiran
5	Daulay	Pintu Padang, Singkuang, Sipiongot, Siunggam, Ringgonan, Hasahatan, Hutanopan (Padang Lawas), Sosa Julu, Sosa Jae, Aek Nabara, Binabo
6	Dongoran	Sihulambu, Tapus (Padang Lawas),
7	Harahap	Silangge, Sipiongot, Mandalasena, Tambiski, Napagadung Laut, Halongonan Hutaimbaru, Sabungan, Simapilapil, Siharangkarang, Losung Batu, Hanopan, Batu Na Dua, Pijor Koling, Napagadung Laut, Pangirkiran, Hasang, Parurean, Halongonan, Hajoran, Purbasinomba, Gunung Tua (Padang Lawas), Pamuntaran, Siunggam, Naga Saribu, Batangonang, Gadu, Tuba Sira, Sayur Matinggi, (Padang Lawas), Pangkal Dolok, Sosopan, Simanosor, Padang
8	Hasibuan	Mapopan, Hasahatan, Sosa Jae, Siapas, Ujung Batu, Aek Nabara, Portibi, Unteredang, Binanga, Huristak, Simangambat (Padang Lawas),
9	Hutasuhut	Sidangkal, Pargarutan, Panyanggar,
10	Lubis	Simatongtong, Sabatarutung, Pasar Matanggor, Sababilik.
11	Nasution	Sihulambu, Batugana, Gunung Tua (Padang Lawas), Sosa Julu), Sosa Jae, Mondang, Pinarik, Siapas, Aek Nabara, Unterudang, Binanga, Huristak, Simangambat (Padang Lawas), Ujung Batu, Barumun

12	Pane	Lobu Layan, Sapirook Maga, Tambangan, Kotanopan, Manambin, Tamiang Ulu, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, Hutanopan
13	Parinduri	(Padang Lawas), Sosa Jae, Mondang,
14	Pasaribu	Pinarik, Aek Nabara
15	Payung	Panyabungan Tonga, Panyabungan Julu,
16	Pohan	Gunung Tua (Mandailing), Pidoli Dolok, Pidoli Lombang, Hutasiantar, Gunung Baringin, Lingga Bayu, Muara Parlampungan, Aeknan Goli, Sosopan, Paringgonan, Hasahatan, Janjilobi,
18	Rambe	Hutanopan (Padang Lawas), Sosa Jae, Mondang, Pinarik, Siapas, Aek Nabara,
19	Rangkuti	Unterurang, Simangambat (Padang
20	Ritonga	Lawas) Tapus (Padang Lawas), Napagadung Laut, Arse, Gunung Manaon, Pangurabaan, Lancat.
21	Sagala	Sayurmaincat
22	Siregar	Tolang (Padang Lawas), Sosa Julu Simundol Gunung Tinggi, Simundol, Sipiongot, Nagasaribu, Huristak Batang Toru, Sayur Matinggi (Batang Angkola), Hutanopan (Padang Lawas), Huta Bargot (Mandailing), Sumuran, Silaia (Sapirook) Tapus (Padang Lawas), Gunung Tinggi, Simundol, Sipiongot, Mandalasena Runding, Aek Marian Sihulambu, Lobu Tayas, Tolang (Padang Lawas), Tapus (Padang Lawas), Gunung Tinggi, Sipiongot, Mandalasena, Tambiski Sihulambu Baringin, Parau Sorat, Bunga Bondar, Napagadung Laut, Hajoran, Purbasinomba, Batugana, Pamuntaran, Siunggam, Nagasaribu, Batang Onang,
23	Tanjung	

		Sayur Matinggi (Padang Lawas), Gunung Tua (Padang Lawas), Pangkal Dolok, Sosopan, Janjilobi, Hutanopan (Padang Lawas), Sosa Jae, Portibi, Unterudang, Binanga, Marancar, Tambiski, Mandalasena, Janji Manaoun, Simandiingin, Aek Bayur, Hopong Lingga Bayu, Silangge, Mandalasena, Napagadung Laut
--	--	--

Berdasarkan penyebaran *marga*, dan *huta-huta* yang mereka diami di Tapanuli Selatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 wilayah budaya yaitu Angkola-Sipirok, Padang Lawas, Mandailing, Ulu dan Pesisir. Angkola-Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing merupakan penganut budaya *Dalihan Na Tolu*, sedangkan daerah Ulu dan Pesisir merupakan campuran budaya *Dalihan Na Tolu* yang patrilinear dengan budaya *ulu* yang dipengaruhi oleh budaya Minang Kabau yang matrilineal. Di daerah Natal (Mandailing Natal) terdapat perpaduan berbagai budaya *ulu* yang datang ke daerah ini dan bermukim sebagai penduduk tetap seperti orang Minang Kabau, Aceh, Nias dan Batak yang berasal dari Tapanuli Utara, Tengah dan lain sebagainya.

Mata pencarian penduduk di Tapanuli Selatan pada umumnya bertani dan berkebun, buruh tani, pegawai negeri, pedagang, karyawan swasta, nelayan dan pensiunan. Sedangkan dilihat dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Tapanuli Selatan adalah 92,57% Islam, 0,35% Katolik, 6.90% Protestan dan selebihnya penganut Budha dan Hindu Dharma. (Data Tahun 1980 menurut A. Pulungan). Sementara data jumlah

tempat peribadatan menurut BPS 2019 terlihat ada kenaikan jumlah tempat peribadatan yaitu :

Tapanuli Selatan	Rumah Ibadah		
	Mesjid	Protestan	Katolik
Batang Angkola	24	27	2
Sayur Matinggi	24	17	3
Tano Tombangan Angkola	15	63	3
Angkola Muara Tais	25	0	0
Angkola Timur	61	0	0
Angkola Selatan	40	89	15
Angkola Barat	49	6	4
Angkola Sangkununur	19	36	13
Batang Toru	50	25	5
Marancar	27	5	0
Muara Batang Toru	22	15	0
Sipirok	89	12	1
Arce	27	12	10
Saipar Dolok Hole	45	17	0
Aek Bilah	31	3	0

Untuk perkebunan rakyat meliputi karet, kopi, kulit manis, kelapa sawit, cengkeh, coklat dan kemenyan, disamping itu pertanian pangan meliputi padi sawah,

kentang, jahe, sayur mayur, jeruk, anggur, salak dan lain-lain. Dari hasil perikanan di Tapanuli Selatan dihasilkan ikan dari usaha nelayan dan petambak berupa ikan tuna, tambak udang, ikan air tawar dari lubuk larangan, perairan umum dan budidaya kolam ikan. Dibidang usaha peternakan meliputi, sapi, kerbau, kambing dan unggas. Hasil hutan meliputi hutan tanaman industry, rotan, kayu, kayu damar dan sarang burung laying-layang. Bidang industry baik yang dikelola perusahaan maupun *home industry* dan kerajinan dihasilkan tenunan kain adat, anyaman pandan, bambu, rotan, ijuk, keramik, pandai besi, dan lain-lain.

Tapanuli Selatan memiliki potensi sebagai daerah yang kaya akan barang tambang seperti panas bumi, minyak bumi, batu gamping, marmer, kaolin, batu permata, granit, andesit, emas, besi, tembaga, perak, timah hitam, belerang, fosfat dan batu bara. Dibidang pariwisata Tapanuli Selatan memiliki daerah tujuan wisata berupa tujuan wisata peninggalan purbakala, wisata alam (pegunungan, pantai dan danau) serta wisata budaya. Sungguh sesuatu yang sangat menarik sebenarnya keberadaan masyarakat Tapanuli Selatan dengan segala budaya, alam yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

2.2.1 Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda di Tapanuli Selatan disebut *Afdeeling* Padangsidimpuan yang dikepalai oleh seorang residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan. *Afdeeling* Padangsidimpuan dibagi atas 3 *onder afdeeling*, masing-masing

dikepalai oleh seorang *Contreleur* dibantu oleh masing-masing Demang yaitu:

1. *Onder Afdeeling* Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidempuan. *Onder* ini dibagi atas 3 *onder* distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:
 - a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan
 - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
 - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok.
2. *Onder Afdeeling* Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan, *onder* ini dibagi atas 3 *onder* distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang yaitu:
 - a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
 - b. Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
 - c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot.
3. *Onder Afdeeling* Mandailing Natal, berkedudukan di Kota Nopan, *onder* ini dibagi atas 5 *onder* distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:
 - a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
 - b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
 - c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi

- d. Distrik Natal berkedudukan di Natal
- e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma.

Tiap-tiap *onder* distrik dibagi atas beberapa *Luhat* yang dikepalai oleh seorang Kepala *Luhat* (Kepala *Kuria*) dan tiap-tiap *Luhat* dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

2.2.2 Masa Pendudukan Tentara Jepang

Pada zaman penjajahann tidak banyak berubah, *Afdeeling* Padangsidimpuan yang dikepalai oleh Asisten Residen diganti dengan *Gunseibu*. Setiap *Onder Afdeeling* dikepalai oleh seorang *Gunco* dan masing-masing *Onder Distrik* dikepalai oleh *Hokogunco*.

2.2.3 Masa Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1945 sampai agresi Belanda, wilayah Tapanuli Selatan dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu:

1. Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan.
2. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu kapupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian digantikan oleh Sutan Katimbang.

3. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan, Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian digantikan oleh Fachruddin Nasution.

Ketika agresi Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah Republik Indonesia menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan kembali. Pada tahun 1960 terbentuklah daerah Tapanuli Selatan yang merupakan penyatuan tiga kabupaten dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai kantor bupati kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 Kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu.

3. Kecamatan Saipar Dolok Hole berasal dari kecamatan Barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu.
4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian kecamatan Barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu.
5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian kecamatan Barumun dan sebagian kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Sosopan.
6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.

Sejaktanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi kecamatan Padangsidimpuan Timur, Padangsidimpuan Barat, Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1982 kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan dibentuk menjadi kota administratif Padangsidimpuan.

Pada tahun 1992 kecamatan Padangsidimpuan Barat dimekarkan, sebahagian wilayahnya menjadi kecamatan Siais dengan ibukotanya Simarpinggan. Selanjutnya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuklah kecamatan Holongonan dengan ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran kecamatan Padang Bolak.

Wilayah kabupaten Dati II Tapanuli Selatan pada saat itu hampir seperempat luas Propinsi Sumatera Utara, maka atas

dasar pertimbangan itu dengan tujuan percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli Selatan, dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten Mandailing Natal, maka kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 kecamatan dan kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 kecamatan.

Selanjutnya tahun 1990 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999, tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran kecamatan di kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Sosopan dengan ibukotanya Sosopan dan kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor.
2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukotanya Batu Gana.
3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.
4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Dolok dengan ibukotanya Sipiongot dan kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar Simundol.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah secara resmi pada tahun 2001 di seluruh Indonesia, peluang pemekaran daerah semakin terbuka. Kabupaten Tapanuli Selatan kembali dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian wilayah Tapanuli Selatan secara resmi dimekarkan menjadi 2 kabupaten dan 1 pemerintah kota, yaitu kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Mandailing Natal dan Pemko Padangsidimpuan.

Pemerintah daerah kembali mengeluarkan kebijakan pembentukan 10 kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Huristak. Dengan lahirnya Perda tersebut maka pemerintah kecamatan bertambah, sehingga menjadi 28 kecamatan, 1.175 desa dan 13 kelurahan.

Kabupaten Tapanuli Selatan pada awalnya merupakan kabupaten yang amat besar mempunyai ibukota di Padangsidimpuan. Adapun daerah-daerah yang telah berpisah dari kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal (tahun 1998), Kota Padangsidimpuan (tahun 2001), Padang Lawas Utara (tahun 2007), dan Padang Lawas (tahun 2007). Setelah pemekaran, ibukota kabupaten ini pindah ke Sipirok. Adapun persoalan yang diperbincangkan dulu adalah pemindahan ibukota Tapanuli Selatan dari Padangsidimpuan ke Sipirok.

Sejak ditetapkan UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, khususnya pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) justru Bupati Tapanuli Selatan waktu itu Ongku P. Hasibuan mengalihkan ibukota kabupaten Tapanuli Selatan ke Desa Tolang dalam kawasan Maragordong di perbatasan kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok dengan mengajukan lahan seluas 275 ha.

BAB III SEJARAH AGAMA DAN ETNIS ANGKOLA



3.1 Masyarakat Adat Batak Angkola

Etnis Angkola memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekerabatan marga-marga (*tarombo*), persamaan bahasa, budaya, agama yang dianut sebagian besar masyarakatnya. Jumlah populasi etnis Angkola sekitar 1.199.000 terdiri dari Islam (90 %), dan Kristen Protestan (10%). Selain itu masih banyak anggapan penduduk asli Tapanuli Selatan semuanya etnis Mandailing dan sebagian Batak.

Etnis Angkola mayoritas mendiami Tapanuli Selatan sekarang ditandai dengan dominasi marga Harahap dan Siregar. Sedangkan Mandailing di dominasi marga Nasution dan Lubis. Angkola dalam sejarah Tapanuli Selatan diartikan sebagai suatu wilayah teritori atau daerah makna lain. Angkola adalah etnik berdiri sendiri dan asli di Sumatera Utara.

Dalam sejarah disebutkan jauh sebelum penjajah Belanda menjejakkan kaki di bumi persada ini, telah ada penduduk

yang mendiami wilayah Angkola yang diperkirakan 9000 tahun sebelum masehi, itulah yang dinamakan etnik Angkola (asli Angkola, bukan pecahan atau yang memisahkan diri dari etnik lain) terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan seperti Sabungan (di kaki Lubuk Raya), Batunadua, Sipirok/Parau Sorat, Siala Gundi, Muara Tais, Batang Toru sekitarnya, Batarawisnu Mandalasena dan lain-lain.

Etnik Angkola memiliki ciri tersendiri seperti falsafah dasar '*Dalihan Na Tolu*' sebagai tatanan/pandangan hidup sampai saat ini. Memiliki adat istiadat budaya, pakaian adat tersendiri (kain ulos, abit godang, sadun dan kain tenun). Sedangkan bahasa yang biasa digunakan yaitu Andung (bahasa halus), Bura (bahasa kasar) dan beberapa lainnya dapat diperdalam melalui '*impola ni hata*' (tata bahasa).

Etnis Angkola menerapkan sistem *Patrilineal* (garis bapak). Masyarakat Angkola ditandai dengan Marga/*Clan* seperti Harahap, Siregar, Pane dengan rumpun marganya masing-masing. Dari segi kekeluargaan etnik Angkola dibagi kepada: 1) *MORA* pihak keluarga pemberi boru. '*Mora*' ini mendapat posisi didahulukan karena memiliki posisi yang sangat dihormati, disanjung Raja-Raja maupun Pemangku Adat. 2) *SUHUT* dengan *KAHANGGI*, keluarga yang mempunyai hajatan atau '*horja adat*' (pesta), termasuk di dalamnya '*Suhut*' selaku tuan rumah. 3) *ANAK BORU*, pihak keluarga pemberi boru (*pangalehen boru*).

Eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial terbentuk dari sebuah sejarah yang diwariskan oleh budaya. Koentjaraningrat menyebut kebudayaan tidak

akan pernah punah selagi masih ada kehidupan. Ada peristiwa dimana negara melakukan pembantaian etnis (*genoside*), ada konflik antaretnis, ada antaragama dan sebagainya. Hidup berkelompok dalam sebuah negara senantiasa diuji oleh cara pengelolaan negara terhadap kemajemukan (*pluralitas*). Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara pancasila harus terus-menerus menggelorakan sebuah komitmen dan konsensus hidup damai bersama tanpa perang dan anti diskriminasi. Tak satu pun ada kelompok boleh mendominasi kelompok yang lain. Maka lahirlah konsep toleransi yang diatur oleh konstitusi kita. Koentjaraningrat (2005:20) mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam satu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung.

Tapanuli Selatan adalah wilayah percontohan kehidupan sosial yang harmonis, terjaga Bhinneka Tunggal Ika, terpelihara sebuah kerukunan seperti yang ada di Sipirok. Daerah Sipirok adalah perwujudan hidup bersama dengan damai dan rukun oleh negara dianggap layak Tapanuli Selatan menjadi miniatur Indonesia tentang toleransi.

Menguatkan budaya Angkola sebagai identitas sosial (*social identity*) di tengah gelombang kemajuan teknologi dan informatika yang membentuk ideologi baru masyarakat dunia

maya (*cyber community*) dan *post cultural* (pasca identitas kultural) adalah suatu yang amat penting dan mendesak dilakukan.. kecenderungan perubahan itu semakin menggerus dan meruntuhkan pandangan ideologis-kultural masyarakat Angkola. Ketidaksiapan budaya Angkola dalam menyikapi dan meniyasati laju perubahan dari luar membuat masyarakatnya mengalami pergeseran mentalitas dan pola pikir menjadi pragmatistik, identitas jadi semu dan tak mengakar serta timbulnya ketinggalan budaya (*cultural lag*). Dan faktanya, akselerasi perubahan sosial yang terjadi selama ini justru semakin menjauhkan identitas sebagai kekuatan positif melawan kondisi sosial, ekonomi dan politik di Tapanuli Selatan, Bumi *Dalihan Na Tolu*.

Lantas apa yang menyebabkan lemahnya identitas sebuah masyarakat adat? Dan kesadaran apa yang bisa menguatkan kembali munculnya gelombang perlawanan identitas yang terpinggirkan di arena politik dan ekonomi masyarakat adat Angkola Sipirok saat ini? Penulis melihat, tentunya sudah menjadi tanggungjawab dan tugas bersama untuk terus menerus menanamkan nilai-nilai budaya Angkola dikalangan generasi muda di tengah kekhawatiran yang melanda, kiranya kita bisa berbangga masih ada tokoh adat yang membuat kegiatan lomba *makkobar*, lomba *manortor*, lomba lagu Angkola Tapanuli Selatan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin perlulah kurikulum pendidikan memuat kembali budaya Angkola dan bahasa daerah begitu juga kepedulian tokoh-tokoh Tapsel daerah dan perantauan.

Membangkitkan kembali identitas budaya Batak Angkola sebagai kekuatan politik merebut kekuasaan adalah sebuah

bentuk kesadaran baru dan keniscayaan yang mungkin bisa membawa secercah harapan akan perubahan di masa depan, terlebih jika dikaitkan dengan konstruksi atas kondisi saat ini, dimana telah terjadi pelemahan dan pemanfaatan kekuatan masyarakat adat sebagai alat kekuasaan semata (kooptasi politik praktis). Inilah dasar awal untuk mengubah *mindset* dan cara pandang sebagai paradigma baru masyarakat adat Angkola-Sipirok untuk bersatu.

Melihat pembangunan (dana desa, APBN, APBD, CSR dan lainnya) yang seharusnya diperuntukkan untuk peningkatan perekonomian rakyat, harus bergeser dari kemajuan retorik kepada pendekatan kesejahteraan hakiki yang dirasakan semua masyarakat tanpa memandang etnis dan agama. Dengan kata lain, menguatkan hal yang mendasar sebagai hak hidup warga masyarakat adat yang dicita-citakan.

Saatnya lahir sebuah kesadaran baru masyarakat adat Angkola Sipirok yang progresif dan humanis, yang berjuang demi mengentaskan ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan serta mentalitas yang lemah secara ekonomi dan rendah secara politik. Sebab kebijakan publik (*public policy*) yang dibuat selama 10 tahun terakhir akan terjawab oleh masyarakat adat itu sendiri sebagai pilar yang menjaga kedaulatan rakyat.

Inilah salah satu tugas bersama untuk mengubah paradigma berpikir yang harus diretas dan diperkuat kembali semangat kolektifitas berdasarkan identitas primordial yang positif bukan untuk alat politik saja demi meraih kekuasaan, butuh gerakan baru politik identitas yang mencerminkan sebuah

kedaulatan. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi dalam melahirkan pemimpin. Identitas kita sudah mulai hilang dan akan dihilangkan, sudah saatnya masyarakat Tapanuli Selatan membangkitkan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat, sehingga tidak hanya dimanfaatkan atas nama demokrasi dan stabilitas, bukan politisasi SARA.

Menurut R. Nasution putra Tapsel di perantauan menyebutkan:

“Masyarakat Tapanuli Selatan untuk kembali membangun kesadaran identitas budaya untuk kemajuan daerah, dimana pemimpin harus memperkuat sistem sosial masyarakat Angkola Sipirok. Ditegaskannya, kesadaran untuk memperkuat SDM dari Putra Daerah akan tercermin dalam pengelolaan SDA Tapanuli Selatan. Mari kita evaluasi pembangunan. Rakyat adalah subjek dan objek pembangunan. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar dan rakyat punya masa depan”.

Budaya Angkola (Batak Angkola masih ada pro dan kontra terkait nama Angkola sebagai wilayah etnis dengan menyebut Batak, istilah oleh sebagian sebagai upaya '*pembatakan*' atau alasan agama). Angkola adalah salah satu sub-etnis dari suku bangsa di samping Toba, Pakpak, Simalungun Nias, Melayu, Karo dan Mandailing dan lainnya. Tanah ulayat etnis Angkola berada di wilayah geografis Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) yang meliputi kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Padang Lawas, kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan dan sebahagian kabupaten Mandailing Natal.

Perubahan sikap mental masyarakat Tapanuli Selatan harus dimulai dengan bekerja keras bagi pelajar dan mahasiswa.

Mereka harus memiliki etos belajar yang keras seperti *Kinjiro* di Jepang, dimana orang tuanya miskin tidak mampu membeli minyak tanah untuk penerangan belajar di malam hari, sehingga *Kinjiro* terpaksa mencari kayu di hutan untuk dijual sambil tetap bawa buku untuk di baca sambil belajar, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Muda-mudahan kisah *Kinjiro* itu bisa menginspirasi masyarakat Tapanuli Selatan untuk menyongsong masa depan yang lebih maju dan bermartabat.

Apa yang bisa mempersatukan sebagai bangsa dan daerah sekarang ini adalah nilai-nilai Pancasila dan adat budaya *Dalihan Na Tolu*. Akan tetapi pada saat yang sama muncul juga kegelisahan masyarakat adat atas kegagalan terhadap pengelolaan pemerintahan, SDM, SDA, dan kondisi rapuhnya ekonomi masyarakat dan tak mampu berbuat apa-apa. Ditambah lambatnya kehadiran pemerintahan daerah dalam pengelolaan konflik horizontal dan vertikal seperti yang dirasakan masyarakat adat dengan investor atau perusahaan. Paradigma baru ini harus kita wujudkan secara bersama-sama seluruh *stakeholder*, pemangku kepentingan untuk lahirnya konsensus baru Tapanuli Selatan dengan menguatkan kemajuan pendidikan yang berbasis sosial budaya demi mempertahankan keberlanjutan sebuah generasi Angkola.

Harus mencontoh negara-negara lain, seperti Jepang, Cina, Malaysia dan sebagainya yang kuat agama dan budayanya. Ada semboyan Jepang misalnya tentang belajar bagi pelajar dan mahasiswa "*belajar keras diterima bukan sebagai beban tetapi dinikmati sebagai pengabdian*". Jadi kita harus lebih keras di semua kehidupan. Belajar keras bagi pelajar, mahasiswa,

kerja keras bagi petani sawah, karet (*pangguris*), petani aren (*paragat*), buruh pabrik, peternak ikan, bebek, sapi, guru (negeri/swasta) dan seluruh warga daerah di pelosok desa. Desa kita adalah '*Banua Nasonang*'. Jika tak punya ilmu, maka pandangan tentang alam seperti mitos. Dengan ilmu alam di eksploitasi untuk keperluan manusia, dengan agama alam akan terjadi agar manusia tidak sombong dan rakus.

Generasi Angkola (*naposo/nauli bulung*) jangan lagi jadi penonton saja, apalagi di bumi *napa-napa ni sibual-buali* dan lubuk raya. Cerita masa lalu bukan hanya ungkapan indah, tapi motivasi kuat bersatu menuju kebangkitan Tapanuli Selatan, *Marsipature Hutana Be dohot Marsipature Ate-Ate Na Be* (hilangkan sifat *gut-gut* (iri dan dengki)), serta bangun visi bersama maju dan unggul. Identitas primordial menjadi penting untuk menunjukkan sebuah identitas kelompok. Hal tersebut selaras dengan pandangan Clifford Geertz, seorang antropolog yang mengungkapkan tentang teori primordialisme sebagai kekuatan kelompok etnik (*ethnic group*) yang memiliki kesadaran kolektif akan kesamaan asal usul, bahasa dan adat istiadat. Begitu juga halnya dengan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan memiliki identitas kelompok (etnis Batak Angkola) yang berdasarkan marga dan menjadi penting bagi awal lahirnya suatu kampung (*huta*).

Dalam kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan jauh sebelum terbentuk negara Indonesia sampai sejak zaman Belanda sangat kuat peran adat (pemimpin/raja) sebagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Politik sebagai sebuah cara dalam meraih kekuasaan telah mengalami pasang surut sampai

saat ini. Artinya telah terjadi perubahan dari sistem tradisional ke sistem *modern*, dan menghilangkan kekuasaan adat.

Dikatakannya, sistem pemerintahan di era sekarang sudah mengurangi bahkan meniadakan kekuasaan raja di Tapanuli Selatan. Era otonomi daerah dan desentralisasi dianggap jalan keluar bagi penyelesaian persoalan selama Orde Baru yang menggunakan cara-cara indoktrinasi, sentralisasi dan militerisasi (*security approach*). “Sistem politik (Pemilu) yang terus beradaptasi dengan kondisi zaman membuat kekuatan identitas budaya tidak lebih sebagai alat kekuasaan atau politisasi etnik.

Tapanuli Selatan sebagai daerah di wilayah Sumatera Utara yang memiliki identitas budaya Angkola, dianggap memiliki wilayah teritorial yang seharusnya juga mempunyai wilayah kultural (identitas lokal) yang kuat, akan tetapi sering disebut wilayah identitas lokal juga mengalami akulturasi dengan Islam, seperti dijelaskan oleh Kamaluddin (2022) :

“Peran budaya lokal dalam pernikahan adat Angkola di Tapanuli Bagian Selatan sangat besar terlihat pada acara pernikahan yang didominasi oleh penerapan budaya lokal seperti dalam *manyapai boru* (menanyakan kesediaan calon istri), *martahi* (musyawarah), *menjemput boru*, dan acara *mangupa* di rumah pengantin pria. Upacara agama Islam dalam pernikahan adat Angkola hanyalah pada pernikahan yang dihadiri kedua mempelai, saksi dan adanya mahar yang wajib diterima oleh calon mempelai wanita kemudian terkadang dilanjutkan dengan upacara walimah yang diisi oleh ceramah agama berupa nasehat pernikahan kepada kedua mempelai.”

Setelah agama Islam berkembang dan menjadi agama resmi masyarakat, secara pelan-pelan komposisi dan pelapisan

sosial masyarakat mengalami perubahan. Ajaran Islam yang dikembangkan para ulama menentang keras sistem pelapisan sosial yang berlaku, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan konsep kemerdekaan, ketaqwaan dan *ukhuwah islamiyah*. Posisi ulama semakin penting dan kuat dalam masyarakat, para ulama memberikan pendidikan dan ajaran secara langsung ke masyarakat lewat pendidikan dan pengajian.

Pelapisan sosial di Tapanuli Selatan lahir dari dua kepemimpinan yaitu: *Pertama*, pemimpin adat untuk masalah-masalah yang terkait dengan adat istiadat. *Kedua*, pemimpin keagamaan, ulama (pemuka agama) dalam kaitan dengan keagamaan. Di Mandailing posisi ulama lebih dominan dari pemuka adat sedangkan di Angkola, pemuka adat lebih dominan dari pemuka agama. Kedua pilar inilah harus saling menguatkan dalam mengisi pembangunan berbasis kearifan lokal di Tapanuli Selatan (*hombardo adat dohot agama*, tidak saling menghakimi, menjustifikasi, melihat adat berdasarkan kitab suci saja, lahirnya istilah *purifikasi* (pemurnian agama) yang melemahkan adat budaya kita.

Tantangan bagi pemerintahan di Tapanuli Selatan agar '*ruh*' kebijakan yang diambil dalam sistem tata kelola dan peraturan tetap menguatkan sistem sosial masyarakat sebagai wujud kearifan lokal (*local wisdom*) karena seluruh *kecikakan* adalah bertujuan untuk mercerdaskan rakyat dan mensejahterakan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut tanpa pandang bulu, rakyat tidak hanya dipandang sebagai warga negara tapi juga pemilik sah daerah. Pemerintah tidak lebih hanya sebagai '*supir*', '*nakhoda*', '*pilot*', '*parhobas*' yang dipilih sekali 5 tahun untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat.

Presiden Joko Widodo merasa perlu menggaungkan kembali tentang gagasan revolusi mental ini karena pada saat ini sebagai bangsa kita sudah mulai kehilangan nilai-nilai integritas. Kita juga tertinggal dari negara lain karena kehilangan etos kerja keras, daya saing, kreatifitas dan mulai lunturnya karakter bangsa yang mempunyai semangat gotong royong. (Jansen Sinamo ed. 2015)

Penggunaan istilah “*revolusi*” tidak berlebihan, sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin dan selayaknya setiap revolusi diperlukan pengorbanan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, “Indonesia yang berdaulat secara politik”, “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan “Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.

Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Revolusi Mental lebih tepat disempurnakan menjadi Revolusi Mental dan Akhlak (tentu ke arah yang positif). Jika MENTAL menyangkut kemampuan dalam menghadapi problem, maka dengan dilengkapi AKHLAK (tabiat/perangai) yang baik akan menjadi lengkap. Mental yang kuat tanpa akhlak yang baik boleh jadi akan sangat merugikan pihak lain sebaliknya akhlak yang baik tanpa mental yang kuat dapat dijadikan korban ketidakbaikan pihak lain. Perubahan mental dan akhlak (ke arah yang lebih baik) dimungkinkan jika adanya pendidikan yang terus menerus serta keteladanan dari para orangtua, guru, mereka yang lebih tua, penyelenggara negara, penegak hukum, pemegang kekuasaan, bahkan tontonan dan masukan dari berbagai sarana informasi seperti media cetak dan elektronik disertai penegakkan hukum dan sanksi sosial bagi para pelanggar nilai-nilai kebaikan dan penghargaan bagi mereka yang telah bermental baik. Perubahan ini tentu tidak mungkin dalam bentuk revolusi, perlu waktu untuk mengubah mental dan akhlak yang dimulai dari kesadaran akan perlunya kedua hal tersebut segera dimulai sesegera mungkin.

Kata '*Revolusi*' adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (Jacobus Ranjabar, 2014). Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun,

namun dianggap ‘cepat’ karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikanyang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru.

Menurut Soekamto (1990), secara sosiologis suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain: *Pertama*, harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut. *Kedua*, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. *Ketiga*, pemimpin mana dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan. *Keempat*, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya tujuan tersebut terutama sifatnya kongkrit dan dapat dilihat oleh masyarakat. *Kelima*, harus ada momentum, yaitu saat dimana segala keadaan dan factor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan, apabila momentum keliru maka revolusi akan gagal.

Kata ‘*mental*’ bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan dan tenaga; bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan melainkan juga pembangunan batin dan watak. Pengertian lain “*mental*” didefinisikan yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang

berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan. Seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, serakah, *sok*, tidak dapat mengambil suatu keputusan yang baik dan benar, bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, antara halal dan haram, yang bermanfaat dan yang mudharat.

Jadi, revolusi mental adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat menyangkut batin dan watak manusia yang meliputi pikiran, akal, dan ingatan dari yang lama menjadi yang baru. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter asli bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Namun, ia menyatakan bahwa rakyat Indonesia sekarang berubah sedikit demi sedikit tanpa disadari dari karakternya, dan yang lebih parahnya lagi tidak ada alat untuk menghentikannya. Hal itulah yang menjadi akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa. Karena hal itulah ia menawarkan revolusi mental.

Permasalahan mentalitas lainnya yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, serta kehidupan politik yang tidak produktif menjadi persoalan budaya dan karakter bangsa. Hal ini sinkron dengan

apa yang menjadi sasaran dari revolusi mental di era kini. Perubahan orientasi pendidikan tersebut mengarah pada tujuan pendidikan nasional yang merupakan rumusan mengenai kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sehingga rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pandangan mengenai mentalitas ini menurut Koentjaraningrat (2004), bahwa isu mentalitas manusia dalam konteks pembangunan, mewajibkan mengapresiasi suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, yaitu suatu sifat hemat, suatu hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi; suatu pandangan hidup yang menilai tinggi prestasi (*achievement*) dari karya; suatu nilai yang kurang berorientasi vertikal (ke atas); suatu nilai yang lebih percaya kepada kemampuan sendiri; berdisiplin murni dan berani mengambil tanggung jawab sendiri. Dikatakan bahwa sifat-sifat ini belum secara mantap sebagai identitas mental kedirian (*Self*) dari sebagian besar anak bangsa kita. Yang menonjol justru sifat-sifat atau sikap mental yang kontra-produktif dari tuntutan pembangunan, seperti sikap mental yang cenderung suka menerabas (suap dan nepotisme) dalam meraih gelar pendidikan, jabatan dan kekayaan ketimbang melalui upaya kerja keras dan berprestasi. Sementara itu, mengenai tanggung jawab dan penegakkan hukum, implementasinya relatif masih lemah, tidak konsisten, diskriminatif, irasional dan serba 'ragu' dalam menetapkan atau memutuskan suatu kebijakan. Dapat dikatakan sikap-sikap mental seperti ini, telah membawa implikasi kepada bangsa

kita, di mana sampai saat ini, masih mengalami kesulitan untuk keluar dari krisis sosial, dan ekonomi.

Pembangunan manusia melingkupi 3 dimensi, yaitu sehat, cerdas, berkepribadian. Sehat berarti dimulai dengan fisik kita yang senantiasa fit dan bugar. Cerdas berarti mengarah pada otak kita yang selalu berpikir dan diasah sehingga memiliki kemampuan analisis yang tajam dan berkualitas. Sedangkan berkepribadian adalah kaitannya dengan kehendak yang berbudi pekerti luhur. Disinilah perlunya revolusi mental, karena penyakit seperti emosi/mental/jiwa akan berdampak pada individu berupa malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah.

Revolusi mental ini merupakan suatu kejutan di tengah maraknya *pragmatism* politik selama era reformasi. Lagi pula, soal mental banyak diremehkan selama ini tatkala konsep perubahan struktural merebut perhatian dalam wacana pembangunan di Indonesia. Karena itu, kita dikejutkan oleh beberapa pertanyaan, mengapa masalah mental menjadi sentral dalam pemikiran seorang pemimpin politik? Apakah mungkin revolusi dalam bidang mental sanggup mendorong perubahan institusional?

Pemikiran ini bertolak dari dua pengamatan, *Pertama*, pembangunan yang hanya mengandalkan sumber daya alam

(SDA) bakal sulit dipertahankan keberlanjutannya karena SDA, khususnya yang tak terbarukan, cepat atau lambat akan habis. Minyak bumi, gas, batubara dan berbagai mineral tak mungkin ditambang terus-menerus karena akan terkuras habis pada suatu saat. Tanpa pengembangan kemampuan pengolahan di dalam negeri yang member nilai tambah, segala SDA hanya diekspor dalam bentuk mentah dan diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk komoditas dengan harga tinggi. Hal ini tak perlu terjadi kalau kita sendiri sanggup memrosesnya dengan teknologi untuk member nilai tambah dan menghemat penambangannya karena memperhitungkan masa depan. Orang tak perlu menjadi Marxis untuk mengerti bahwa harga barang ditentukan oleh kerja, keahlian, dan teknologi yang diinvestasikan dalam proses pengadaannya. Maka, berbicara tentang keahlian kita harus merujuk kepada manusia sebagai sumber daya.

Kedua, berbagai program pembangunan telah menghasilkan banyak barang dan jasa, tetapi sebagian besar hasil itu tidak membawa akumulasi modal secara nasional karena disedot kembali oleh perilaku menyimpang dalam ekonomi. Di sini kita berhadapan dengan ketidakmampuan menahan diri dari godaan memakai dana publik untuk kenikmatan pribadi dan kelompok dengan cara-cara ilegal, kecuali KPK mengungkapkannya secara publik dan memrosesnya secara pidana. *Asketisme* yang menjadi watak para kapten industri pada kapitalisme awal di Eropa barat dan Amerika Utara tidak dihargai di Indonesia karena orang terhanyut merayakan masa sekarang dalam ekstravaganza gaya hidup, yang mempersetankan kewajaran, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Ironis sekali, daya tahan budaya (*cultural resilience*) bangsa kita dalam menghadapi penindasan, kemiskinan, dan penghinaan dalam berbagai wujud terbukti teguh melewati abad-abad penjajahan dan tahun-tahun awal kemerdekaan. Namun, daya tahan secara moral (*moral resilience*) menghadapi kemakmuran dan kekayaan terbukti sangat labil. Pada titik ekstremnya, kita ternyata tahan miskin dan kuat menderita, tetapi tidak tahan kaya dan sulit mengelola kemerdekaan. Dua pengamatan itu menempatkan manusia kembali sebagai faktor sentral. Pengetahuan, kerja, dan keahlian amat dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, sementara etos, karakter, dan kesanggupan menahan diri akan menentukan apakah nilai tambah itu dapat menciptakan akumulasi modal atau akan tenggelam dalam *shadow economy* yang gelap dan serba konsumtif.

Tugas kita membangunkan anak muda Tapanuli Selatan untuk bangkit dari tidurnya, agar tidak larut dalam mimpi. Jangan sampai badan tak mau kerja, tak berkeringat, tak olah raga, pikiran picik, sempit, menunggu makan sarapan pagi dihidangkan orang tua, tinggal makan. Ini zaman susah cari uang, susah cari kerja, susah sekolah biaya mahal, sementara tanah-tanah kita masih butuh dikelola, jangan sampai orang luar bisa hidup susah, kerja keras berladang, berkebun, anak-anak kita malas, banyak kombur, setiap hari di kedai kopi (*lopo*) membahas lupa kerja.

Dulu ada istilah orang Melayu; *kojo tak kojo 1500 kojo 1000 tak kojo 500, bagus tak kojo*, setiap hari di kedai kopi kerjanya jual daun. Sekarang zaman teknologi informatika, *wifi*

masuk desa, kemudian akibatnya membuat kita lebih banyak sibuk pegang HP (*Hand Phone*), melihat orang lain di medsos, sehingga lupa ke kebun, nanti tanah kita habis ditanami orang. Semangat terus menuju perubahan, revolusi mental generasi muda Tapanuli Selatan.

Jangan kita cemburu dengan pendatang, mereka terbiasa hidup dengan alam, apa yang ada itu dimakan, jumpa babi, babi dimakan, jumpa harimau, harimau dimakan, mereka tanam sendiri sayur dan kebutuhan hidupnya. Lebih 20 tahun mereka bertahan hidup demi keberlangsungan generasinya dalam keadaan susah payah. Dulu mereka datang sebagai buruh kebun (*panjago kobun*), tak punya pendidikan, mereka sadar akan kegersangan hidup dan kesulitan ekonomi di daerah asal, punya cita-cita merantau sebagai solusi merubah hidup.

Tanah adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga demi generasi. Jangan sampai tanah-tanah kita tergadai, terjual demi hidup. Diperlukan mentalitas kerja seperti orang Karo, Batak, Jawa, Nias. Jangan kita iri dengan keberhasilan pendatang di kampung kita sendiri. Dulu tahun 1950 orang Karo baru ada sarjana, sementara kita sudah ada yang hebat-hebat, ada Jenderal Abdul Haris Nasution, banyak pejuang-pejuang kita yang sukses dari tanah Tapanuli Selatan.

Jangan terus mengenang masa lalu; *najolo tano ni opputta do on, tano ulayatta do on, tano ni amatta do on di au, on diho* (warisan yang dipersoalkan, sekarang lihatlah tanah dan siapayangmenguasainya). Tahun 1980an perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit, tambang masuk, era industrialisasi dan

modernisasi katanya di zaman Orde Baru. Sekarang kita harus lebih maju ditengah lonjakan penduduk, dan besarnya dana APBD, dana desa masuk ke desa. Lalu potensi apa yang menjadi primadona kita dan kenapa pendidikan belum menjadi prioritas dalam memajukan desa atau daerah (*anakki do hamoraon di au*).

Pahamilah, kompetisi hidup semakin sempit dalam pertarungan ekonomi. Jangan sampai anak-anak muda Tapanuli Selatan menyesal di hari tuanya. Budaya kita Angkola harus dikonstruksi dengan semangat zaman di era millennial. Zaman boleh berubah, tapi sikap hidup, prilaku dan budaya kerja harus tetap dibawah panji-panji semangat *dalihan na tolu*. Kita sibuk mengurus kenakalan remaja, narkoba, dan lain sebagainya. Disisi lain kita susah melihat keberhasilan orang lain sementara kita banyak '*carito*', melihat masa lalu, dulu orang tuaku yang hebat dan sebagainya, tapi sekarang kita jauh tertinggal. Sebentar lagi mereka banyak sarjana karena mereka sadar akan ketertinggalan mereka dibidang pendidikan.

Era kaum millennial senantiasa didorong agar memiliki idealisme, patriotisme, nasionalisme tanpa kenal lelah untuk bercita-cita bagi kemajuan desanya, daerahnya, negaranya. "*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*". Benar atau salah ini kampungku, semua hambatan dan tantangan harus dihadapi. Motto kita yang sangat mulia harus diperjuangkan dan direalisasikan; "*hita do sonnari*", "*holong mangalap holong*", "*manat markahanggi, elek maranak boru, hormat marmora*".

Dalam sejarah Filsafat Yunani filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari pengetahuan dan

pengetahuan berasal dari filsafat. Pendapat filosof inilah yang dijadikan penemuan awal, manusia menggunakan akal dan mitos. Filsafat hidup ditemukan oleh para pendahulu dan diwariskan sampai sekarang.

Inilah fondasi bagi kaum muda (*noposo nauli bulung*), '*pagar ni huta*' sebagai generasi penerus yang akan mengibarkan *poda na lima* (kebijakan yg harus dibuat oleh pemerintahan). Identitas sebagai benteng pertahanan di era globalisasi developmentalisme, sekularisasi dan neo kapitalisme. Dibutuhkan strategi budaya plus strategi berbasis anggaran dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi patologi sosial di Tapanuli Selatan sekaligus menjemput berbagai program menuju '*negosiasi ekonomi*' atas hutan. Lahan-lahan adat yang dikelola oleh perusahaan yang ada di Tapanuli Selatan.

3.2 Sejarah Islam di Tapanuli Selatan

Mengungkap fakta sejarah untuk melihat perjalanan Islam di Nusantara khususnya di Tapanuli Selatan dapat dilihat dari berbagai perspektif sejarah. Islam bermula dari Arab yang dibawah oleh para pedagang Gujarat dengan damai lewat jalur perdagangan dan jalur budaya. Pertanyaannya adalah apakah Islam di Tapanuli Selatan datang dari Aceh? Mari kita telusuri beberapa ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Tapanuli Selatan dan hubungannya dengan Kerajaan di Aceh. Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekkah artinya Islam setelah Mekkah dan Madinah (Islam zaman Rasulullah 10 tahun di Mekkah dan 13 tahun di Madinah). Setelah wafat Rasul, Islam

masa (Khulafaur Rasyidin) sahabat Nabi masa Abu Bakar Siddiq Usman Bin Affan, Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abu Thalib (Kekhalihan pertama setelah Nabi wafat dan masa Khalifahan kedua. Bani Umayyah (661 dan 750, Islam Spanyol 756 dan 1031).

Islam sampai ke Nusantara (Indonesia) dan memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kondisi masyarakat lokal dengan berbagai Kerajaan-Kerajaan seperti Samudera Pasai di Aceh yang dikenal melawan Portugis, Belanda masa Sultan Iskandar Muda (Perkasa Alam) tahun 1607-1636 yang sebelumnya Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607) dan terdapat beberapa Kerajaan seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Tamiang, Kerajaan Pidie yang di zaman Belanda bersatu dipimpin Sultan Iskandar Muda. Samudera Pasai memiliki daerah Kesultanan sampai masa Malikussaleh Raja Kerajaan Islam pertama di Aceh, Kesultanan Malikussaleh sering disebut juga Kerajaan Samudera Pasai dibentuk oleh Meurah Silu (629-1289 M) Raja Pasai pertama dengan ikon peradaban masyarakat yang adil sejalan dengan konsep syariah. Kemudian masa Syekh Abdurrauf Singkil (1615 M-1693 M) seorang ulama besar Aceh yang terkenal memiliki pengaruh dalam penyebaran Islam di Sumatera dan Nusantara, pengikut Naqshabandiyah, tasawuf yang saat itu belajar ke Mekkah kembali ke Aceh mengajarkan Islam.

Beberapa Ulama di Mandailing Natal dan Angkola, Tapanuli Selatan yang masa mudanya belajar ke Mekkah dan pulang mengajarkan Islam dan sejak awal mereka sudah Islam dimasa Kekuriaan Marga seperti Eks. Kekuriaan Harahap Losung

Batu, Harahap Mangaraja Imbang Desa, Ompu Sarudak dll masa Raja-Raja dan keturunan yang lebih dulu masuk Islam, darimana pengaruh Islam ke Marga keturunan Nasution, Harahap, Siregar Pulungan dll sehingga dapat ditelusuri masa Islam masuk ke Tapsel dan sekitarnya. Jika membaca riwayat Syekh Zainal Abidin Harahap (lahir 1810 dan wafat 1903) di Pudun Jae, Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan ke Mekkah lewat Sibolga, Malaysia, sekarang Mesjidnya dikenal sebagai Cagar Budaya Propinsi Sumatera Utara dibangun tahun 1880 seorang sufi, Thareqat Naqsabandiyah. Ayahnya bernama Sutan Maujalo II Harahap anak dari Baginda Maludin Harahap, Raja Pudun Julu Batunadua Lombang, Huria Batunadua. Disini terlihat masa Kekuriaan Harahap Batunadua sudah generasi yang beragama Islam. Pada masa Kekuriaan di Tapsel keturunan Marga jauh sebelum kedatangan Portugis, Belanda sudah ada Islam, begitu juga sejarah Islam di Sipirok yang diperkenalkan Syekh Abdul Manan Siregar, dua tahun belajar di Mekkah berguru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan di Basilam, seorang ulama (1894 meninggal 1989) dengan mesjid terkenal Mesjid Sri Alam Dunia (Mesjid Raya Lama Sipirok) dibangun tahun 1920, dengan ornamen Arab Melayu.

Dilihat dari Kekuriaan Bagas Godang Sipirok sejarah Marga Siregar akan diketahui ayah dan masa Islam sudah mempengaruhi Raja-Raja keturunan Siregar di Sipirok, darimana Marga, Raja atau orang yang ada di Tapsel (dulu Angkola dan Sipirok) memperoleh pengaruh Islam? Terlihat para ulama di Tapanuli Selatan berhubung langsung dengan pengaruh pemahaman tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani (470-1077, kelahiran Persia

Iran). Rajanya para Wali dalam dunia thareqat dan sufisme (*Sulthanal Auliya*). Terdapat juga ulama di Mandailing yaitu Syekh Musthapa Husein Nasution (1886 M), 12 tahun di Mekkah, jika dilihat dari sejarah Kerajaan Marga Nasution di Mandailing akan terlihat jejak keturunan Marga Nasution yang lebih awal beragama Islam, adakah hubungan sejarah Kerajaan dengan masuknya Islam di Tapanuli Selatan dan Mandailing?

Beberapa sejarah juga ditulis bahwa Islam datang sekitar abad ke 7, dan islamisasi sekitar abad ke 14-15 di Barus titik awal penyebaran Islam. (Kota Barus diresmikan titik nol peradaban Islam Nusantara tahun 2017), sudah ada perdagangan muslim dari Timur Tengah India, Persia singgah di Nusantara, ada makam ulama dalam jejak sejarah seperti makam Mahligai (661 M), makam Syekh Rukuddin, Syekh Zainal Abidin Ilyah Samsuddin, Imam Khatib Muddah dan kompleks Makam Papan Tinggi di desa Paneggahan, Barus Utara Tapanuli Tengah. Apakah jejak penyebaran Islam dari Barus ke Tapanuli Bagian Selatan, Pesisir Natal mempengaruhi Marga-Marga/Raja di Mandailing dan seterusnya mempengaruhi Marga/Raja di Angkola/Sipirok? Begitu juga catatan apakah ada jejak sejarah Laksamana Cheng Ho (1405-1433) menyebarkan Islam ke Nusantara (Natal) lewat jalur perdagangan, darimana sejarah Singkuang di Mandailing? Sudah ada yang menulis tentang sejarah Islam ke Tapanuli Selatan yang ditulis oleh Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam.

Agama masuk ke Indonesia secara damai tanpa kekerasan dan benturan budaya (*clash of culture*), sebuah pendekatan yang progresif menyesuaikan diri dengan sistem sosial budaya yang ada di Indonesia. Abad ke 18 dan 19, Indonesia melewati

fase sejarah panjang penjajahan yang telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial akibat perang dan situasi ekonomi-politik dimana negara harus lahir begitu juga dengan pertarungan ideologi di belahan dunia. Indonesia dapat melewati sejarah bukan negara agama dan bukan negara sekuler apalagi negara komunis. Kita menamakan diri sebagai negara Pancasila.

Agama bukan musuh negara dan bukan ancaman bagi pemerintah. Pancasila sudah final dan agama datang dan berkembang sesuai dengan jiwa manusia Indonesia yang terwujud dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ancaman bagi Pancasila adalah pengkhianatan Pancasila yaitu G30 S/PKI, sejarah kelam Indonesia yang membunuh para jenderal yang kita sebut Pahlawan Revolusi. Ancaman radikalisme beragama jangan ditujukan bagi salah satu agama saja, tapi mengejar aktor/pelaku/oknum terorisme sebagai musuh negara dan juga musuh semua agama.

Awal kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dkk pejuang bangsa, *founding father* meletakkan fondasi negara yang sangat kuat bagi semua kelompok masyarakat menuju Proklamasi 17 Agustus 1945. Itulah Pancasila menjadi dasar negara, alat pemersatu bangsa, ideologi negara, pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jangan benturkan agama dengan negara, teruslah menggali sejarah titik temu yang mendamaikan dan sintesa bagi kehidupan bersama.

Filsafat Pancasila lahir dari ruh semangat ke-Indonesiaan yang didalamnya terdapat multi agama dan budaya. Mempersatukan perbedaan ideologi tidaklah mudah tapi harus

diwujudkan untuk keberlangsungan masa depan sebuah negara. Negara (*state*) dibuat dan dibentuk oleh masyarakat (*society*) agar kehidupan bertahan selama-lamanya. Penggali Pancasila harus membahas, mengkaji, dan memahami Pancasila, baik sebagai ideologi, dasar negara, maupun spiritualitas kebangsaan. Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur agama, kepercayaan, dan budaya bangsa.

Negara Pancasila akan menjaga keberlanjutan Indonesia, kita telah bersepakat, bermusyawarah, bergotong-royong menjaga Indonesia, dan kita tidak mau di adu domba, dipecah-belah, dirusak, diancam dan dihancurkan oleh ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa dan napas masyarakat Indonesia yang multi etnis dan agama. Mari kita syukuri perbedaan (*heterogenitas*) sebagai sunnatullah (hukum Tuhan) dan hukum alam (*natural law*).

Adanya isu-isu yang ingin menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara, adalah sebuah kemunduran total, yang secara yuridis formal akan membawa kembali negara Indonesia sebelum merdeka. Bung Karno menegaskan bahwa tiga perempat dari permukaan bumi ini, telah dijelajahi, bahkan telah dizarahi ke dan pula berbagai negara termasuk negara-negara yang umatnya adalah umat Islam. Bung Karno semakin merasa bangga bahwa dasar negara Pancasila itu adalah satu dasar negara yang dikagumi oleh hampir semua bangsa yang telah dikunjungi, terutama sekali oleh umat Islam (Sukarno, 1990).

Semangat baru Pancasila bukan dalam bentuk ide-ide yang sulit dilaksanakan apalagi membenci sesama anak bangsa.

Mari menguatkan ideologi negara seiring dengan memperkuat pengamalan sila Pancasila. Berhentilah dengan isu-isu yang saling melemahkan antara lembaga yang dibentuk negara seperti BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) karena statement yang melukai dan membuat kemarahan umat beragama, negara terlalu jauh mencampuri kehidupan internal agama dan kelompok beragama. Teruslah menggagas dan meletakkan kepentingan negara di atas semua kepentingan pribadi, agama dan golongan. Indonesia sedang terluka dari berbagai historisitas kehidupan sosial politik dan konflik diberbagai daerah yang disebabkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Jika kita ingin lompatan dan terobosan atas upaya menguatkan Pancasila seperti di zaman Orde Baru, mengubah indoktrinasi, pembelajaran P-4, dan lain-lain. Mencari pola dan adaptasi penguatan dan pembumian Pancasila secara simultan, tidak salah harus digagas secara sistemik menuju komisi seperti KPU, KPAI, KPK dan komnas HAM bukan setingkat Badan yang dibentuk pemerintah seperti sekarang ini, terhindar dari kepentingan partai, ego sektoral/ sektarian/ kedaerahan. Mempercepat dan mengawal pemerintah menuju tujuan negara sebagaimana dalam amanat UUD dan teks Proklamasi 45.

Apa yang dinyatakan Bung Karno tahun 1960an, ironisnya masih terjadi akhir-akhir ini. Ia menyatakan: Kejadian-kejadian yangakhir-akhir, saudara-saudara, membuktikansejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila kita terpecah- belah, membuktikan dengan jelas bahwa hanya Pancasila lah yang dapat tetap mengutuhkan Negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita. Negara kita membutuhkan persatuan dan bahwa

Pancasila adalah kecuali satu *Weltanschauung* adalah satu alat pemersatu rakyat Indonesia yang aneka warna ini (Sukarno, 1964). Tanpa Pancasila negara Indonesia akan tercerai berai tanpa ada tali pengikat rasa kebangsaan Indonesia. Ideologi Pancasila harus membumi bagi semua anak bangsa, tapi jauh lebih penting implementasinya dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dan aparat keamanan dalam menata hubungan antar kelompok masyarakat.

Muncul kekhawatiran yang berlebihan yang dituduhkan kepada kelompok radikal dan pola pendekatan keamanan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Serta menghubungkan persoalan yang terjadi diberbagai daerah dengan pelantikan presiden sehingga muncul pernyataan panglima TNI siapa yang mengganggu pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI. Pertanyaannya kenapa yang mengganggu keamanan dan ketertiban sosial seperti di Wamena Panglima TNI tidak mengatakan hal yang sama untuk menjamin rasa aman dan kehidupan tanpa kekerasan.

Pengkhianatan terhadap Pancasila bukan lagi seperti dulu, tapi dalam konteks hidup bermasyarakat di semua wilayah NKRI diperlukan komitmen aparat negara agar rakyat mendapatkan rasa aman dari aparat TNI/Polri. Hal yang sama juga diperoleh oleh mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi juga mendapatkan rasa aman bukan berhadapan dengan aparat yang memiliki senjata. Kita bersatu, kita bersaudara, Indonesia maju dan Pancasila abadi selamanya dan membumi di wilayah *Dalihan Na Tolu* Tapanuli Selatan.

Membentuk karakter yang terpadu antara adat budaya “*dalihan na tolu*” dan Islam apa yang disebut Bung Karno dengan *nation and character building*, sesungguhnya sudah ada pada masyarakat Tapanuli Selatan, dan secara ideologis menjadi semboyan yang diwariskan secara turun-temurun. Pandangan hidup sebagai semboyan ini adalah cara orang tua mendidik anak-anaknya di Tapanuli Selatan.

3.3 Sejarah Desa di Tapanuli Selatan

Tentang Desa akan terus dikaji setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 dimulainya pengalokasian dana desa melalui APBN. Bagaimana sejarah desa di Tapsel, mengkaji sejarah desa dulu yang disebut kampung (huta) dimana terdapat *Bona Bulu* (bambu) melambangkan sistem pemerintahan huta, makna: suatu wilayah pemukiman telah dapat dikategorikan sebagai *huta* atau *bona bulu* apabila sarana dan prasarana telah lengkap antara lain: unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* (*Mora, Kahanggi* dan *anak Boru*). Tanah di Tapsel dulu menjadi tempat mengambil hasil hutan untuk mengambil obat, konsep ‘*harangan*’ sebagai tempat berburu dan mengambil hasil hutan untuk kehidupan.

Pada awal mula terjadi desa di Eks. Kekuriaan Harahap Bagas Godang Hutaimbaru dulu dipimpin oleh seorang Raja dan mengutus Raja Pamusuk untuk menjaga wilayah Kuria dan membuka kampung sejak tahun 1832. Adapun mata pencaharian masyarakat seperti bertani, nelayan, berladang berpindah-pindah dan membangun pemukiman. Tahun 1875-1955 masih dipimpin Kepala Kuria dan Tahun 1972 mulai berubah sebutan

kampung menjadi Desa yang dipimpin Kepala Desa. Berdasarkan informasi untuk wilayah Muara Upu merupakan daerah Ompu Sarudak saat itu mengurus Raja Baginda Sutan Panusunan Harahap untuk Muara Upu dipimpin oleh Marakiro Harahap gelar Mangaraja Uhum III keturunan Ompu Sarudak Eks. Kekuriaan Hutaimbaru. (SK Raja). Bagas Godang Hutaimbaru-Angkola ada 5 (lima) *Hasuhuton* yaitu Hutajulu Hutagodang Jae, Hutagodang Julu, Hutatonga, Hutabalian. Sementara Luat/wilayah Kekuriaan sampai ke Pantai Barat meliputi Panobasan, Hutalambung, Sibongbong, Sangkunur, Muara Upu dan Raniate.

Jika menggunakan teori *affirmative policy* pada masyarakat adat di Tapsel, dibutuhkan intervensi oleh negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil, setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. *Affirmative action* adalah kebijakan yang dibuat bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Teori ini banyak dipakai oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik. Contoh Malaysia juga memberi intervensi ke Melayu. Perlu kajian sejarah masyarakat adat di Tapsel dan dukungan pemerintahan.

Tapanuli Selatan yang memiliki jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk (SP) 2010 sekitar 264.480 jiwa. Tahun 2019 sekitar 281.931 jiwa. (140.118, sekitar 134.270 dan 5.848 jiwa kategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka sekitar 4,17 persen) dengan luas wilayah

4.355,36 km² (435.535,00 Ha). data BPS Tapsel 2019 Tapanuli Selatan memiliki 15 Kecamatan, 36 Kelurahan, 212 Desa sekitar 248 desa/Kelurahan. Kecamatan Aek Bilah (12 desa), Angkola Barat (2 Kelurahan, 12 desa), Muara Tais (2 Kelurahan, 13 desa), Angkola Sangkununur (2 Kelurahan, 8 desa), Angkola Selatan (4 Kelurahan, 13 desa), Angkola Timur (2 Kelurahan, 13 desa), Arse (2 Kelurahan, 8 desa), Batang Angkola (4 Kelurahan, 17 desa), Batang Toru (4 kelurahan, 19 desa), Marancar (1 Kelurahan, 11 desa), Muara Batang Toru (3 Kelurahan, 6 desa), Saipar Dolok Hole (2 kelurahan, 12 desa),, Sayur Matinggi (1 Kelurahan, 18 desa), Sipirok (6 Kelurahan, 34 desa), Tano Tombangan Angkola (1 Kelurahan, 16 desa) dengan jumlah 212 desa. Adapun jumlah perangkat desa tahun 2019 sekitar 2.023, Kepala desa jumlah 212 orang. BPD berjumlah 1.526 orang, LPMD berjumlah 248 orang. Memperkuat kehidupan budaya, sosial, ekonomi masyarakat pasca UU Desa dengan alokasi anggaran dan pembangunan di desa/Kelurahan di Tapsel.

Eks. Kekuriaan Hutaimbaru Pomparan Ompu Sarudak (data peta ulayat Angkola-Belanda/besluit (SK Residen, pengakuan Belanda). Ada perusahaan yang berada diatas tanah ulayat yang perlu dicari jejak dan riwayat tanahnya setelah masuknya perusahaan yang memiliki izin HGU dan luas estimasi sekitar PT MIR (5300 Ha, PT. SKL (11.000), PTPN (4000 Ha), ada apa masyarakat adat Tapsel dengan perusahaan dulu (perjanjian, pengalihan hak, jual beli, hibah? Beberapa dokumen sejarah masyarakat adat sebagai rujukan Holft Besloten de Asisten Resident Van Padang Sidempuan di Padang Sidempuan tanggal 2 April 1936 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengakuan masyarakat hukum adat.

Pemerintah kedepan diharapkan mengatur regulasi untuk status kepemilikan tanah adat dan tanah negara.

Semangat baru eks. Kekuriaan untuk menguatkan masyarakat adat dan tanah ulayat seperti Losung Batu, Hutaimbaru, Sigalangan, Marancar, Siharang-harang, Sabungan Julu/Pargarutan, Batunadua, Pijor Koling, Muara Tais, Pintu Padang, Sayur Matinggi, Sipirok, Baringin, Parau Sorat, Poken Jior. Kedepan persatuan masyarakat adat eks. Kekuriaan di Tapsel memiliki eksistensi wilayah sesuai UUD 1945 (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan juga putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja untuk masyarakat hukum adat.. jangan sampai peraturan terus menghilangkan hak masyarakat adat yang hidup dan diakui sampai saat ini memiliki tradisi budaya Angkola secara turun-temurun (*living law*). Bagas Godang juga dijadikan sebagai Rumah *Restorative Justice* & Adat Budaya Angkola menuju pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat di Tapsel, perlu dikaji peraturan desa bersama Raja Luat (*Panusunan Bulung*), *Raja Pamusuk*, menjadikam '*Bagas Godan*'(Permusyawaratan Adat) eks. Kekuriaan, memperkuat fungsi PATIK, UHUM (*Surat Tumbaga Holing*) sebagai modal sosial/social capital yang bisa sebagai sanksi adat.

Perlu penyelesaikan persoalan di desa bersama Kepala Desa sebelum ke kantor polisi (menuju keadilan restoratif/restorative justice), menjaga tertib sosial *Mardalihan Na Tolu*, hukum yang hidup dalam masyarakat Angkola menuju Desa Adat. Semoga Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari menjadi mitra strategis masyarakat adat.

Kehidupan di desa telah memberikan sebuah pandangan luhur ketika hidup antara kelompok masyarakat masih kuat budaya gotong-royong (*marsialap ari*), hidup berdikari tanpa ketergantungan malah dengan pemerintah misalnya dalam pembangunan (membangun jalan, listrik, air minum, mesjid dan lain sebagainya), ketika bersama pemerintahpun zaman Orde Baru ada kerjasama yang saling menguatkan dengan sistem gotong royong tadi. Inilah konsep Pancasila sesungguhnya dalam UUD 1945 jelas tugas pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah warga Tapanuli Selatan khususnya desa Parsalakan.

Tugas bersama mewariskan nilai-nilai karakter budaya Angkola, sebab pembelajaran sebuah karakter kerja keras, disiplin dan mentalitas maju, pejuang, berani, pantang menyerah (tak mudah mandele/patah semangat, cepat putus asa) yang diperkuat dengan ajaran Islam (lama di desa ini perselisihan kaum muda dan kaum tua, agama dan adat sering dipertentangkan, sekarang sudah mulai berkurang dan hilang), dan pemerintahan desa dulu sangat kuat dengan sistem budaya *dalihan na tolu*, kemudian pembangunan dilakukan dengan swadaya dan gotong-royong. Inilah potret singkat kondisi desa ditengah pertumbuhan ekonomi rakyat menguat.

Adapun yang menjadi persoalan seiring perkembangan waktu, pada tahun 1980an dan 1990an telah terjadi perubahan potret sosial dikarenakan proses kebijakan negara oleh Bapak Soeharto waktu itu yang membuat program transmigrasi dari Jawa ke Sumatera dimana daerah Tapanuli Selatan ada warga trans penduduk lokal dan suku Jawa (ada di Sosa,

Natal), kemudian ditambah bencana Tsunami juga membawa perpindahan (migrasi) dari Nias dan Aceh ke Tapanuli Selatan (ada di Sipirok, Angkola Sangkunun, Angkola Selatan, Muara Tais, Sayur Matinggi, Batang Toru, Muara Upu dll). Inilah cikal bakal pertambahan penduduk yang masuk ke Tapanuli Selatan. Kehidupan sosial masih terjaga dengan baik di desa-desa.

Tahun 2000-an menjadikan desa menjadi sebuah pertarungan ekonomi-politik kekompon masyarakat, sudah mulai mempersoalkan tentang hak atas keadilan. Perebutan kekuasaan ekonomi dan politik akan mempengaruhi kelompok mayoritas dan selalu dianggap pintu masuk munculnya penguatan identitas kelompok termasuk kelompok marga di Tapanuli Selatan. Dan di era ini pulalah isu desentralisasi dan otonomi daerah dan sistem pilkada menguat.

Kedepan adalah pertarungan ide dan gagasan untuk membangun Tapanuli Selatan, mengevaluasi berbagai kebijakan yang ada dan menguatkan sistem demokrasi Pancasila, bukan pertarungan uang dan identitas. Semua pihak menyadari tugas pemerintahan adalah amanah rakyat, bercita-citalah sebagai bentuk kecintaan kepada kampung halaman dan masa depan generasi Tapanuli Selatan yang kuat secara adat budaya dan agama seperti China, Jepang, Malaysia. Dari desa kita lahir, dari desa kita berkembang, dari desa kita bangkit.

Tugu salak di Padangsidimpuan adalah simbol masyarakat petani salak Tapanuli Selatan sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan hasil sehingga mengganggu penghasilan petani. Dan menyulitkan mereka untuk bertahan hidup, membiayai sekolah

dan keperluan sehari-hari. Apa yang dibuat pemerintah Tapanuli Selatan dengan membangun pabrik salak maupun sentra pasar belum memberikan manfaat langsung.

Kelompok tani dan koperasi harus diperkuat, sedih rakyat harus meminjam uang ke koperasi berkedok rentenir yang tumbuh di desa-desa, hidup penuh dengan praktek riba dan harus ada solusi yang cerdas. Begitu juga selama ini status kawasan di wilayah penghasil salak harus dibenahi oleh dinas kehutanan sebagai hutan lindung sehingga kebun tidak bisa disertifikatkan untuk membantu masyarakat meminjam ke bank untuk bekerjasama dengan bank untuk permodalan usaha.

Potensi ini harus ditingkatkan, kiranya semua warga petani memohon kepada Allah swt, agar musim panen dan budidaya salak semakin membaik, mari kita syukuri dengan memberikan infaq, sedekah, zakat mal. Kurun waktu lebih 5 tahun ada dana desa dan ADD bergulir ke desa, ada dana APBD kabupaten, dana APBD propinsi dan APBN pusat serta dana CSR. Wajah desa belum memberikan rasa damai, bahagia dan sejahtera, ada apa? Kedepan harus terwujud sinergitas pembangunan dengan cara pengawasan yang ketat dan tepat sasaran bersama *stakeholder*. Dana bumdes harus mampu meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan yang dititikberatkan pada sasaran strategis kebutuhan lokal di desa.

Menurut Widodo (2004), dalam formulasi kebijakan ada 4 macam kegiatan/tahapan yang harus dilalui yaitu: 1) identifikasi dan pemahaman masalah, 2) penyusunan agenda (*agenda setting*), 3) *problems formulation*, 4) *policy design*. Pembuatan

kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya.

Perspektif kajian politik, kebijakan publik lebih mendekati kepada tata kelola administrasi pemerintahan negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Budiardjo, 2008)

Apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa Tapanuli Selatan (Forum Mahasiswa Reformasi Tapanuli Selatan) yang melakukan unjuk rasa ke kantor PDAM Tirtanadi cabang Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah Tapanuli Selatan selama 10 tahun melahirkan badan usaha milik daerah (BUMD) perusahaan daerah air minum (PDAM). Menurut S. Pulungan bahwa :

“Pemerintah diminta serius menangani hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD

kita “bahwa bumi dan air dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara”. Kita minta Bupati memanggil Dirut PDAM Tirtanadi cabang Tapanuli Selatan dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, ini sudah meresahkan warga Desa Parsalakan khususnya mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak boleh terjadi lagi.”

Bagaimana dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM? Ini menjadi persoalan serius untuk memajukan Tapanuli Selatan, padahal kita punya sumber mata air gunung (Sanggarudang, Sibual-buali) untuk melahirkan BUMD pelayanan air minum ke masyarakat di desa-desa. Kita punya dana APBD Tapanuli Selatan, APBD Propinsi, APBN Pusat dan dana CSR perkebunan dan tambang emas untuk mendirikan dan membantu keperluan masyarakat Tapanuli Selatan. Kebijakan pemerintah Tapanuli Selatan dianggap lambat dan tidak serius dalam tata kelola BUMD sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Apa yang dirasakan masyarakat tentang pengelolaan air bersih baik penyaluran air bersih, harga tarif air bersih dan sehat, kualitas air yang belum memadai standarisasi dinas kesehatan, mahalnya biaya pemasangan sambung baru ke rumah, biaya rekening tagihan yang mahal, ketersediaan air kadang mengalir kadang tidak. Pertanyaannya kenapa kalau terlambat membayar masyarakat di denda? sementara pelayanan publik PDAM Tirtanadi cabang Tapanuli Selatan tidak ada sanksi. Kita kecewa kalau pemberlakuan ini sepihak saja. Jangan sampai ada oknum-oknum PDAM cabang Tapanuli Selatan yang bermain di lapangan menyangkut hak hidup orang banyak warga Tapanuli Selatan.

Ini masalah kita bersama, dulu tidak pernah kita membeli air dari zaman orang tua kita, daerah Tapanuli Selatan dimanapun punya sumber mata air yang sangat bagus dan kita harus tata kembali dan perlu kehadiran pemerintah untuk keperluan hajat hidup orang banyak dengan menggunakan cara yang meringankan masyarakat bukan bisnis to bisnis tapi bisnis to sosial. PDAM sebagai BUMD harus lahir di Tapanuli Selatan, dan pengelolaan air bersih yang ada di desa yang dibangun lewat bantuan APBD Tapanuli Selatan dan dikelola mandiri desa lewat Bumdes harus ditata dengan sistem manajemen yang baik dan transparan, bisa menjadi sumber pendapatan desa.

3. 4 Pembangunan Dalihan Na Tolu Sebagai Pemersatu

Geertz, seorang antropolog mengungkapkan tentang teori *primordialisme* yaitu ikatan *primordialisme* yang mengalami pencampuradukan antara kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial. Ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial, (Geertz, 1981). Hal ini terlihat dari kekuatan kelompok etnik (*ethnic group*) yang memiliki kesadaran kolektif akan kesamaan asal usul, bahasa dan adat istiadat. Sentimen primordial menjadi penting untuk menunjukkan sebuah identitas kelompok. Tapanuli Selatan memiliki identitas kelompok (etnis Angkola) yang berdasarkan marga dan marga menjadi penting bagi awal lahirnya suatu kampung (*huta*). Dalam kepemimpinan tradisional di Tapanuli Selatan jauh sebelum terbentuk negara Indonesia sampai sejak zaman Belanda sangat kuat peran adat (pemimpin/raja) sebagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi.

Menurut Laswell (1970), kekuasaan adalah semua hubungan diantara seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa menentukan (*Power is a relationship in which one person or group is able*) merupakan sebuah tindakan seseorang atau juga kelompok yang lainnya ke suatu arah tujuan dari pihak yang pertama (*to determine the action of another in the direction of the former's own ends*). Politik sebagai sebuah cara dalam meraih kekuasaan telah mengalami pasang surut sampai saat ini, terjadi perubahan dari sistem tradisional ke sistem modern, dan menghilangkan kekuasaan adat.

Sistem pemerintahan di era sekarang sudah mengurangi bahkan meniadakan kekuasaan raja di Tapanuli Selatan. Era otonomi daerah dan desentralisasi dianggap jalan keluar bagi penyelesaian persoalan selama Orde Baru yang menggunakan cara-cara indoktrinasi, sentralisasi dan militerisasi (*security approach*). Sistem politik (pemilu) yang terus beradaptasi dengan kondisi zaman membuat kekuatan identitas budaya tidak lebih sebagai alat kekuasaan atau politisasi etnik. Konsep Pilkada (dari pemilihan perwakilan ke pemilihan langsung) telah diuji coba agar konsolidasi demokrasi semakin baik dan demokratis.

Tapanuli Selatan sebagai daerah di wilayah Sumatera Utara yang memiliki identitas budaya Angkola, dianggap memiliki wilayah teritorial yang seharusnya juga mempunyai wilayah kultural (identitas lokal) yang kuat, akan tetapi sering disebut wilayah identitas lokal ini sangat pragmatis sehingga sangat mudah dilemahkan dengan kekuatan uang dalam pertarungan politik (meminjam istilah Gus Dur, membela yang

bayar). Sehingga para aktor politik sangat mudah menguasai masyarakat yang bersifat instan. Inilah salah satu tugas bersama untuk mengubah paradigma berpikir yang harus diretas dan diperkuat kembali semangat kolektifitas berdasarkan sentimen primordial yang positif bukan untuk alat politik saja demi meraih kekuasaan.

Perlu mengusulkan pembangunan Bagas Godang Tapanuli Selatan dan pemugaran Bagas Godang Luat wilayah adat. Sejarah kita sebagai suku Angkola harus mampu memberi solusi dalam kehidupan sosial masyarakat Pendidikan karakter (adat) tidak masuk kurikulum sekolah di Tapanuli Selatan padahal dulu ada pelajaran bahasa daerah. Mau dibawa kemana Tapanuli Selatan kalau cuma bisa bangun jalan tapi lupa membangun karakter generasinya akan tertinggal terus anak-anak kita disana. Lalu masyarakat kita kan petani, bagaimana dulunya kita swasembada tapi sekarang kesulitan demi kesulitan terus dirasakan masyarakat dengan kondisi harga salak, karet, aren, kemiri, beras, kopi. Meraka adalah petani banyak yang miskin dan tak mampu lagi membuat anaknya sarjana.

Mengenang perjuangan Alm. Marahalim Harahap dan Alm. Raja Inal Siregar (Tokoh *Marsipature Hutana Be*), Insyah Allah para tokoh-tokoh adat bisa saling bekerjasama. *Akkon songon salak sampagul do, rap tu ginjang, rap tutoru*. Raja-raja adat ikut mengawasi, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Selain itu ditambahkannya, pemerataan pendidikan belum terjadi misalnya SMK harus ada di setiap kecamatan, sangat prihatin dengan narkoba saat ini sudah merusak anak muda penerus bangsa. Jadi bersama Kapolres Tapanuli Selatan untuk

memberantasnya kalau perlu kita akan usulkan peraturan adat dan desa untuk mengusir dari desa pengguna narkoba ini begitu juga Poda Na 5 PAIAS PAMATANGMU (*Bersihkan Badan/ragamu*), PAIAS PARABITONMU (*Bersihkan Pakaianmu*), PAIAS BAGASMU (*Bersihkan Rumahmu*), PAIAS PAKARANGANMU (*Bersihkan Lingkunganmu*) semakin diperkuat di desa-desa.

Kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat budaya sangat penting untuk diwariskan dari generasi ke generasi agar kita tidak kehilangan identitas seperti “*Poda Na Lima*” sebagai payung hukum adat yang tak tertulis untuk dijalankan sebagai perilaku sosial antar individu, kelompok dan antar kelompok di Tapanuli Selatan Bumi *Dalihan Na Tolu*. Pemerintah harus menjaga katup pengaman munculnya konflik vertikal dan horizontal.

Tugas pemerintah dari pusat sampai ke daerah adalah mencerdaskan masyarakat agar rakyat terpenuhi kebutuhan dasar (sandang/papan), rakyat tidak lapar, miskin, menganggur, putus sekolah, kantong kosong (kapan terisi kalau tak ada kerja, bagaimana kerja kalau pendidikan rendah, sudah kerja masih kurang karena gaji rendah, sudah sarjana tak berani pulang kampung (desa) karena masih ditanggung orang tua, belum lagi lahan orang tua semakin sempit tak cukup memenuhi cita-cita menyekolahkan ditambah harga-harga yang tak sesuai.

Pemerintah harus menggunakan pendekatan kolaboratif (*colaborative approach*) dalam mengatasi berbagai problem sosial, termasuk kemiskinan dan penyakit masyarakat. Tentu harus dibuktikan, apakah Tapanuli Selatan miskin karena

kultur/mentalitas atau justru karena sistem kebijakan yang tak berpihak. Begitu juga dengan tingginya peredaran narkoba di desa-desa, prostitusi, judi dan lain-lain, adalah sederet persoalan yang sekarang melilit dan mengancam masyarakat Tapanuli Selatan. Karenanya kedepan, dengan memperkuat kehidupan keagamaan (Masjid, Gereja, sekolah/ pengajian.) bersama-sama dengan doktrin budaya *Poda Na 5* yang diinternalisasikan dengan kebijakan akan terwujud Tapanuli Selatan yang beriman, berkarakter, berbudaya.

Seorang pemikir zaman renaissans Niccolò Machiavelli (1469-1527), telah berhasil menciptakan sebuah teori politik-kekuasaan kekuasaan yang cukup fenomenal, sekaligus kontroversial. Pemikiran dan gagasan tentang teori "*Politik Menghalalkan Segala Cara*" itu ia tuangkan secara apik lewat karyanya "*Principe*" (*The Prince/Sang Penguasa*). Kendati buku itu banyak mendapat kritik dan kutukan, namun diam-diam banyak juga politisi dan aktor kekuasaan yang terpesona dan menjadikannya *hand-book* dalam sejarah politik dunia, bahkan di Indonesia. (Machiavelli, 2007).

Dalam teorinya itu Machiavelli menyebut, bahwa 'siapa yang menguasai senjata dia akan mengalahkan yang tidak menguasai senjata'. Begitulah, senjata dalam politik adalah modal, modal menjadi penting dalam pertarungan politik, tidak terkecuali dalam konteks kontestasi pemilihan pemimpin lewat pilkada. Dapat dipastikan, hampir *mindset* semua partai politik telah mengamini dan menguatkan teori ini, sehingga siapapun calon pemimpin harus melewati tahapan dengan perspektif modal.

Dalam aliran ideologi liberalisme, faham yang mengajarkan tentang *freedom*, kebebasan bagi individu dalam menguasai produksi sehingga muncul kekuasaan pemilik modal akan menguasai kekuatan ekonomi dan politik. Paham liberalis ini juga terus berjuang dengan menggunakan modal (kapital) dengan segala cara untuk menguasai sumber daya alam yang ada demi kepentingan politik-ekonomi global. Indonesia sebagai negara yang dilahirkan dengan ideologi Pancasila dengan falsafah gotong-royong sebagai budaya bangsa dan menggunakan politik Pancasila yang berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalism, kapitalisme, sosialisme, marxisme, komunisme dan Islam. Pancasila harus digelorakan sebagai payung hukum dalam perebutan kekuasaan di Indonesia bahkan dalam mewujudkan pemikiran politik Soekarno tentang Trisakti (berdikari, berdaulat dan berkepribadian) akan terasa penting untuk dicapai oleh para pemimpin dari semua tingkatan pusat sampai daerah.

Dulu banyak pemimpin masuk penjara dulu baru jadi pemimpin, tapi sekarang jadi pemimpin dulu baru masuk penjara. Jadi kepala daerah mensejahterakan rakyat adalah amanah konstitusi UUD 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah penyelenggara pemilu mampu melaksanakan semua tahapan pilkada sebagai wujud perebutan kekuasaan secara jujur dan demokratis di negeri ini? Kesiapan kita untuk melakukan transisi demokrasi dengan mendorong Pilkada yang independen dan bebas politik uang. Rakyatlah pemegang kedaulatan dalam demokrasi di Indonesia bukan uang dan kekuasaan serta bukan raja seperti

dalam negara teokrasi. Disamping itu, nilai-nilai agama menjadi penting untuk meminimalisir berbagai kecurangan dan motif politik. Prilaku politisi yang bergabung dengan partai politik sedang diuji dalam berdemokrasi, sebab partai politik sebagai pilar demokrasi jangan sampai menjadi alat kekuasaan tapi sebagai tempat rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik yang bebas dan transparan.

Daerah ini merupakan kawasan yang sangat kuat agama Islam dan adat budaya Angkola dengan sistem kekerabatan "*dalihan na tolu*". Adalah fakta yang tak dapat dipungkiri, bahwa tradisi politik yang sering dipraktekkan selama ini dalam merebut kekuasaan adalah dengan mengandalkan kekuatan modal (*hepeng*) atau dalam bentuk praksis dengan menggunakan strategi '*serangan fajar*'. Watak demokrasi yang seperti inilah yang akan kita lawan. Mampukah rakyat yang kuat agama dan adat melawan kekuatan modal? Sudah saatnya pilkada langsung bisa mengubah paradigma berpikir masyarakat dari *capital oriented* ke *cultural oriented*, menuju peradaban yang kuat. Spirit inilah yang menjadi tantangan bagi putra/putri Tapanuli Selatan yang ingin meretas pandangan dengan konsepsi budaya perlawanan politik "*marsialap ari*" sebagai konsepsi budaya lokal dengan pandangan hidup leluhur yang mulia dalam tatanan sosial hidup bersama-sama, bergotong-royong, bahu-membahu, '*rap tu ginjang, rap tu toru*', '*marsipature hutana be*'.

Tantangan ini cukup berat tapi mulia, rakyat harus dicerdaskan, diberdayakan dalam pendidikan politik budaya *dalihan na tolu*. Rakyat Tapanuli Selatan akan semakin sadar bahwa tanah adat/ulayatnya sudah dirampas oleh tambang,

perkebunan, PLTA hutan lindung dan sebagainya. Mereka mulai sadar bahwa sejak tahun 1980 an sebelum Tapanuli Selatan dimekarkan, tanah, hutan, kayu sudah dihabisi, 20 tahun berikutnya banyak kawasan yang luas menjadi perkebunan kelapa sawit yang pemiliknya dan dampaknya terasa bagi rakyat, ledakan penduduk asli dan pendatang semakin mengancam.

Masyarakat adat Tapanuli Selatan hanya mendapatkan dampak sosial, ekonomi dan budaya ditambah banyak orang yang kaya dari Tapanuli Selatan dan membawa hasilnya ke luar Tapanuli Selatan. Kapan lagi rakyat Tapanuli Selatan merasakan sebesar-besar kemakmuran atas sumber kekayaan alamnya. Mereka masih sulit menyekolahkan anaknya S1, S2 dan S3, mestinya masih dalam kandungan orang tuanya sudah bisa bercita-cita untuk masa depan anaknya. Harusnya kita sudah memiliki SMA Plus dan perguruan tinggi berkelas internasional, punya rumah adat Bagas Godang yang menjadi periwisata budaya yang diminati turis ditambah kehebatan alam dan danau sias serta peninggalan situs perbakala yang dipugar sebagai tujuan wisata.

Tidak diragukan lagi sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan hak dasar rakyat. Dan hadirnya tambang emas terbesar di Indonesia harus memberi kemajuan di seluruh wilayah Tapanuli Selatan menuju keberpihakan kepada kondisi rakyat akibat kemiskinan dan pengangguran terbuka yang terus bertambah, investor belum melirik tenaga kerja lokal terampil, penurunan jumlah sarjana di desa karena persoalan penurunan produktifitas hasil pertanian. Migrasi antar desa belum dengan konsep bapak angkat di wilayah

perkebunan. Perluasan/penambahan areal kawasan tambang emas akan terus terjadi, eksploitasi alam atas nama sumber daya energi terbarukan sebagai konsep negara yang tak terbendung. Pengakuan akan identitas semakin diperlukan lewat penguatan komunitas masyarakat adat.

Ini kesempatan masyarakat Tapanuli Selatan melawan pelbagai paham destruktif, seperti paham *permisivisme*, *pragmatism*, *individualisme* dan *machiavellianisme* yang serba melegalkan segala cara. Sudah saatnya kita menyadari, masyarakat adat dan putra/putri Tapanuli Selatan akan dijauhkan dari rasa memiliki terhadap daerah, raja-raja adat sulit bersatu karena masih menjadi '*agen*' (aktor) yang mengatasmakan adat untuk tujuan kepentingan pribadi, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi sebagai penyebab politik uang masih sulit dihilangkan.

3.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Adat

Walaupun dalam masyarakat Angkola terdapat 2 agama yang berbeda, tapi kerukunan beragama sangat terjaga dengan baik dari dahulu hingga sekarang. Orang Batak Angkola pada umumnya bertahan hidup sebagai petani, seperti pada tanaman padi di sawah maupun ladang. Mereka juga menanam berbagai jenis sayur-sayuran sampai tanaman keras seperti kopi arabica dan lain-lain. Memelihara ternak seperti ayam, bebek, angsa, kerbau dan sapi, merupakan kegiatan sampingan sebagai penambah penghasilan. Saat ini sudah mulai banyak menanam sawit, karet, salak, pinang dll.

Tugas kita bersama menjaga NKRI, jauh dari tindakan koruptif apalagi berkonspirasi atas SDA, berjuang untuk kesejahteraan. Mari kita tulis sejarah marga-marga, agar internalisasi nilai budaya semakin kuat bagi generasi muda.

Suku Angkola atau Batak Angkola adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidempuan di provinsi Sumatra Utara. Seperti etnis Batak pada umumnya, tradisi marga juga berkembang dalam masyarakat suku Batak Angkola. Marga-marga yang terdapat pada masyarakat Angkola adalah Dalimunthe, Harahap, Siregar, Nasution, Ritonga, Batubara, Daulay dan lainnya.

Beberapa marga pada masyarakat Angkola terlihat masih memiliki kekerabatan dengan marga-marga yang ada suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Secara sejarah suku Angkola ini masih berkerabat dengan suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Setelah beberapa tahun berlangsung kekuasaan Padri di tanah Angkola, maka masuk pasukan Belanda menaklukkan dan mengusir pasukan Padri dari Angkola. Masuknya Belanda ke wilayah ini membuat orang Angkola yang bertahan dari pengaruh Islam Padri memilih memeluk Kristen yang dibawa oleh para misionaris Belanda.

Menelusuri sejarah manusia pertama di Tapanuli Selatan sampai marga pertama di wilayah nusantara sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, napak tilas kehadiran agama lewat Candi Bahal, Candi Buddha Padang Bolak, Portibi Gunung Tua sekitar 1000 tahun yang lalu kira-kira tahun 1411, abad

ke 11 masa Sriwijaya dan dibangunnya mesjid pertama di Padangsidimpuan, mesjid Sri Alam Dunia di Sipirok, mesjid Syekh Zainal Abidin Harahap di Desa Pudun, Gereja HKBP di Sipirok, GKPA di Parau Sorat, makam Djaromahot Nasution (Tokoh kerukunan di Tanah Batak) serta Taman Makam Pahlawan di Sipirok. Adanya kerajaan Marga Luat dengan adanya Bagas Godang sebagai pusat pemerintahan adat dulu, apakah sekarang sudah terlupakan, Era penjajahan Belanda ada *Afdeling* Padangsidimpuan bekerjasama dengan kerajaan adat marga-marga di Luat Tapanuli Bagian Selatan. *Afdeling* dipimpin seorang Residen dengan pusat pemerintahan membawahi tiga distrik dipimpin tiga *Onder Afdeling* masing-masing dipimpin *Controleur* seterusnya membawahi *Onder Distrik* dipimpin oleh Asisten Demang berpusat di Padangsidimpuan. Angkola di Tapanuli Selatan dulu sebelum kemerdekaan tiga distrik masing-masing Angkola dengan pusat Padangsidimpuan, Batang Toru, distrik Sipirok *order distrik* ini membawahi pula Luhut/Kuria yang dipimpin Kepala Kuria. Ketiga *Order Afdeling* ini sama kedudukannya dengan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Pemulihan kekuatan tahun 1949 seluruhnya digabung menjadi satu kabupaten dengan pusat pemerintahan di Padangsidimpuan.

Menurut catatan yang disampaikan lewat diskusi WA HP Android oleh J. Harahap yaitu

“Mengulik Sejarah Keresidenan dan Afdeeling. Pada abad XVII – XVIII seluruh kawasan Pantai Barat Sumatera dikuasai oleh Inggris, dan awal abad XIX Inggris menyerahkan kawasan ini kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak berakhirnya Perang Paderi (1838) hingga awal abad ke-20 (1906), *Sumatra's Westkust* tetap dipakai menjadi

nama unit administratif. Levelnya setingkat *Gouvernement* (setara dengan provinsi dewasa ini), dan dinamakan *Gouvernement van Sumatra's Westkust* (Pemerintahan Pantai Barat Sumatera), yang pada akhirnya berubah nama menjadi Keresidenan yang berpusat di Air Bangis (AIR BANGIS RESIDENTE). Sejalan dengan Pembentukan Administratif Residen Air Bangis, Kolonial Belanda jauh-jauh hari sudah mulai melebarkan sayap dan menancapkan kuku diberbagai daerah yang paling berpengaruh saat itu, sasaran pertama mereka adalah PORTIBI. Tahun 1837 agresi kolonial ke jantung Padang Lawas yang terletak di Portibi membuahkan hasil gemilang ditandai jatuhnya Kerajaan Portibi ke dalam wilayah taklukan Belanda. Dua tahun kemudian 1839 M, Portibi dijadikan Kolonial Belanda menjadi salah satu titik tumpu pusat administrasi di wilayah timur dan menjadikannya sebuah *afdeeling* (Setingkat Kabupaten) dengan nama *Afdeeling* Portibi dan menjadi bagian atau dibawah Keresidenan Air Bangis. Tahun 1906 M Keresidenan Air Bangis dibekukan yang kemudian oleh Kolonial Belanda diganti dengan Keresidenan Tapanuli yang berpusat di Sibolga.

Langkah berikutnya adalah membekukan *afdeeling* Portibi dan mengganti dengan *Afdeeling* Padang Sidempuan. Hal baru kemudian tercipta setelah pengangkatan Padangsidempuan jadi *Afdeeling*, yakni pembentukan *districh* dan kekuriaan. termasuk *districh* Portibi dan kekuriaan Padang Bolak di Gunung Tua. Untuk Wilayah Sidempuan sendiri terdapat beberapa kekuriaan dengan kepala kurianya berasal dari masyarakat pribumi yang dipilih dan diangkat warga dibawah KONTROLING Kolonial (Rata rata kepala Kurianya Bermarga HARAHAHAP). Sedangkan untuk *Districh* Portibi dengan Kekuriaan Padang Bolak di Gunung Tua yg menjadi kepala kurianya berasal dari marga Hasibuan”.

Sementara wilayah etnik Angkola mendiami sekitar 9000 tahun sebelum masehi terbukti dengan kerajaan-kerajaan seperti

Sabungan Julu (di kaki Lubuk Raya), Batunadua, Sipirok/Parau Sorat, Siala Gundi, Muara Tais, Hutaimbaru, Losung Batu, Batang Toru, Sabungan, yang mayoritas bermarga Harahap dan Siregar, dibuktikan dengan adanya Bagas Godang makam para Raja Adat. Sedangkan pro kontra atas suku Batak Angkola juga masih ada, ini sangat terkait dengan nama Batak yang dianggap sebagai Batak sama dengan Kristen, menurut M. Siregar mengatakan dalam tanggapan melalui media *online* di FB (Facebook) bulan Januari 2022 yaitu:

“Orang dulu di Tapanuli Selatan tidak mau dibilang Batak karena Batak itu identik dengan Kristen, itu hanya buatan Belanda dan ditunjuklah Toba paling tua. Tapi secara akal sehat tanpa bukti jelas karena daerah Toba itu adalah tanah gersang. Nggak mungkin orang mau hidup di sana. Pasti orang hidup di daerah subur. Kedua Sisingamangaraja nggak mungkin *Pelbegu* tapi Toba bilang *Pelbegu* karena simbol atau bendera Sisingamangaraja adalah simbol Kristen. Sebelum masuk Belanda ke daerah Batak sebutan Belanda Kristen sudah duluan buktinya Barus, tangga seribu. Menurutku dari negeri China dan banyak juga orang Toba yang pintar mengetahuinya”.

Penguatan masyarakat adat di Tapsel tidak mudah jika peran pelaku (aktor), tokoh adat tidak melakukan konsolidasi di wilayah adat secara sosial dan hukum. Secara organisasi adat masih *'bertengkar'* alias berbeda pendapat antarsesama pengurus, siapa yang paling berhak secara adat belum lagi aktifitas 'kerajaan' sudah kurang diakui, padahal sejak dulu sampai sekarang pemerintah mengakui pengetua adat dalam setiap aktifitas pemerintahan, selalu diajak dalam kegiatan dalam merumuskan pembangunan di Tapsel. Masyarakat adat seakan tak mengakui 'Raja Adat' nya, ini perlu kita perkuat bersama.

Menurut hasil wawancara dengan H.T Harahap tentang sejarah singkat marga Harahap di Tapsel khususnya eks. Kekuriaan disebutkan bahwa:

“Menelusuri sejarah marga Harahap di Angkola sangat penting sebagai bahan refleksi bagi generasi (keturunan/*popparan*) nya dibelakang hari. Mengetahui asal usul Harahap Angkola akan menguatkan ‘tondi’/semangat. Harahap Angkola ini terdiri dari 6 (*Onom Marsada Ina*) yang terdiri dari: 1). Oppu Sarudak Hutaimbaru; 2). Oppu Toga Langit Losung Batu; 3). Oppu Mara Imbang Desa Pijor Koling; 4). Oppu Toga Langit Sodogoron Mompang; 5). Oppu Tunggal Khuayan Batunadua; 6). Oppu Raja Sori Siharang-harang. Inilah induk Harahap yang menyebar kemana-mana, ada yang ke Portibi, Medan, Jakarta, Malaysia dll”.

Penulis yang merupakan keturunan Harahap Oppu Sarudak yang tinggal di Medan telah melaksanakan ‘*Parosu Tondi*’ untuk pertama kali, membentuk Lembaga Adat Ompu Sarudak sebagai bentuk persatuan dan menelusuri sejarah dan menguatkan silaturahmi yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Desa Sibongbong Angkola Selatan. Identitas marga bukan untuk tujuan politik jangka pendek tapi menyadari ketertinggalan dan kedudukan pemimpin adat di tanah bumi *dalihan na tolu* termasuk mempertahankan tanah ulayat Hutaimbaru. Menurut J, Harahap menyebutkan:

“*Popparan ni Ompu Sarudak* hanya ada 5 (lima) Hasuhuton yaitu: 1). Hutajulu (Bagas Godang). 2. Hutagodang Julu. 3. Hutagodang Jae. 4. Huta Tonga. 5. Huta Balian. Panobasan itu ada dibawah Hutabalian, jadi jangan dibuat sama semua. Harap diperbaiki, jadi ulang *marsala-salaan, ami* keturunan *sian Hutabalian do, tai molo popparan ni Harahap Oppu Sarudak Pala Kahanggi do di ami i, ima*

namambuat Umak Tobang nami, artina ima Aya tobang nami, Harahap sian Oppu Sarudak ma popparan ni i."

Sedangkan menurut K.R Harahap menyebutkan bahwa: "*Muse, Tunggul Huajan inda di batunadua i..., tai Pargarutan..., adapun yang di Batunadua, poppar ni Tunggul Huayan doi, sian barisan Oppu Jurung..., itu pun tidak dalam jumlah mayoritas".* Begitu juga dalam pertanyaan oleh A, Harahap:

"Sattabi kahang..., ralat saotik no 2 i..., bukan Oppu Mara Imbang yang benar Oppu Sumur gelar Mangaradja Imbang Desa Madung pasti do 6 marsada ina on kahang? Aha referensina? Si Misang Andor, Si Andor Misang, Bangun Dibabuat, Bangun Dibatari, Manjungkit Tano, Tamanalom, Ompu Gunung, Sutan Maujalo, Sutan Nasinok, Harahap Simataniari masuk tudia on? No 5. Bukan oppu tunggal khuayan tinggal di Batunadua, Tunggul Khuayan itu ada di paragarutan, anak nya ada 6, yang No, 1 appu jurung, dialah yang di batunadua, ada tugu nya disitu, tks Onang Bayo Angin, Panobasan, Sibongbong, Sangkunur dibawah Hasuhuton, Hutabalian, Hutalambung dibawah Hasuhuton Hutatonga".

Padahal raja-raja adat dalam setiap aktifitas adat terutama dalam perkawinan dan acara-acara sosial lainnya juga aktif menjaga generasi kita dari bahaya kejahatan sosial ditengah-tengah masyarakat. '*Anggo adong namasa akkon mangido tolong do harajaon i pature hita bope na di siluluton songoni disiriaon*'. Persoalan '*Harajaon*' akan kuat jika kita semua saling lapang dada, terbuka meluruskan sejarah adat kita, *ise do Panusunan Bulung ta* mestinya sampai ke desa dan dusun bisa kita kuat khususnya '*Raja-Raja Pamusuk*', (saatnya ada sertifikasi raja-raja adat Tapsel).

Menurut pandangan MHS. Harahap asal Tapsel juga menyampaikan bahwa:

“Suatu hal yang sulit rasanya untuk perkuatan masyarakat adat di Tapanuli Selatan khususnya di wilayah Angkola, apalagi terkait perkuatan eks Kekuriaan, hal ini dikarenakan hilangnya jati diri dan identitas diri dari masyarakat itu sendiri, sebagai contoh dapat dilihat dari penyebutan istilah untuk suatu satuan wilayah, yang mana masyarakat di Angkola saat ini menyebut federasi dari beberapa Huta itu sebagai Luhah yang dipimpin oleh Raja Luhah yang bergelar Panusunan, padahal di Wilayah Angkola tidak mengenal istilah Luhah ini, Istilah Luhah ini hanya dikenal di Wilayah Padang Bolak, adapun untuk wilayah Angkola Federasi dari beberapa Huta ini lazimnya disebut Koeria dan Djanji, inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Sipil Hindia Belanda menggunakan istilah Kepala Kuria untuk wilayah Angkola dan istilah Kepala Luhah untuk wilayah Padang Bolak karena memang Istilah istilah itu lah yang dikenal di daerah daerah tersebut”.

Pergeseran ideologi pembangunan era Jokowi saat ini ke penguatan masyarakat adat dan banyaknya perusahaan pemilik HGU/HPH dihentikan harus dijemput dengan semangat bersatu seluruh masyarakat adat se Tapsel. Jangan konflik internal yang kita kedepankan, tapi kompromi secara komunal, bersama kita rumuskan cara agar tanah-tanah kita kembali ke pemanfaatan, ‘mengusahai’ secara aktif, jangan dialifungsikan untuk segelintir orang yang diuntungkan apalagi yang berkebudan atau berladang hanya mereka yang punya uang bisa membayar. Padahal pemerintah saat ini memberi ruang, bantuan dan kemudahan agar masyarakat bisa kuat ekonominya, daya tahan pertumbuhan ekonomi ditengah Covid sangat ditentukan oleh katup pengaman para petani, pedagang kaki lima,

buruh dll, belum lagi dampak kehadiran para pengusaha di daerah lewat pemanfaatan CSR belum maksimal membantu masyarakat sekitar, sering digunakan oleh Kepala Daerah untuk pembangunan fisik belum pada penguatan pertanian dan UMKM. Tapsel bergerak 'dilanjutkan', pada peran masyarakat adat dan kehadiran investasi di Tapsel harus transparan atas pengelolaan BUMD Tapsel dana CSR untuk kepentingan publik.

Menariknya saat ini perlu penguatan dokumen/data-data sejarah dibuka ke publik, perbedaan pendapat saat ini menguat akibat tanah-tanah adat (ulayat) akan terus terjadi, jika pengelolaan (pemanfaatan) bukan untuk masyarakat adat yang terjadi pelepasan hak oleh pengurus adat. Mari kita memikirkan masa depan masyarakat adat jika kita ingin tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat harus diterjemahkan bagi masyarakat kita di Tapsel. Sementara A. Siregar juga memberikan saran bahwa:

“Beberapa persoalan tentang ulayat di Tapsel harus dicermati sebagai bentuk kesadaran baru atas tanah berhadapan dengan kehadiran investor dan ‘mengambil’ untuk kepentingan perusahaan, antarmarga dan dinamika penguatan secara hukum terus berjalan untuk mendapat hak-haknya agar dampak kedepan juga diperhatikan oleh masyarakat adat, jangan mudah kita jual apalagi ganti rugi tidak sesuai, sekarang raja-raja tidak seperti dulu lagi seenaknya menjual, kita juga harus ikut mengawasi, sosial kontrol yang aktif termasuk ke Pemkab Tapsel dan Kepala Desa. Saya berharap mari kita duduk bersama bermusyawarah secara baik jangan mau dipecah belah.”

Bisakah penguatan identitas etnik untuk perjuangan kesejahteraan bekerjasama dengan perusahaan yang

berinvestasi di Tapsel. Sudah saatnya kita kembalikan 'ruh' *tondi* perjuangan atas eksistensi tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di Tapsel menjaga '*ulos nasora ni buruk*', memberikan peran masyarakat adat pada 'negosiasi ekonomi' yang hari ini kita hampir kehilangan kekuatan atas kepemilikan secara sah sejak merdeka. Jauh sebelum kemerdekaan di NKRI ini para Raja-Raja Adat kita sudah ada di Luat atau Kuria masing-masing daerah. Masih ada harapan yang memberi kesempatan maju lewat pertanian dan perkebunan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan BPN.

Seperti apa Tapsel maju dengan spirit agama dan adat budaya lokalnya, Masih adakah '*pertengkararan ideologis*' yang bersifat sentimen mazhab atau beralih ke sentimen penduduk pendatang akibat kecemburuan sosial.? Saatnya penegakan hukum semakin kuat, lahir mentalitas budaya kerja keras dan belajar keras. persaingan atas ketertinggalan penduduk asli, pemilik ulayat, pemilik marga lebih maju dan bisa mengisi pembangunan. '*Intervensi Negara*' untuk '*negosiasi ekonomi*' bagi kesejahteraan masyarakat seperti Soekarno melihat kaum petani miskin (kaum Marhaenis) bukan untuk dikorupsi apalagi berkonspirasi atau implementasi ajaran surah al Maun atau ajaran budaya Angkola yang ada.

Djamanat (2013:69) mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari penguasa adat.

Jika ideologi pembangunan sejalan dengan kearifan lokal akan menambah ‘rasa senasib sepenanggungan’, ‘*saanak saboru*’ di bumi *dalihan na tolu* Tapsel. Adapun nilai-nilai itu misalnya: *Pertama*, ‘*hombar adat dohot agama*’ (nilai Ketuhanan/dalam Islam konsep Tauhid/masyarakat sudah beralih ke monoteisme. Nilai budaya yang tidak sesuai dengan Islam pelan-pelan diitinggalkan, jadi budaya dan agama saling menguatkan. *Kedua*, kemanusiaan dalam budaya *dalihan na tolu* sangat dijunjung tinggi yaitu adil dan beradab dibuktikan dengan cara hidup ‘*marsihaholongan*’, ‘*sahata saoloan*’, ‘*rap tu ginjang rap tu toru*’, menolak sistem kapitalisme, saling menghormati antarsesama. *Ketiga*, persatuan kita diikat dengan perekat budaya *dalihan na tolu*, siapapun bisa tinggal, hidup bersama dengan damai, begitu juga persatuan dalam aktifitas bergotong-royong (*marsialap-ari*). *Keempat*, kerakyatan diwujudkan dalam filosofi pola hidup saling membantu sesama lewat ‘*martahi*, ‘*marpokat*’. Keadilan sosial, kita menolak bentuk sistem kapitalisme, sosialisme apalagi komunisme. Konsepsi keadilan ekonomi lewat ‘*marjulo-julo*’, sekarang koperasi, keadilan ekonomi bukan segelintir orang.

Makna nilai sosial dalam pembangunan di Tapanuli Selatan dikuatkan fondasi ‘*Poda Na 5*’, dimulai dari diri sendiri dan keluarga (bergerak dari hati (*roha*/jiwa), *bagas* (rumah), pakaian (*parabiton*) adab perilaku sosial, pekarangan (lingkungan), motif kehidupan sosial sangat penting sesuai budaya lokal dan tidak bertentangan dengan agama dan ideologi negara. Menurut H. Harahap asal Hutalambung Kecamatan Angkola Barat mengatakan:

“Akkon tangi di siluluton (duka cita), inte di siriaon (suka cita). Tapsel Dalihan Na Tolu harus bergeser dari ‘mentalitas lama’ (bahat mangeceti halak, lupa tu kobun dohot tu saba, pupu tu lopo, pupu marutang, pupu tu rentenir, na targora on, na tarpaingot, na tarpaubah, na tarpatujolo, nara mardomu, nara martahi, nara marsikola, nara karejo na ia sajo, giot disia sajo, padiar ia sajo”. Harus menuju kepada ‘mentalitas baru’ (belajar keras, kerja keras: *ta pature* (martabe), *ta paias* (Poda Na 5), Gotong Royong (*marsialap ari*), musyawarah (*marpokat*), menabung dan membantu (*marjulo-julo*), saling menolong ‘*haroan boru*’, ‘*pabagaskon*’, dll (*martuppuk/martahi*), hidup bermasyarakat dan berpemerintahan (*satahi saoloan* = seia sekata). Pergaulan sehari-hari (*martatur poda*)”.

Ada organisasi Forkala (Forum Komunikasi Lembaga Adat), Dewan Adat Raja Angkola Sipirok. Tentu berbeda dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (Sumbar/Padang/Orang Minang, Ninik Mamak) begitu juga Lembaga Adat Aceh (MAA). Semangatnya untuk memperkuat masyarakat adat, apalagi menyelesaikan berbagai persoalan tanah ulayat dan eksistensi kehidupan masyarakat lokal. Sebuah kerjasama lewat pemerintah memberikan resolusi sosial budaya di Tapsel. Solusi selama ini lewat penegakan hukum oleh Pemkab Tapsel beserta jajarannya belum maksimal dan terjadinya berbagai sengketa tanah maupun problem sosial di masyarakat belum terselesaikan dengan tuntas.

Ada tarik-menarik kepentingan para elit (kuatnya politik lokal) sehingga Tapsel kehilangan kekuatan kelompok penyeimbang (*civil society*) yang kuat, lihatlah Ormas agama, OKP, partai politik dan lembaga bentukan pemerintah seolah

terkooptasi dan cenderung mudah dintervensi kekuasaan. Pembelaan kepada hak-hak masyarakat sipil mudah terabaikan. Bagaimana menguatkan masyarakat adat di Tapsel? Apakah ada segelintir orang yang sumber daya alam dan anggaran pemerintah digunakan bukan untuk kemakmuran rakyat.

Kalau program Forkala berbasis anggaran lebih pada penguatan pelestarian nilai-nilai budaya Angkola dan belum memenuhi aspirasi perjuangan masyarakat adat. Lihatlah perkembangan adat istiadat dan pelestarian budaya belum mengakar secara utuh apalagi membumi bagi warganya. Program ‘*Makkobar Boru Marbagas*’, ‘*Maralok-Alok Margondang*’, ‘*Tor-Tor*’ cenderung program perlombaan, apakah penanaman nilai-nilai budaya bidang pendidikan pra sekolah (PAUD) dan lainnya. Memperkuat ‘*mardalihan na tolu*’ (konsep kekerabatan yaitu ‘*manat markahanggi*’, ‘*elek maranak boru*’ ‘*hormat marmora*’). Hubungan dengan Tuhan dan manusia (*hombar do agama dohot adat/dua-duanya jangan ditinggalkan, pilar kemajuan Tapanuli Selatan*).

Konsep hidup (*social life*) dengan Kerja keras (*marudan marlasniari*), memiliki jiwa belajar keras (*akkon monang/akkon juara, maila tinggal kelas, maila na sikolah, marutang pe jadi asal ma lalu sikola ni anakkon, anakki do hamora on di au*). Kemudian menjaga warisan (*bagas dohot tano/kobun, ulang marhurang anggo bisa martamba*). Secara sosial juga ditanamkan rasa *holong mangalap holong* (silaturrahim antarsesama manusia, saling hormat menghormati, saling menjaga, ‘*marsiparorotan inda marsisingungan*’. Dalam pergaulan (*marsipaingotan inda marsigut-gutan*). Sikap dan pola hidup bersama (*rap tu ginjang rap tu toru*).

Menurut hasil pengamatan penulis ketika berkunjung bulan Juli 2020 ke *Sopo Godang* Bapak I. Daulay yang membangun simbol adat istiadat '*sopo godang*' di kabupaten Langkat, sejarah awal orang tua beliau merantau dari Tapsel dulu ke desa terpencil di kecamatan Sicanggung terdapat sosok tokoh panutan yang berasal dari Sipiongot Tapsel dulu, seorang guru/kepala sekolah di salah satu SDN di Kec. Sicanggung bermarga 'Daulay' ayah tercinta dari Bapak H. Ibrahim Daulay (Kepala Sekolah SMA Dharma Pancasila). Sang ayah ternyata sejak 1972 sudah 'migrasi' pindah merantau dan ditugaskan sebagai guru. Sejarah singkat perjalanan putra Tapsel ini memberi inspirasi sebuah keberhasilan sang guru menjadi teladan di perantauan. Secara kebetulan saya singgah sejenak di '*Sopo Pak Daulay*', untuk kedua kalinya dan berdiri '*Sopo Godang*' di sebuah desa mayoritas bersuku Jawa, tentu punya nilai historis bagi generasi Tapsel, ternyata motivasi dan dedikasi serta perjuangan melawan alam di daerah tertinggal Tapsel dapat merubah mentalitas tangguh dan sukses dirantau.

Sejak dulu terdapat semacam ejekan kepada daerah Sipiongot, ternyata bisa memberi mata air bagi orang lain, lokasi daerah yang sulit, dulu hanya kuda sebagai alat transportasi, jauh di pegunungan, berjalan kaki. Ketika ditelusuri kenapa ada '*huta*' di daerah yang jauh dekat bukit, ternyata para 'raja' dari marga yang ingin membuka '*huta*' (kampung) dan menjadi raja kampung. Sang ayah dari Sipiongot bermarga Daulay, telah menembus batas primordial, hidupnya memberi masa depan bagi orang lain, mencerahkan sumber daya manusia dan mampu meneruskan pendidikan anak-anaknya lewat gaji guru yang dulu

masih sedikit belum ada sertifikasi ternyata ‘ruh’ keikhlasan dan ‘keberkahan’ menjadi pintu jalan yang diberi Allah untuk kemudahan hidup, ditambah sikap sederhana menjadi guru yang dikenang lintas generasi.

Secara tak disengaja, ‘Boru kami marga Harahap’ keturunan Ompu Sarudak Tapsel juga ditempatkan di sekolah yang sama dan beliau mendapat jodoh di Desa yang sama, terjadi sebuah regenerasi Daulay dan Harahap di Kec. Sicanggung di bidang pendidikan, maka ikatan kekerabatan (*dalihan natolu*) akan semakin erat di perantauan. ‘Sopo Daulay’ simbol ‘pertarungan ekonomi, budaya, politik’ putra Tapsel. Sang guru mampu ‘bertarung’ melewati pendidikan sebagai jembatan melawan ketertinggalan di desa kampung halaman ‘Sipiongot’ dulu, insya Allah menjadi contoh bahwa ‘migrasi masih menjadi solusi perubahan hidup, semoga marga Daulay dan Harahap ini akan mendorong ‘*marsipature hutana be*’ di Tapsel. Ternyata konsepsi ‘pembauran’ dan ‘moderasi’ antaragama dan etnis telah diwariskan oleh budaya Angkola/Mandailing sebagai wujud terjalannya interaksi dan komunikasi serta modal sosial sang pendidik. ‘Sopo Daulay’ ini akan memberikan inspirasi untuk kekuatan identitas lokal lewat persatuan marga sebagai alat perjuangan putra/i Tapsel di perantauan. ‘*marsitogu-toguan*’, ‘*marsitorangan*’, ‘*marudan marlasniari*’.

‘Sopo Daulay’ ini adalah simbol ‘*martahi*’, ‘*marpokat*’, ‘*marsialap ari*’, antara anak dengan orang tua, anak dengan anak keturunannya, perekat dalam ‘bertarung’ meraih hidup, menguasai pendidikan, ekonomi, politik di daerah perantauan. Ada usaha bersama ternak kambing, membeli sekolah, membuka

kolam ikan dan kebun sawit secara bersama-sama (inilah wujud '*marsiholongan*') ketika dulu sang ayah menorehkan hidup jadi guru '*marudan marlasniari*, jalan kaki dan naik sepeda, tinggal di perumahan sekolah tapi memiliki semangat hidup yang luar biasa dan menjadi teladan bagi generasi Tapsel (sebelum pemekaran).

Berbeda dengan dialog bersama Bapak Sudirman Chaniago April 2020 di lokasi Taman Buaya Asam Kumbang Medan tentang peran budaya Minang sebagai perantau dijelaskan:

“Jejak Perantau Minang migrasi ke Medan dari Kepulauan Nias, bersama pedagang Minang, orang awak, dari Sukaramai kelahiran Nias Pulau Telo, nenek merantau dari Padang sungai Lundang Bandar Sepuluh Sumatera Barat. Merantau karena kesulitan ekonomi. Tinggal dan mencari kehidupan di Nias dengan kebun kelapa, sebagian mengambil ikan di laut, buat sawah, karena monyet sangat banyak dibuatlah sangkar agar tak masuk termasuk menghindari sawah dari babi hutan. Pohon kelapa yang ditanam orang Minang ditinggal lalu pulang ke kampung Sungai Lundang, Batang Kapas Pasar Kuo, nenek meninggal di Nias, karena tak ada harga tanah dan kelapa dijual sama orang bersuku Nias. Orang Minang keturunannya di Nias merantau kemana-mana termasuk ke Medan.

Inilah yang sekarang tinggal di Suka Ramai ikut penjual kerupuk Jange, Tipang Batieh yang diproduksi pedagang Minang Pariaman. Semua sudah sukses, rata-rata sudah Haji. Pedagang Bukit Tinggi yang buat Tipang tak mau memberi sama orang lain, takut usahanya tak jalan. Pak Chaniago tetap sehat berjualan kerupuk Jange, Tipang, di Penangkaran Buaya Sunggal Medan, sejak 1987 datang dengan naik angkot lalu naik becak sampai tujuan. Istri juga membantu di rumah sebagai tukang kusuk anak dan ibu bisa dapat 50 ribu, kadang 100 ribu, punya enam orang

anak. Berjualan meski Corona dengan protokol kesehatan sangat berdampak karena baru buka tempat wisata tanggal 26 Juli ini, tutup habis lebaran. Dulu sebelum covid masih lumayan bisa 150 ribu sekarang yang jualan saat hari libur Minggu dan tanggal merah baru saya yang beli buka dasar, sepi pengunjung, pengusaha pariwisata takut peraturan. Tetap semangat Pak Chaniago contoh bagi etnis bersuku Angkola Tapsel”.

Mari gelorakan spirit agama, budaya, sosial, ekonomi, politik menuju Tapsel membangun bersama rakyat menunggu pemimpin *'parhobas'* (pelayan atau melayani bukan dilayani, *'pature hita'* seperti pembangunan tanpa korupsi, masyarakat tanpa narkoba dan judi, hutan tanpa menunggu bencana banjir, adanya pencemaran sungai, danau tanpa pencemaran industri, membuka perluasan lahan baru, rakyat Tapsel menanam, pupuk murah, sembako murah, berobat murah, sekolah murah/gratis, sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Tapsel, pariwisata melahirkan sumber PAD, BUMD maju, *deviden/CSR* tak diselewengkan, ganti rugi tepat sasaran, lapangan kerja diciptakan, BLK dihidupkan, mesjid diramaikan, kesenian Angkola Sipirok dilestarikan dan sebagainya.

Mari jauhi politik pecah belah, *'politik adu domba'*, atau *'devide et impera'* yaitu kombinasi strategi politik, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Politik ini menjadi alat yang ampuh untuk melumpuhkan kekuatan raja-raja adat di Tapsel, klaim kekuasaan adat (*harajaon*) dan berbagai persoalan tanah ulayat harus dimusyawarahkan agar bermanfaat bagi masa depan anak cucu kita.

Perebutan lahan akan menjadi perbincangan serius bahkan menyebabkan berbagai perselisihan. Jika ‘perampasan’ atau pengalihan tanah-tanah adat sudah dianggap biasa, tak peduli atau terus dibiarkan demi kepentingan sesaat untuk perut dan kantong tanpa memikirkan jangka panjang. Apa yang terjadi kedepan? Tapsel membutuhkan tokoh pembela masyarakat adat. LSM, akademisi, dan LBH terus menyuarakan masyarakat adat (marga) di Tapsel.

Raja-raja adat Tapsel perlu belajar melawan politik pecah, ikut mempersatukan kekuatan besar terutama Marga Harahap. Dalimunthe, Siregarn Pulungan bersama *Dalihan Na Tolu* sebagai eks Kekuriaan dulu mencegah terjadinya konflik masyarakat adat kedepan. Eskalasi konflik akibat ketimpangan pembangunan yang selama ini berorientasi fisik-infrastruktur dan melupakan infrastruktur budaya telah mempercepat eskalasi kejahatan sosial yaitu meningkatnya penyakit masyarakat baik judi, narkoba dan kriminalitas di Tapsel. Kesulitan ekonomi menguatkan hadirnya koperasi simpan pinjam bersifat rentenir, karena dianggap menjawab kesulitan masyarakat di Tapsel, sistem koperasi yang dijalankan pemerintah dan ‘gotong royong’ bersifat sosial maupun gerakan Baznas dan ekonomi syariah tak mampu hadir di desa.

Karena itu butuh kekuatan ‘kearifan lokal (*local wisdom*) ini digunakan sebuah ‘*resolusi kolaboratif*’ lintas kepemimpinan politik (partai politik, tokoh masyarakat, pemuda, agama dan adat) menggerakkan ‘ruh’ kemasyarakatan Tapsel. Masyarakat adat harus jadi penggerak pembangunan. Inilah yang melahirkan sadar kamtibmas sekaligus ujung tombak ‘*siriaon*’ dan ‘*siluluton*’,

menjaga tanah-tanah ulayat masing-masing, investor jangan sampai mengambil hak-hak masyarakat, adat istiadat dan lingkungan, air, sungai, hutan sebagai sumber kehidupan tetap terjaga.

Lihatlah desa sebagai pilot proyek pembangunan hanya diatas kertas minim prestasi Bumdes, miskin ide dan program pro UMKM desa apalagi pemanfaatan tanah kosong untuk usaha bersama. Program koperasi unit desa, kelompok tani desa yang handal maupun sekolah di desa serta infrastruktur lainnya berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata masih perlu ditingkatkan.

Perlu memetakan wilayah akibat ledakan penduduk dan lapangan kerja yang mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat kepada keluarga miskin, disabilitas, dll. Pemetaan keluarga harapan ini masih perlu diinventaris agar semua warga harus mendapatkan haknya. Bagaimana dengan keluarga di pegunungan yang tinggal di kawasan hutan lindung, pemerintah harus tegas tidak memberikan bantuan apalagi ada motif politik. Siapa pun yang tinggal tapi melanggar hukum ini juga harus ditindak. Model integratif dan kolaboratif dalam penyelesaian kondisi sosial dan dampak pembangunan akan melahirkan kemajuandi Tapsel.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, selain kaya akan adat, budaya, dan wisata, di kabupaten ini juga terdapat pondok pesantren tempat generasi penerus bangsa menuntut ilmu. Berikut daftar Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan:

1). Pondok Pesantren Jabalul, Alamat: Kelurahan Sijungkang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. 2). Pondok Pesantren Modern Al-Abraar, Alamat: Siondop Julu, Kelurahan Sihuik – Kuik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. 3). Pondok Pesantren Modern Unggulan Darul Mursyid, Alamat: Simanosor Julu, Kelurahan Sidapdap Simanosor, Kecamatan Saipar Dolok hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. 4). Pondok Pesantren Raudlatul Falah Benteng Huraba Alamat: Kelurahan Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. 5). Pondok Pesantren Modern Baharuddin Bagas Godang, Alamat: Kelurahan Janji Mauli Muaratais, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. 6). Pondok Pesantren Syekh Ahmad Basyir, Alamat: Parsariran, Kelurahan Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. 7). Pondok Pesantren Abu Bakar Siddik Sapirok. Alamat: Kelurahan Parau Sorat Sapirok, Kecamatan Sapirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. 8). Pondok Pesantren Darul Mursyidi, Alamat: Kelurahan Sialogo, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. 9). Pondok Pesantren Ittihadul Mukhlisin, Alamat: Jl. Mandailing Km 11, Kelurahan Huta Tonga, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. 10). Pondok Pesantren Darusshoufiyah An-Nakasa, Alamat: Jambur Batu, Kecamatan Sapirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. 11). Pondok Pesantren Al-Yusufiyah, Alamat: Jl. Mandailing Km 12, Huta Holbung, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menggali nilai-nilai budaya yang luhur dalam konsep kekerabatan *dalihan na tolu*, sebuah kearifan lokal yang mewarnai

pembangunan, etos aparaturn pemerintahan dan menjadi sikap mental kaum millennial. Sebuah konsep ‘memadukan’ (integrasi) agama dan budaya ‘*hombar do adat dohot agama*’ (sebuah integrasi ilahiyah/transendental dan internalisasi kultural). Ungkapan misalnya ‘*salaklak sasikkoru, sasanggar saria-ria, saanak hita saboru suman marsada ina*’. Spirit budaya ini, tak ada yang bertentangan, malah saling menguatkan.

Pendidikan juga modal kebangkitan Tapsel disamping faktor budaya (mentalitas) yang memiliki kebiasaan duduk-duduk di *lopo-lopo* (kedai kopi) (mentalitas/kultur tradisional) harus bergeser ke semangat baru untuk memanfaatkan laham untuk ‘*markobun*’, ‘*marsaba*’ (petani kampung). Mencontoh orang Cina dan Jepang bagaimana orang Cina dididik dengan semangat hidup di bidang ekonomi, menghormati orang tua, mewariskan generasi yang maju. Berbagai etos pembangunan lahir seperti etika Konghucu, etika Tokugawa, etika Protestan, restorasi Meiji, India dengan semangat Mahatma Gandhi, Turki dengan semangat Erdogan. Raja Inal putra Sipirok dengan gerakan Martabanya memacu gerakan kepedulian dan kemajuan putra daerah di perantaraan ikut memajukan Tapsel. Begitu juga Malaysia pasca dijajah Inggris, Mahathir Mohammad mendeklarasikan kebangkitan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), termasuk mendorong anak-anak Melayu bangkit dan menyekolahkan ke Eropa. Soekarno menggagas ‘berdikari’ di bidang ekonomi, ‘berdaulat’ di bidang politik dan ‘berkepribadian’ di bidang budaya.

Trisakti Soekarno mendorong kebangkitan kaum pribumi termasuk menyekolahkan orang-orang pintar seperti Habibie ke

Eropa. Negara Indonesia memiliki kekuatan karena didalamnya terdapat masyarakat yang bersuku-suku hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikulturalisme dan *cross cultural and religion* (lintas budaya dan agama) membangun dengan spirit agama dan budaya lokal. Menurut M. Lubis pengurus Baznas Sumut dalam diskusi melalui WA pada Oktober 2021 mengatakan:

“Salah satu langkah membangun ekonomi umat dalam memutus rantai rentenir bagi petani kita adalah dengan memodali petani dengan “dana zakat” sebagaimana yang telah dilakukan oleh Baznas Sumut terhadap petani di Desa Sumber Tani Kab. Batubara tiga tahun terakhir ini. Ada sebanyak 20 hektar lahan petani terbebas dari rentenir, hasilnya sangat menggembirakan seperti hasil panennya meningkat, bebas dari hama dan mereka pun berzakat yang semula tidak pernah berzakat. Inilah keberkahan zakat produktif yang dikelola Baznas Sumut. Pengumpulannya, saatnya sebagian dananya untuk modal usaha produktif agar lambat laun umat bisa terhindar dari riba rentenir yang korbannya sebagian besar umat Islam”.

Insyah Allah petani Tapsel menggerakkan spirit agama dan etos budaya Angkola dalam kehidupan petani. Bertani tanpa riba meminta Bupati Tapsel agar gerakan ZIS ini bisa dimaksimalkan terutama pengusaha-pengusaha Muslim yang memiliki lahan luas tergerak membantu petani bagi kemajuan pembangunan. Peningkatan ekonomi harus diimbangi dengan kompetisi dan penyediaan lahan baru agar dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Menurut penjelasan melalui media *online* FB dikatakan oleh I. Azhari bahwa:

“Bagaimana sedihnya orang Papua, sangat menderita, kelaparan, kemiskinan, kebodohan. Mereka minta merdeka kita mengatakan NKRI harga mati, kita bukan

menjelekkkan orang Papua sementara hasil tambang mereka nomor 2 di dunia dan uranuim nomor 1, semua diambil oleh pusat. Dan APBN kita 54 persen untuk Pulau Jawa selebihnya bagi-bagi untuk luar Jawa. Kejam begitu juga Tapsel hasil buminya untuk pusat. Nggak adil sebenarnya, tapi kita memuji Jawa ini dan menganggap mereka pemimpin terbaik. Kapan maju luar Jawa apalagi pindah ibukota berapa trilyun bangun itu berarti luar Jawa biayanya.”

Tu Sude Kahanggi, Mora, Anak Boru di Banua Nasonang Napa-Napa ni Lubuk Raya, sulitnya permodalan petani kerja keras dan belajar keras seperti Jepang (Restorasi Meiji), Malaysia maju Lewat pendidikan Putra/i Melayu, munculnya kesadaran kelas etmi bersaing dengan Etnis Cina & India. Supremasi Melayu di Malaysia. Tapsel maju lewat restorasi agama dan budaya Angkola. Kapan kebangkitan masyarakat lokal. Bagaimana ‘membangkitkan Pancasila’ di Bumi *Dalihan Na Tol*, bagaimana menghadapi kekuatan kaum kapital pemilik tambang, perkebunan sawit dan bagaimana mencerdaskan petani masyarakat adat Tapsel? Bagaimana mencegah korupsi di bidang pertanian? Mungkinkah ada kesadaran kaum petani marga harahap? Marginalisasi kaum petani Tapsel akan terpinggirkan jika tidak muncul perlawanan budaya lewat mentalitas baru dan menolak budaya miskin ‘*ugadis pe amang, inang kobun, saba i asal ma lalu sikolah mi, tradisi ‘manggadisi,’ ‘sadia pe tabayar inang asal ma pegawai hamu, masuk polisi, tentara’.* ‘*Marsaba do, mangguris, maragat’ kobun pe saotik do, ‘harani parange ni aya mu targadis kobun i,’ ‘saba pe manyewa, biama hamu sikolah inang, nakkon be marcita-cita hamu, sugari cepat ma marbagas.* Adakah terjadi eksploitasi sumber daya alam. Identitas lokal bisa jadi pendorong pembangunan.

Semua pelaku UMKM masuk menuju bisnis online. Kehadiran E Katalog & E Payment kita dorong nanti Pemkab Tapsel terkait pembinaan UMKM pelaku usaha di Dusun, Lingkungan, Desa dan Kecamatan se Tapsel. Mereka boleh darimana saja asal memiliki usaha di wilayah Tapsel. Kompetisi UMKM berbasis teknologi sudah tak bisa dielakkan. Produk-produk lokal harus dibenahi, bisa lewat koperasi. Peran kelompok tani sangat besar dalam membina petani yang hasil-hasil pertanian mereka bisa diolah sendiri seperti Pabrik salak di Angkola Barat, Kopi di Sipirok. Hasil produk rumah tangga yang kita jual lewat aplikasi bisa lewat *vendor* membantu produk usaha rumah tangga, yang mungkin belum ada izin, sertifikat halal, dll, akan ada bimtek atau *coaching* klinik UMKM tentang aplikasi. Sebuah upaya pembinaan yang berkesinambungan aplikasi katalog UMKM Tapsel. Jualan UMKM akan laku jika sudah siap dijual, harga bersaing, kualitas terjamin, sebuah standar produk yang bermutu yang ditawarkan penyedia.

Semua yang terlibat bisa lewat pemerintahan dan pengusaha UMKM, mahasiswa, kampus wilayah Tapsel terlibat membina UMKM, bisa perseorangan, tak ada lagi monopoli kedepan, menghindari korupsi dan penyelewengan bantuan, era tanpa tatap muka, semua bisa melihat secara terbuka. Petani akan mengubah cara bertani yang harus bisa memperbaiki pertaniannya, apakah pupuk, bibit termasuk pemanfaatan lahan kosong. Distribusi ekonomi di desa akan meningkat, para kepala desa di era covid, akan berpikir untuk menyelewengkan anggaran, mereka akan bermusyawarah di Dusun bersama tokoh agama, adat dan pemuda desa membuka usaha di desanya tak perlu belanja jauh.

Semua produk lokal kita harus unggul siap tayang di media *online*, jual produk yang siap bersaing, tak ada lagi bisnis negosiasi, dapur UMKM di rumah tangga bisa dilihat, nanti akan di *upload*, dibina oleh Pemerintah, kalau sdh ada sistem yg dibuat Pemkab seperti di Medan, lewat LPSE, (Lembaga Penyedia Sistem Elektronik) untuk makanan dan minuman, sebuah aplikasi katalog untuk memajukan UMKM. Akan ada pelaku usaha muda kaum millennial yang lahir dari desa, jangan lagi tertutup antar desa dan kecamatan, bisnis yang memberi ruang terbuka bagi semua anak desa. Iklim usaha UMKM bisa bersaing, pelaku usaha bergiat, tanaman hasil petani semakin kompetitif bisa masuk pasar terbuka, nanti UMKM Tapsel akan terseleksi.

Tak boleh lagi kelompok tani bermain-main, sudah punya kios-kios usaha di setiap desa agar petani bisa mendapatkan kebutuhan pertanian yang harganya murah apalagi didukung oleh Bumdes yang kuat. Sederhananya ingin memberhasilkan pelaku UMKM terutama bidang pertanian dan peternakan dll. Mahasiswa ikut membantu kesulitan keluarga di desa menuju semangat baru kaum millennial berbisnis *online*.

Untuk mendorong UMKM ini maju sesuai dengan pendapat S. Siregar bahwa:

“Kompetisi UMKM berbasis teknologi sdh tak bisa dielakkan. Produk-produk lokal harus bisa kita benahi, bisa lewat koperasi. Peran kelompok tani sangat besar dalam membina petani yang hasil-hasil pertanian kita bisa diolah sendiri seperti Pabrik salak di Angkola Barat, Kopi di Sipirok. Hasil produk rumah tangga yang kita jual lewat aplikasi. Semua yang terlibat bisa lewat pemerintahan dan pengusaha, mahasiswa, kampus wilayah Tapsel terlibat membina UMKM, bisa perseorangan, tak ada lagi monopoli

kedepan, menghindari korupsi dan penyelewengan bantuan, era tanpa tatap muka, semua bisa melihat secara terbuka. Petani akan mengubah cara bertani yang harus bisa memperbaiki pertaniannya, kita beri solusi, apakah pupuk, bibit termasuk pemanfaatan lahan kosong. Semua produk lokal kita harus unggul siap tayang di media online, jual produk yang siap bersaing, tak ada lagi bisnis negosiasi, dapur UMKM di rumah tangga bisa dilihat, nanti akan di upload, dibina oleh Pemerintah, kalau sdh ada sistem yg dibuat Pemkab seperti di Medan, lewat LPSE, Lembaga Penyedia Sistem Elektronik untuk makanan dan minuman, sebuah aplikasi katalog untuk memajukan UMKM”.

Sedangkan untuk menguatkan dusun, maka perlu mempelajari prosedur anggaran dana dusun harus lewat musyawarah dusun, kemudian dimasukkan dalam musyawarah desa, setelah itu dituangkan dalam RPJMDes untuk dicari mana yang prioritas disusun ke RPKDes, lalu rencana anggaran pembiayaan (RAP) yang akan dituangkan dalam APBDdes mengacu pada permendagri no. 5 tahun 2015 skala prioritas. Kepala dusun harus mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, adat dan elemen masyarakat lainnya terkait dengan benah dusun, musyawarah dusun (musdus). Kepada desa harus tegas sesuai aturan jangan ada intervensi & kepentingan, jangan program fiktif. Seluruh aparatur pemerintahan desa/ASN harus hadir jam 08.00 pagi siap melayani masyarakat untuk pelayanan publik, kebersamaan dengan masyarakat harus terwujud.

Program bumdes dimulai dari arahan kepala desa dengan membentuk kepengurusan bumdes lewat musyawarah desa bersama tokoh masyarakat, BPD dan LPM untuk merekrut kepengurusan bumdes. Kepala desa harus berani memberi inisiatif

dan gagasan progresif dengan penyertaan modal dengan nilai usaha yang memungkinkan bisa 100 juta bisa lebih apabila ada musyawarah desa, harus berani dengan pengawasan ketat dan memilih pengurus yang mempunyai SDM sesuai dengan bidangnya. Sudah ada contoh desa pongkok di Jawa yang berhasil dengan keuntungan 13 milyar satu tahun, dimulai dari gaji direktur sejak ada bumdes tahun 2009 dengan gaji 100 ribu sekarang sudah menerima gaji 35 juta dan kepala desa mendapatkan 25 juta. Bumdes harus diawali dengan jiwa gotong royong. Kebersamaan pemerintahan desa dengan masyarakat adat, tokoh agama, pemuda.

Dana penyertaan modal disimpan di bank atas nama pengurus bumdes, harus ada akte notaris ke bank untuk pertanggungjawaban pengurus penyeteroran dan pengambilan dana. Silakan cari usaha di desa yang produktif, bisa memungkinkan keuntungan yang bisa dikembangkan, apa yang mencuat, lihat potensi dan harus ada anak perusahaan kedepan. Inilah yang menjadikan desa mandiri sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Jika bumdes sudah berhasil anak di desa yang kuliah bisa dibantu, guru ngaji diberi uang kesejahteraan, guru paud, alat peraga, peningkatan uang kesejahteraan petugas posyandu, yang tidak mampu dibantu bpjsnya & pendidikan dan kesehatan di desa.

Bumdes bisa menyalurkan ke masyarakat yang ada usaha atau tidak ada usaha bentuk kelompok tani agar dapat pupuk subsidi dan bantuan lainnya untuk pertanian, lapangan kerja, pabrik salak di desa parsalakan, pembibitan, penyuluhan narkoba (membuat spanduk/plank), pelatihan usaha/*life skill* sesuai usaha masing-masing seperti jahit menjahit, pangkas, salon,

yang punya lahan bisa kolam ikan, bantu petani sawah dengan penyediaan bibit, pupuk, memasak kue, di desa, perpustakaan desa, parsalakan masih bisa mengelola air bersih (air minum) dll, untuk *income* rumah tangga demi kesejahteraan masyarakat di desa lebih cepat meningkat.

Warga Tapsel perlu belajar dengan Petani Pak Ginting, wawancara sekitar bulan Agustus 2021 :

“Ada spirit budaya orang Karo dalam mengelola pertanian sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari secara turun-temurun yaitu: “Petani Deli Serdang yang sehari-hari mulai pagi sudah menjaga tanaman jagung, ubi dan jambu, pekerja keras, bertani di lahan sendiri. Harus belajar dari etos kerja petani bersuku Karo, tanahnya luas ribuan hektare, tak mau menjual tanah karena budaya orang tua dan adat budaya mereka sangat menghargai tanah sebagai sumber kehidupan, puluhan tahun dijaga, mereka tak mau anak cucunya susah dan tak memperoleh warisan, meski mereka harus berjuang banting tulang untuk keberhasilan anak-anaknya di masa yang akan datang. Memiliki budaya menghargai orang tua tak mau mereka orangtuanya ditinggalkan ke rumah Jompo, bahkan kuburannya pun di tanah mereka agar tidak dijual kecuali nilai harga dan kesepakatan keluarga bagi warisan yang bisa diganti lagi pindah membeli tanah yang produktif. Etos kerja yang luar biasa petani Karo, tak lelah di panas hari, tak mudah menyerah, saling mendukung antar petani sekitar, mudah bergaul, saling membantu, ikut kelompok tani, sampai penyuluh pun membantu petaninya di Deli Serdang, mereka yang mempraktekkan budaya kami Angkola Tapsel *‘Marudan Marlasniari’*, ternyata anaknya hebat sukses petaninya merebut pendidikan sampai perguruan tinggi, hidup berkah tanpa korupsi”.

Menurut M. Siregar dalam diskusi di UMKM Martabe pada bulan Desember 2021 menyebutkan bahwa:

“Untuk menguatkan kelompok tani dengan keterlibatan mahasiswa yang kuliah dan dapat beasiswa dari Pemkab bisa membantu ikut jadi anggota di dusunnya, mereka bisa buat tugas PKL, bisa KKN nanti menulis skripsi bidang pertanian atau desa. Mereka ini cikal bakal wirausaha UMKM kita, kuliah sambil usaha pun bisa petani milenial. Pertanian dan peternakan maju bersama kelompok tani, bagi kelompok tani yang tidak aktif kita perbaiki, termasuk pengurus dan anggota bersama petugas PPL, kita akte notariskan. Dorong mahasiswa Tapsel apalagi dari fakultas pertanian kerjasama dengan petugas PPL di kecamatan, untuk ikut memajukan desa dan dusun di Tapsel”.

Masyarakat bangkit ekonominya, tugas perantau bukan membantu saudaranya tapi berterima kasih kepada mereka sebab atas dukungan merekalah kita berhasil, jangan lupakan saudara-saudaramu berikan jalan kebahagiaan mereka lewat dukungan moral dan finansial jangan biarkan mereka jadi buruh dan miskin, tertinggal. Ayo bersatu untuk Tapsel maju. Dampak pemerintahan desa belum mampu mendongkrak ekonomi desa lewat anggaran yang begitu besar, ada persoalan baru antara aparat desa dengan petani, persaingan merebut kepala desa akibat anggaran. Program Bumdes belum tercapai, jalan-jalan yang dibangun sudah mulai rusak, PMD daerah perlu dievaluasi dan banyaknya kepala desa diperiksa aparat kepolisian dan kejaksaan. Pemerintah pusat, propinsi, pemkab Tapsel dan Kepala Desa membangun dari desa, kapan bisa terwujud pemerataan pembangunan di desa.

RUU desa harus mencerminkan keadilan dan mensejahterakan rakyat di desa. Para ahli harus menyerap aspirasi dan memiliki data akurat atas persoalan desa. Draft

RUU ini kita dukung dengan berbagai catatan krusial di desa, para kepala daerah dan kepala desa tidak 'kongkalikong'. Kepala desa dan otonomi pemerintahan desa, sering hadir 'intervensi' atasan Camat dan Bupati, para kepdes jangan menjadi alat politik kekuasaan baik eksekutif dan legislatif. Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap kawasan Danau Sias sebagai destinasi wisata selama ini harus kita jejak tata kelola baru potensi alam yang sangat indah, tentu pengelolaan alam harus berbasis kearifan lokal (*dalihan na tolu*). Adanya dampak industrialisasi di bidang pertanian telah menambah kerusakan lingkungan termasuk penanaman sawit di areal sekitar danau dan kepemilikan lahan atas tanah sehingga program reboisasi dapat berjalan.

Konsep perhutanan, pertanahan, kawasan strategis agar masyarakat yang datang dan kepala desa tidak menjual tanah-tanah negara. Akan dipantau dan direkomendasikan kepada Bapak Kapolda Sumut turun evaluasi konflik pertanahan di Tapsel. Semoga pertanian atau budidaya ikan tawar, tambak ikan mas, perkemahan, kuliner, syuting film dan potensi lainnya di Danau Siais antara masyarakat dengan pemerintah dapat bermanfaat untuk mempercepat kesejahteraan. Sebuah kesadaran kelompok sosial di *bumi dalihan na tolu* memberi solusi integrative atau kolaboratif sesuai dengan akar historis Tapsel dan masyarakat Adat Tapsel siap mendukung Bapak Kapolres Tapsel 'perang' terhadap mafia tanah di desa. Kepada pemuka agama dan tokoh adat agar membentuk FKUB, FORKALA, LEMBAGA ADAT bersama Kepala desa sebagai motor penggerak desa menuju DESA MANDIRI di Tapanuli Selatan.

Tapanuli Selatan sebagai daerah agraris, mayoritas penduduk adalah petani, tentu harus terus berbenah ditengah perubahan zaman akibat kemajuan teknologi, sejak zaman prasejarah berbagai suku bangsa di nusantara menghormati roh alam dan kekuatan bumi yang hidup zaman ber zaman. Jejak sejarah menelusuri/melanjutkan warisan yang ada di tanah (*tano hatubuan*), telah terjadi pergeseran arus globalisasi/modernisasi/industrialisasi dari negara-negara maju kepada negara dunia ketiga Indonesia sampai ke Tapsel sejak tahun 1980 an yang mengubah arti dan manfaat tanah dengan sistem pertanian tradisional ke pertanian modern, terutama ancaman masuknya pemodal besar (perusahaan pemilik kapital) mengambil lahan masyarakat adat.

Terjadi pergeseran pola hidup dan perilaku manusia dalam memanfaatkan alam (tanah). Dalam beberapa kasus tanah ulayat yang dalam istilah Batak Angkola '*ulos na sora ni buruk'* (*boru tulang*) sudah ditinggalkan/bahkan kurang diakui dan saat ini sering menghadapi konflik dengan perusahaan. Butuh energi baru pemberdayaan masyarakat adat di Tapsel yang bisa beradaptasi dengan birokrasi pemerintahan dan perusahaan yang ada lewat pemanfaatan program CSR (*corporate social responsibility*).

Terkait kehidupan masyarakat adat yang sehari-hari adalah petani yang sejak dulu padi melimpah berkah ibu pertiwi: "*Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu pertiwi sedang susah, merintih dan berdoa*". Masyarakat Tapsel untuk lebih giat bercocok tanam

berbagai budidaya dengan pemanfaatan lahan/pekarangan yang ada dengan menanam sayur, buah-buahan untuk menutupi kebutuhan sendiri dan keluarga bahkan mendorong anak muda, sarjana untuk menggeluti pertanian berwirausaha (*enterprenuer*) yang aktif di desa dan menggerakkan petani, sarjana penggerak desa, melibatkan pemuda (*naposo/nauli bulung pagar ni huta*).

Berbagai program pemerintah dan pengawasan anggaran oleh legislatif Tapsel, arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian swadembada pangan berbasis potensi wilayah dan upaya khusus peningkatan produksi komoditas strategis serta mendukung program nasional, apakah kemajuan Tapsel dalam mencapai target produksi padi, jagung kedelai (*pajale*) akan terus meningkat? Melalui Dinas Pertanian, tentu dalam RPJM 2021 ini harus kita dorong keterlibatan masyarakat adat, sebab masih banyak kendala dan persoalan yang harus ditata kelola terutama penguatan organisasi kelompok tani di desa (*Gapoktan*), pola penyaluran pupuk subsidi, penggunaan kompos, kunjungan penyuluh (*PPL*) tingkat desa dan kecamatan dalam menggiatkan petani, cara mendapatkan permodalan, manajemen usaha dll, termasuk masih ada kelompok tani ‘*sesaat/kop surat, stempel*’, hadir saat ada bantuan, tak jelas pengurus dan kantor, bahkan bukan petani dan tidak tinggal di desa dan tak peduli dengan kelompok tani dan masyarakat adat.

Terjadinya revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin dan cara baru dalam bidang pertanian seperti inovasi teknologi sensor dan otomasi terutama tanaman holtikultura, kedepan kelompok tani bidang holtikultura ini tumbuh dan bisa

bergerak agar pembentukan kelompok tani ini ikut mendukung ketahanan pangan, lahan-lahan kosong, jangan dikonversi atau dibiarkan begitu saja ‘*tanah tak bertuan*’.

Mari dikelola lewat program pemanfaatan hutan kemasyarakatan terhadap tanah negara. Petani harus dilatih dalam penggunaan layanan informasi berbasis *mobile* untuk informasi pertanian yang cepat, pertanian berbasis teknologi harus dioptimalkan agar database petani Tapsel terukur. Untuk itu, perantau harus ikut serta memberi pencerahan saudara-saudara kita di tiga kecamatan yaitu Angkola Barat, Selatan dan Sangkunur dan juga kecamatan lainnya termasuk membentuk kelompok tani, usaha sentra pertanian (Toko Pangan Kita), menyediakan pupuk bagi petani (UD. Pupuk) diperkuat yang selama ini kurang diperhatikan dan belum adanya organisasi yang memberi pelatihan & akses permodalan.

Terbukanya akses jalan oleh pemerintah untuk mempermudah jalur pengangkutan hasil-hasil pertanian, dibangunnya irigasi sentra pertanian akan tetapi faktor budaya mengubah sistem pertanian tak produktif, peralihan pekerjaan/meninggalkan lahan. Munculnya ‘petani penggarap’ yang masuk ke Tapsel menjadi tantangan bagi masa depan petani Tapsel. Harus dibangkitkan semangat baru pemuda desa yang peduli tanah untuk dikelola secara bersama-sama untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan. Semangat partisipasi masyarakat semakin meningkat dan pemerintah hadir membela rakyatnya. Mentalitas petani Tapsel dengan kerja keras, belajar keras, jauh dari rentenir (memperkuat ideologi Islam & budaya Angkola) sebagai sistem sosial petani, petaninya sholat, bersedekah

ditambah modal sosial berkelompok yang kuat. Identitas etnik akan mempunyai nilai-nilai bidang ekonomi. Insya Allah pertanian akan menjadi ujung tombak dan katup pengaman ekonomi. Tapsel Petani Bangkit.

APBD Tapsel, APB Desa, APBD SU, APBN serta CSR (tanggung jawab sosial) perusahaan ditambah swadaya para pengusaha putra daerah serta pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah melalui BAZNAS daerah Tapsel akan ikut membantu percepatan ekonomi umat (umat Islam Senang & Mengenyangkan) lewat program Dewan Masjid Indonesia. Tapsel sudah menjadi daerah yang terintegrasi, lintas kecamatan dan kabupaten dengan pelabuhan internasional Sambas, Sibolga dan lapangan terbang Pinang Sori Tapteng menuju daerah ekonomi eksklusif ekspor hasil-hasil pertanian. Apakah hasil bumi yang kita unggul dan mampu bersaing ke pasar internasional dibidang pertanian dan mampu swasembada?

Hampir 80 persen masyarakatnya adalah petani, pertanian dan perkebunan menjadi andalan, kenapa kita tak belajar dengan Thailand dan Malaysia. Majunya pertanian karena mereka punya Bank khusus petani membiayai pertanian. Pendidikan dan kerja keras orang tua akan sejalan dengan motto hidup orang tua di Tapsel bukan gaya (*style*) tapi ciri khas dan perilaku hidup dan merupakan model juang yang harus ditanamkan. Kenapa semakin banyak orang tak sekolah di desa-desa di Tapsel, benarkah berhenti karena ketiadaan biaya atau orang tua tak mampu. Bagaimana program percontohan pertanian dan perkebunan berkelanjutan, dimana pusat pembibitan yang bisa membuka lapangan kerja. Sedangkan menurut diskusi

bulan Januari 2022 dengan S. Pohan warga desa Sianggungan/Sipenggeng mengatakan:

“Sudah banyak yang dilakukan seperti pembangunan SMK Pertambangan, sekolah gratis, bantuan dokter spesialis dan gratis sekolah SD, SMP, SMA dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sampai S1. Kemudian berobat gratis di Puskesmas. Ada juga pembangunan irigasi sungai Batang Toru untuk pertanian, juga bantuan alat-alat pertanian traktor dll. Membuka kilang padi. Untuk bidang keagamaan juga membantu sarana ibadah, bantuan acara hari besar keagamaan dll. Kita ingin ada potensi yang bermutu berdampak panjang, punya industri UMKM hasil pertanian di desa, SDM keagamaan pesantren, rumah Tahfiz Quran gratis dll. Bagaimana sekolah untuk penguatan SDM? misalnya SMK gratis ada di Angkola Sangkumur, Angkola Barat, Angkola Selatan, S1 bukan hanya yg berprestasi, semua gratis, kalau bisa S2, S3? Kalau perlu kita jadikan UGM percontohan mahasiswa gratis, buka prodi baru bidang pertambangan, perkebunan, peternakan, S2 pertanian, teknik informatika dll, ini persoalan SDM harus jelas untuk masa depan. Yang menjadi persoalan adalah apa manfaat menara yang dibangun Pemkab Tapsel ini yang perlu dipertanyakan”.

Bagaimana kemitraan dengan perusahaan, perguruan tinggi, sarjana pertanian, penyuluh pertanian, kios petani dll. Bagaimana menambah PAD dari sektor pariwisata? punya Danau Siais, Danau Marsabut dll dengan motto Angkola ikon baru daerah yang peduli lingkungan, tingkat pendapatan masyarakat bisa tertinggi di Indonesia, indeks hidup bahagia bertambah, fasilitas kesehatan, pendidikan terbaik di Indonesia, SDA dikelola untuk kemakmuran rakyat mungkinkah? Indeks kerukunan hidup umat beragama meningkat. Akan ada putra/i Tapsel yang ikut memikirkan masa depan desa mandiri, memiliki program

Bumdes untuk UMKM pertanian dan perkebunan. Pembangunan jauh dari faham mereduksi nilai-nilai *local wisdom* (kearifan lokal), akan terkontaminasi anak muda desa atau tak berdaya sama sekali atas proyek raksasa pertambangan yang dimiliki Tapsel.

Program penguatan komunitas, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan dll. Akan sulit tapi kita harus memperjuangkan sebuah keniscayaan akan masa depan penduduk asli atau lokal yang mendiami dari nenek moyang kita dulu. Semboyan ini *'Marudan Marlasniari' perjuangan dalam mendidik anak di Tapsel untuk berhasil. 'Namanjalaki hangoluan on bope na maridi hodok, hutaon doi inang, asal malalu sikola mi'. 'Marudan marlasniari hutaon doi amang manjalaki parabitonmi, bope namarutang ubaen doi amang asal malalu sikola mi'. Simbol perjuangan 'Marudan Marlasniari' (Menempuh lebatnya hujan dan menerobos terik mentari) harus dijiwai dan diperjuangkan.*

Tentu arah RPJMD Tapsel harus kita kritisi pada skala prioritas apa untuk percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat, jangan lagi intervensi pemerintah atas tanah-tanah negara dan pengawasan lambat (perlu kerjasama dengan *Internasional Conservation*) karena terus 'digarap' atas nama masyarakat, siapa masyarakatnya? Ini perlu evaluasi masyarakat adat atas kehadiran 'pendatang' yang massif bisa mengganggu harmonitas, mengancam akibat pertambahan penduduk. baru yang akan 'menguasai' tanah negara dan 'tanah adat'.

Oleh karena itu persatuan sangat penting dikedepankan menjaga konflik dan sengketa tanah masyarakat untuk mencari

solusi secara arif. Kekuatan pada konsolidasi masyarakat adat terbuka, kekuatan atas hak atas tanah di Tapsel berdasarkan perjanjian dulu dengan Belanda (konsesi) jelas sudah ada sesuai '*Peta Belanda Angkola Complex*' ? Saatnya berbagai persoalan tanah dan penggunaan secara produktif seperti program ketahanan Pangan. Harus belajar mengusahai lahan petani, bagaimana tata kelola usaha tani yang baik, bercocok tanam pelawija yang dibina Dinas Pertanian, pupuk yang tersedia, pembibitan tentu harus kita ajak pengusaha membantu seperti kontribusi pada permodalan, pembukaan jalan, penyediaan alat berat, dll. Bantuan kelompok tani harus tepat sasaran diawasi bersama. Diskusi terus kita kedepankan untuk menguatkan secara hukum.

Menurut pendapat N. Harahap, wawancara sekitar bulan Januari 2022 mengatakan bahwa:

“Masyarakat Adat Batak Angkola, bangga NKRI. Insya Allah raja-raja adat bersatu. Kita lihat siapakah penerima beasiswa sesuai KTP kah atau surat keterangan desa, melihat data-data anak kita di desa sampai lingkungan atau lorong. Ada berapa mereka sekolah atau kuliah? Menurut saya masih belum semua, masih ada yang belum mengetahui. Sosialisasi kurang, informasi ini seharusnya diketahui pada kepala lingkungan kita, kami banyak biaya sendiri, apalagi bukan dari kecamatan yang ada perusahaan, harapan kami melalui Dinas Pendidikan dapat meringankan anak-anak kami nantinya”

Kesadaran masyarakat juga akan manfaat kelompok tani masih kurang akibat pengelolaan yang tertutup hanya untuk mengejar anggaran dan bantuan. Kapan pertanian bisa maju di Tapsel? Meski ada program kerjasama dengan BNI untuk

database tapi mentalitas bertani juga perlu terus dikuatkan dan data petani dan pemilik lahan. Sawah dan usaha lainnya seperti palawija, hasil-hasil masyarakat seperti kacang, cabe, kunyit, lengkuas, padi darat begitu juga sawit, karet, pinang, kemiri, salak, gula aren dll sebagai sumber penghidupan mestinya dikelola dengan cara modern dan menjaga kearifan lokal. Pola pikir & etos kerja harus sejalan, generasi muda desa, NNB, Naposo/Nauli Bulung sebagai '*Pagar Ni Huta*' harus didorong punya lahan jangan hanya mereka yang 'kuat' secara ekonomi dan politik dan mengejar investor luar masuk menguasai lahan atas nama negara.

Bagaimana konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang sudah digerakkan Pemkab Tapsel perlu dievaluasi akibat lahan/tanah terlantar belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih terdapat 'klaim' atas tanah-tanah adat ek. Kekuriaan dan tanah negara yang perlu diberikan ke masyarakat oleh Dinas Kehutanan yang dikelola secara bersama lewat kelompok tani hutan. Menuju penataan hutan dan legalitas masyarakat adat atas tanah ulayat harus dikaji secara mendalam agar manfaat lahan dirasakan masyarakat untuk bercocok tanam bukan ditelantarkan apalagi diberikan pelepasan hak atas tanah yang dianggap tanah adat.

Masyarakat adat harus memperkuat konsep pertanian dan merujuk pada dasar/aturan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. UU Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Agraria. PP Nomor 20/2021 Tentang Penertipan Kawasan dan Tanah Terlantar (Peraturan terbaru sekaligus mencabut peraturan-peraturan terdahulu). Saatnya masyarakat adat bersatu, mengawal dan mengelola,

memanfaatkan, mengusahai agar ekonomi petani meningkat di Tapanuli Selatan. Bersatu kita kuat.!

Jauh sebelum merdeka kita sudah mengakui daerah Tapsel terdiri dari kerajaan marga termasuk daerah Keresidenan. Semua eks. Kekuriaan punya dokumennya. (Perlu ada penulisan sejarah marga agar dipahami sebagai marga awal di Tapsel). Lihat misalnya eks. Kekuriaan Losung Batu, Hutaimbaru, Marancar, Sigalangan, Sipirok dll. *Sapai ise do perbagas godang i, aha marga na. Sapai surat-surat ni haleni tentang peta ulayat, 'idia tano ulayat i, ligi peta ni haleni sian Belanda najolo aso kuat alas hak tano ni adat i'...*Tapsel itu terdiri dari *marga aha do Angkola i*. Persoalan ulayat perlu diperkuat. Berbeda dengan Kesultanan Deli, dan Yogyakarta.

Sudah ada masyarakat adat eks Kekuriaan di Tapsel menjadi anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) seperti eks Kekuriaan Marancar untuk memperkuat eksistensi sebagai masyarakat adat. “Kriteria masyarakat hukum adat dalam putusan MK adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah.” “Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia”, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Penetapan Kawasan

Hutan Adat, permohonan ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. “Pengujian kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. “Pertimbangan hukumnya, Pertimbangan MK antara lain, harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat”. “Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara,”

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat. Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Beberapa produk hukum terbit sebagai implementasi dari putusan MK tersebut diantaranya Peraturan Menteri (PerMen) Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas PerMen Kehutanan No. P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat, serta PerMen Agraria dan Tata Ruang (ATR) No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Pemerataan akses pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi negara harus mewujudkan pemerataan manfaat sumberdaya hutan berbasis partisipasi.

Kembalikan '*ruh' tondi* perjuangan atas eksistensi tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di Tapsel menjaga '*ulos nasora ni buruk*', memberikan peran masyarakat adat pada '*negosiasi ekonomi*' untuk kesejahteraan di NKRI yang hari ini kita hampir kehilangan kekuatan atas kepemilikan secara sah sejak merdeka. Jauh sebelum kemerdekaan di NKRI ini para "Raja-Raja Adat" kita sudah ada di Luat atau Kuria masing-masing daerah. Masih ada harapan yang memberi kesempatan kita maju lewat pertanian dan perkebunan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan BPN. Kita ajak aparat desa bersatu bersama masyarakat adat bicara pertanian maju di Tapsel. Sejak Orde Baru zaman Soeharto peran ini terus melemah apalagi model pembangunan negara sangat regresif kepada eksploitasi sumber daya alam. Negara (pemerintah pusat sampai daerah termasuk Pemerintahan Desa dengan lahirnya UU Desa sangat kuat (*strong*) terhadap masyarakat.

Kerajaan masih ada dan diakui negara, tapi Tapsel harus diperkuat lagi kegiatan '*bagas godang*', semua pejabat mengakui sejak dulu sampai sekarang. Kenapa tak kuat? Mungkin kita dilemahkan, akibat tak paham menjaga tanah-tanah adat kita.

Aktifitas *bagas godang* sudah berkurang. Ini terkait dengan banyak faktor sejak Orde Baru apalagi keluar UU Desa ditambah era Pilkada langsung termasuk '*markahanggi*' keturunan Raja Adat belum saling menguatkan. Menurut diskusi A. Siregar agar bersatu masyarakat adat di Tapsel perlu:

"Ulang be Popparan ni Rajai bahat marsalisih", ada yang teken jual atas nama adat ke semua perusahaan yang ada di Tapsel. Kapan kita kuat? Jadi hari ini harus kita benahi, beri pencerahan sebagai suku Batak Angkola. Jangan lagi pemerintahan ikut melemahkan, apalagi ikut '*memainkan*' di Tapsel, duduk di pemerintahan, legislatif hanya memanfaatkan setiap even politik praktis. Ada kepentingan politik '*penguasa*' atau kita sendiri yang ikut melemahkan mestinya kita melihat sejarah. Kedepan harus diperbaiki asal kita bersatu. Mari masing-masing eks Kekuriaan menguarkan dokumen dan data adatnya."

Sedangkan menurut H. Harahap dari asal Tapsel memberikan tanggapan melalui media sosial *Facebook* (FB) bulan Januari 2022 agar pemerintahan di Tapsel sampai ke pemerintahan desa untuk ikut menguatkan bersama atas tanah-tanah adat (*ulayat*) dimana peran masyarakat adat sekarang ini tugas kedepan adalah menguatkan ekomomi masyarakat di desa untuk kita perbaiki bersama : "*Istilah marsitijur tu ginjang, inda ida mata ida roha nia*, perlu bicara *holding company*, rakyat susah ekonomi, distribusi ekonomi sedikit, jiwa wirausaha kita bangkitkan, *akkon au, on di au, ulang urus sabakku, kobunku nia, ulayat nai nia* padahal yang punya ratusan dan ribuan hektare tak diprotesnya. Mari kita lakukan kontrol sosial atas kebijakan yang tak berpihak ke ekonomi masyarakat adat khususnya, warga desa pada umumnya".

Organisasi adat harus berbadan hukum sampai izin Depdagri, Kemunkumham dsb, putusan- putusan pengadilan diperkuat, Raja-Raja Huta, Pamusuk di SK kan bersama Raja Luat nanti 'disertifikasi' (raja sesuai garis keturunan), bagas godang diaktifkan aktifitas acara sosial kemasyarakatan ditingkat di desa sampai lingkungan/ lorong (sebagai raja panusunan bulung). Kehidupan antarmarga perlu musyawarah bersama, klaim tanah adat semakin jelas termasuk siapa saja mereka yang jadi 'anak boru' di desa semakin kuat, apalagi di lingkungan atau lorong tersebut terutama yang baru dibuka yang ada masih '*hatobangon*' sebagai tokoh masyarakat. Jangan saling melemahkan, peta adat diurus ke planologi di Bogor, disampaikan ke pemerintah desa, Camat dan Bupati. Masyarakat adat bisa kuat asal kita bersatu.

Yang penting kalau ada acara '*horja*' (pesta adat), '*margondang*' tanya siapa raja panusunan bulung di desa tersebut. Jangan kita jual tanah adat, tanah terlantar/ulayat yang ratusan tahun bisa dikelola lewat program hutan kemasyarakatan oleh masyarakat adat atau kelompok tani koperasi yang berbadan hukum ajukan lewat dinas kehutanan.

Jadi penguatan tanah adat harus ditingkatkan, Pasal 33, UU Agraria, UU Kehutanan, BPN bisa membantu, tapi karena alas hak tanah ulayat tak diurus tak kuat. Alas hak ini ada di Belanda seperti *Peta Belanda Angkola Komplek*, ada di raja-raja dulu, ada yang bilang dibakar. Kapan keturunan '*harajaon*' '*popparan*' mestinya mengetahui dan mendapatkan hasil untuk kepentingan kesejahteraan bersama terkait masalah-masalah sosial di desa, menjaga keharmonisan, kerukunan kamtibmas, organisasi adat di desa sangat sedikit (belum terorganisir) diperlukan instrumen

perjuangan. Dampak sosial ekonomi dan sosial budaya harus kita pikirkan bersama. Akan semakin jauh mereka dari mesjid karena terlalu 'rakus' atas uang ganti rugi menjual yang bukan haknya, apakah boleh tanah ulayat diperjual belikan? Mari bersatu agar tambang emas membawa kesejahteraan bersama.

Etnik Batak Angkola ingin bersatu menguatkan ekonomi masyarakat dan melanjutkan ide-ide 'MARTABE' (*Marsipature Hutana Be*) oleh perantau dan investor agar desa maju dan mandiri. Apakah petani bisa maju kalau arah RPJMD bidang pertanian, perkebunan, pariwisata berbeda dengan arah menuju zona EBT, pertambangan dan energi yang ada akan kuat merusak pertanian masyarakat, bisakah maju Agrowisata? atau bagaimana dengan wisata Alam, religi, budaya? Danau Siaus, Danau Marsabut dll dengan motto Angkola ikon baru daerah yang peduli lingkungan, tingkat pendapatan masyarakat bisa tertinggi di Indonesia, indeks hidup bahagia bertambah, fasilitas kesehatan, pendidikan terbaik di Indonesia, SDA dikelola untuk kemakmuran rakyat mungkinkah? Indeks kerukunan hidup umat beragama meningkat. Pertanian dan kearifan lokal (*Mata Guru Roha Sisean*) : Antara Program CSR Tambang Emas dan Pemerintahan Desa di Tapanuli Selatan menurut O. Siregar, raja adat Kecamatan Batang Toru dalam wawancara bulan Februari 2022 mengatakan bahwa :

“Sulit memang mengatur masyarakat kita ini, apa yang dibuat oleh tambang emas sebenarnya sudah bagus, tapi karena mental masyarakat kita yang tak mau kerja keras, berpikir jangka pendek hasilnya kita sendiri yang merasakan. Contoh kita dikasih bibit, alat pertanian seperti jetor lewat kelompok tani, mereka kurang mau

memanfaatkan lahan supaya bisa berhasil padahal bisa tanam padi tapi jangan pakai pupuk pestisida harganya lebih mahal, kita dorong memakai pupuk organik. Inilah kearifan lokal kita dulu. Ada cara yang murah, petani lebih berhasil, saya sudah meninjau ke daerah Sumatera Barat. Sekarang terlihat masyarakat mau menanam yang cepat panen seperti jagung, ada warga di Sipenggeng yang mendukung percontohan masyarakat dengan memberikan bibit, pupuk nanti hasil panen dia yang menerima”

Masalah budaya (kultur) lokal Angkola masih jadi problem seperti nilai transaksional, kepatuhan kepada raja rendah (sistem patron clien) berbeda dengan raja atau kesultanan di Jawa, yang lebih sulit adalah pengajuan pada keturunan antar barusan ‘kahangi’ raja apalagi banyak punya anak (anak ni raja). Sulit mrnyatukan persepsi apalagi program kerja ‘*Bagas Godang*’ ingin mengaktifkan kembali kegiatan sosial dan raja-raja Pamusuk (desa) agar ikut menguatkan sistem kekerabatan dan ‘harajaon’ di desa.

Adakah mentalitas baru mulai terlihat akibat masuknya pertambangan semakin mencari identitas sebagai bentuk pengakuan investor pada hak-hak masyarakat adat di Tapsel. Apa yang menjadi tradisi ‘dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’, ‘*mata guru roha sisehan*’, (kritis dalam mengambil keputusan) perlu dijadikan panduan (*guidance*) pada pola pikir (*mindset*) dan pola tindakan masyarakat adat bidang pertanian. Akibat perubahan sosial yang semakin kompleks, berbagai kebutuhan hidup akibat modernisasi pembangunan yang terus menggeser peran teknologi sebagai instrumen penting kemajuan seakan meminggirkan pola hidup sosial berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang terus-menerus dijadikan simbol

perjuangan masyarakat adat Tapsel.

Tak bisa semua persoalan antar '*Bagas Godang*' terkait berbagai masalah seperti tapal batas antar marga diselesaikan secara hukum, mari kita dorong pola musyawarah dan jauhi 'intervensi pemerintahan, di sini kita diuji karena erat kaitannya dengan kepentingan. Ungkap raja Marancar yang sehari-hari dipanggil Coky Siregar, bangga atas upaya menguatkan kembali *Bagas Godang Marancar* di Sipenggeng sekarang pembangunan sudah hampir selesai, insya Allah nanti ada rencana beliau untuk melaksanakan seminar penguatan raja adat dan '*margondang*'.

Program beasiswa ke semua masyarakat lingkaran tambang sangat dibutuhkan, putra/i lingkaran tambang juga terlihat sudah banyak yang kuliah baik di Tapsel dan Medan bahkan yang berprestasi setelah tamat ikut melamar sebagai pekerja, 'saya yakin penerimaan masyarakat setempat terutama lingkaran tambang semakin diperhatikan, jangan semua dari luar, apalagi ada yang bayar, jual beli KTP, KK oleh aparat desa dan intervensi kekuasaan". Sejak adanya tambang masih sedikit yang merasakan dampak sosial, ekonomi dan sosial-budaya. Lihatlah program pertanian desa Sumuran, Kurahan Wek I, Sipenggeng, Aek Pining dll belum terlihat dampak ekonomi yang kita banggakan.

Problem mentalitas masyarakat kita juga perlu disesuaikan dengan kultur perusahaan yang bekerja pada efisiensi, produktivitas, kultur kapital yang masuk ke desa berinvestasi. 'Ini sudah diajari, tak mau diajak bermusyawarah, kalau diundang mereka tak datang'. Ketika raja-raja adat dipercaya oleh perusahaan mestinya harus dijaga agar perpanjangan program

CSR tepat sasaran. Ketika sistem pertanian tradisional di desa mulai banyak beralih ke sawit, tanam palawija seperti bayam dsb, belum optimal, penggerak desa masih sedikit, belum lagi mentalitas aparatur desa belum berpihak pada program ekonomi desa. Di sini perlu kolaborasi bersama desa dan masyarakat adat (luat) berpikir besar pada kesejahteraan bersama.

Sulit menguatkan adat budaya Batak Angkola akibat pengalaman historis sejarah marga dan kerajaan. Ketika kedatangan Islam modernis sebelum kemerdekaan datang seakan menjadi bagian dari upaya islamisasi budaya, ada ‘pergolakan teologis’, antara tokoh-tokoh adat yang melestarikan adat budaya dengan kelompok modernis menguatkan Islam atas praktek budaya yang dianggap bertentangan dengan tauhid (aqidah), terjadi dialog bahkan dapat menimbulkan ‘perselisihan’ antar saudara. Banyak peristiwa di desa yang menjadi pertentangan akibat adat istiadat. (N. Gajah, Sejarah Masuknya Muhammadiyah ke Tapanuli Selatan). Tentu juga perlu kajian dan penelitian sejarah ulama dan mesjid pertama di Tapsel dan perhatian pemerintah untuk menguatkan *heritage* religi termasuk makam Syekh yang banyak diziarai mestinya juga direnovasi untuk menguatkan kesejarahan Islam di Tapsel.

Era Baru mestinya ada perspektif baru etos budaya atas kemajuan di era globalisasi dan ancaman kehadiran perusahaan dan kesadaran akan ledakan penduduk serta ketersediaan lahan atau kebun untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Generasi yang sadar akan berbagai dampak perubahan sosial bidang pembangunan mendorong pentingnya ‘bersatu’ pada kepentingan bersama untuk kesejahteraan. Sudah saatnya

era ini, zaman digitalisasi, teknologi informasi dan era 4.0 kebangkitan pada revolusi industri bergeser pada penguatan dari primordialisme (suku dan agama) ke penguatan ekonomi. Tak relevan lagi isu-isu identitas untuk dipolitisasi, tapi diperkuat pada pemberdayaan komunitas atas berbagai program kemitraan dan pembangunan berkelanjutan.

Butuh gagasan baru mencari titik temu memajukan daerah, kenapa Tapsel bukan menjadi daerah wilayah etnik seperti Mandailing, Karo, Simalungun, Nias, Dairi? Atau memperkuat etika pembangunan (teologi pembangunan) agar penegakan hukum mulai tegas untuk semua dan penghargaan, pengakuan atas raja adat sebagai simbol pemersatu, pemilik desa (sesuai sejarah desa sama dengan marga yang ada) maupun pembukaan desa baru sejak zaman Belanda, masih banyak kesulitan tapi perlu diperkuat agar masa depan desa semakin kuat untuk sejahtera. Ikut serta sebagai subjek dan objek pembangunan.

Terlihat penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis belum terlihat ada etnik Batak Angkola? Masih terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli, pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-fak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Kapan kita diakui? Sulit mempersatukan kerajaan (tarik menarik kepentingan atas tanah ulayat, dan rasa kepemilikan atas kerajaan adat rendah, kurang bersemangat atas adanya identitas atau ada yang melemahkan? Sulit juga menjadikan daerah agamis, wilayah syariah. Daerah pragmatis kata A. Pulungan dalam disertasinya. Kuat adat istiadat (Raja Adat) berbeda dengan Mandailing kuat Islam. Apakah wilayah

NKRI tanpa identitas kuat pada etnis dan agama? Apakah yang menguatkan kita?

Mengapa kita butuh kekuatan masyarakat adat? Disaat yang sama negara (pemerintahan) semakin kuat sampai ke desa akibat UU Desa, dimana peran masyarakat adat? Ataukah identitas etnis sebagai simbol 'pertarungan' aktor untuk pemanfaatan kepentingan pribadi demi tujuan ekonomi atau eksistensi. Kenapa identitas etnik (marga) mulai muncul (diperkuat). Apakah ada yang 'terganggu' atau malah senang atas kembalinya kebangkitan atas kesadaran bersama untuk kesejahteraan akibat kemiskinan dan ketertinggalan baik pada SDM atau ketersediaan lahan. Perlu juga pemerintah memikirkan apakah warisan masa lalu, daerah heritage kerajaan dijadikan jadi tujuan wisata budaya?

Catatan kedatangan peneliti sejarah dari Belanda menambah wawasan kita tentang daerah Tapsel seperti dijelaskan Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution, MM (dalam berita online <http://www.harian9.com>). "Mengajak Dr. Bath Luttkhuis untuk mengunjungi beberapa tempat sejarah di Sipirok seperti objek wisata Simago-mago, Taman Makam Pahlawan Simago-mago, GKPA Parau Sorat, Makam Djaromahot Nasution selaku tokoh pemersatu kerukunan beragama ditanah Batak khususnya di Parau Sorat, Masjid Sri Alam Dunia Sipirok dan Gereja HKBP Sipirok. "Sesungguhnya Tapsel ini merupakan daerah yang sangat bersejarah dan Tapsel dan juga mempunyai panorama alam yang indah seperti Danau Siais, Air Terjun Silimalima, Pantai Barat Muara Opu dan panorama alam lainnya serta Sumber Daya Alam yang berlimpah baik itu sektor perkebunan,

pertambangan emas yang ada di perut bumi Tapsel, serta PLTA nya yang merupakan pembangkit listrik terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas 510 MW”. “Demikian juga dengan Masjid Sri Alam Dunia Sipirok yang berseberangan dengan Gereja HKBP Sipirok yang merupakan salah satu Gereja HKBP tertua yang berdiri sejak 156 tahun lalu. Ini membuktikan kerukunan umat beragama di Sipirok telah berangsur sejak lama.”

Masyarakat adat juga perlu memahami tentang *Sustainable Development Goals* disingkat SDGs. SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran. Pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

- 1) Desa tanpa kemiskinan
- 2) Desa tanpa kelaparan
- 3) Desa sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan desa berkualitas
- 5) Desa berkesetaraan *gender*

- 6) Desa layak air bersih dan sanitasi
- 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
- 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
- 9) Inovasi dan infrastruktur desa
- 10) Desa tanpa kesenjangan
- 11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- 14) Ekosistem laut desa
- 15) Ekosistem daratan desa
- 16) Desa damai dan berkeadilan
- 17) Kemitraan untuk pembangunan desa.
- 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Menurut Nizaruddin (Waspada, 30/11/2022) menyebutkan bahwa pemerintah lewat Kementerian Pertanian belakangan ini gencar mempromosikan pertanian berbasis teknologi atau *smart farming* targetnya 2,5 juta petani millennial secara nasional hingga 2024. Saat ini BPS juga sedang melakukan survey yaitu Survey Pertanian Terintegritasi (SITASI) 2021, SITASI sendiri mengadopsi *Agricultural Integrated Survey* (AGRIS) – FAO yang disesuaikan dengan Indonesia. SITASI diharapkan mampu menyediakan data untuk memantau indikator-indikator dalam SDG’S.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan setidaknya BUMDes dapat menjadi instrumen untuk mencapai lima program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. *Pertama*, SDGs desa kedelapan yaitu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. “Pertumbuhan ekonomi desa merata. Harapan kami, ini pemicunya, penopangnya, dan pemangku utamanya kami bebankan pada BUMDes,” Senin (17/5/2021). *Kedua*, SDGs Desa kesepuluh yaitu desa tanpa kesenjangan. Ketika pertumbuhan ekonomi melalui BUMDes sudah terwujud, maka kesenjangan harus diantisipasi. Gini ratio di desa, atau ukuran ketimpangan agregat di desa, harus semakin pendek. *Ketiga*, SDGs Desa keenam belas yaitu desa damai dan berkeadilan. Aspek keadilan yang dapat diwujudkan oleh BUMDes yaitu keadilan ekonomi di mana tidak ada kesenjangan yang jauh antara kaya dan miskin.

Keempat, SDGs Desa ketujuh belas yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Pada poin ini, BUMDes diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan BUMN, pemerintah daerah, hingga swasta. *Kelima*, SDGs Desa kedelapan belas yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. “Artinya inovasi-inovasi di desa dilakukan dengan tetap berupaya berpijak dan bertumpu pada budaya dan adat istiadat di desa yang sudah berjalan dengan bagus, namun terus berupaya melakukan inovasi baru agar terjadi percepatan dan peningkatan di dalam desa dan warganya.” (Dikutip dari Bisnis.com tanggal 17 Mei 2022 dan email: <https://sdgsdesa.kemendes.go.id>)

Pemdes Sijungkgang gelar pembelakan relawan SDGs Desa Tahun 2021, Senin, 03 Mei 2021. Pemerintah Desa Sijungkgang

Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Relawan kelompok Kerja (Pokja) pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2021. Bimtek yang dilaksanakan di Kantor Desa Sijungkgang, Senin, 03/05/2021. Menurut Kepala Desa Sijungkgang Adi Mirhan Siregar dalam berita media online <https://www.poskotasumate> yaitu: “Kita harus paham cara mengisi aplikasinya, individu, nomor ktp, kk, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan perbulan dan penghasilan Setahun. Seterusnya kondisi kesehatan dan kondisi penyakit yang diderita masyarakat. SDGs Desa merupakan model pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. SDGs Desa adalah upaya terpadu dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa dengan ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan”.

Kades Sijungkgang sangat mengharapkan agar 11 orang pokja relawan pendataan benar-benar serius mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber dari pendamping desa, sehingga dapat dipahami dan mampu mengaplikasikan dilapangan sesuai tugas yang diemban masing-masing peserta dengan melakukan pendataan langsung ke semua rumah warga masyarakat yang ada di desa agar data yang diperoleh dapat disajikan sesuai harapan”. Untuk penugasan dan penunjukan kelompok kerja relawan pendataan desa merujuk pada peraturan menteri desa PD TT No. 21 Tahun 2020 tentang POKJA relawan pendataan desa. Pendataan harus serius melakukan pendataan sesuai keadaan Desa tidak ada penduduk yang terlewatkan dalam pendataan ini mulai dari bayi sampai usia lanjut.

Maka ditengah wabah covid saar ini ekonomi masyarakat harus bisa bertahan lewat program pemerintahan daerah dengan mengusahakan BUMD Martabe Tapsel menggalakkan pertanian sebagai sumber kehidupan sejak zaman dulu. Mari lihat lihat Aceh zaman dulu ketika ada Gunung Emas, sungai Emas, transaksi perdagangan internasional di Sabang lewat kepingan emas sebelum adanya nilai tukar uang, ditemukannya mata uang. Mereka sudah menyumbang emas ke kerajaan Arab Saudi pembangunan Baitullah Mekkah zaman Utsmaniyah, Abdul Mutholib sebelum Suud seribu tahun yang lalu.

Ada lagi potret kerajaan Islam di Brunai Darussalam Sultan Hassanal Bolqia, masyarakatnya mengamalkan Al Qur'anul Karim dam Sunnah Rasulullah, negaranya kaya raya, rakyatnya sejahtera dan bahagia anti wabah. Menurut L.S Hutagaol mengatakan :

“Anak saya tamatan SMP Swasta di Tapteng dulu sekarang di SMA Plus Sipirok tak pernah dapat bantuan beasiswa, kawan-kawannya banyak yang dapat, alasan mereka karena sekolahnya dari Tapteng, yang SD 1 di Wek I juga nggak dapat, entah apa alasannya. Bayangkan biaya di SMA Plus Sipirok setiap bulan 1.220.000 dari usaha jual nasi ke pasar Batang Toru sejak covid kemarin sangat sepi. Mungkin saat survei mereka melihat ada 2 mobil parkir di rumah kami, padahal itu mobil bos, saya hanya supir untuk mengangkut sawit. Jadi ini harapan kami agar masyarakat yang ada di Wek II agar di data sesuai yang ada agar kami ikut. Namanya Misdi Lubis bagian pendidikan dari tambang. Dulu anak dari daerah ini banyak diterima sekarang anak saya sudah melamar, habis interview nggak ada lagi dipanggil. Ada dibangun jalan setapak, MCK, taman bacaan, beasiswa belum semua, saya kurang tahu apakah yang dapat yang berprestasi saja atau kurang mampu, kami dengar saja siapa yang menerima”.

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan mestinya menguatkan BUMD sebagai perusahaan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut hasil diskusi dengan P. Siregar di Sipenggeng pada tanggal 6 Februari 2022, mengatakan:

“Bantuan CSR tambang ada program pertanian, perpustakaan desa. Luat eks. Kekuriaan Marancar bermarga Siregar yang juga berada di desa lingkar tambang, kami juga ada menerima bantuan sarana ibadah, beasiswa. Jalan. Seharusnya antara bantuan CSR berbeda dengan program pemerintahan desa. Program Bagas Godang sangat mendukung agar pertanian di desa ini maju, termasuk desa lain daerah luat Marancar. Kesulitan di desa masih ada akibat sedikitnya lahan pertanian, sekarang sudah ada hasil pembibitan benih padi juga mendorong pemanfaatan lahan agar produktif”.

Masyarakat sekitar 15 desa lingkar tambang, pasar Batang Toru begitu saja, Apa yang produktif untuk rakyat? Membanggakan sehingga ekonomi meningkat. Studi tentang isu-isu pembangunan mulai dengan pertanyaan dasar: apakah pembangunan yang berhasil dan pembangunan yang belum berhasil itu? Dengan mengkaji isu-isu pembangunan seperti: ledakan penduduk, kelaparan, penggundulan hutan, penurunan kualitas lingkungan, hubungan utara-selatan dan barat-timur, transfer teknologi yang tepat, krisis ekonomi dan moneter, krisis hutang negara dunia ketiga.

Secara umum, di Indonesia terdapat enam isu-isu pembangunan dan secara moral ini terjadi paradoks yaitu: *pertama*, isupembangunanekonomi, dimanameningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, meningkatnya ketidakmerataan

pemilikan aset dan akses sumberdaya produksi. Menurunnya kegiatan investasi sektor swasta. Menurunnya kemampuan sektor perbankan untuk mendukung kegiatan sektor riil. Menurunnya kesehatan ekonomi daya saing perusahaan. Meningkatnya persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, meningkatnya penetrasi produk luar negeri, rendahnya akses pasar global dan melemahnya struktur industri dalam negeri.

Kedua, isu pembangunan yang ada di Indonesia yaitu tentang isu sosial. Isu sosial ini meliputi rendahnya kapasitas manusia dan kualitas hidup masyarakat, menurunnya kapasitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan dan air bersih), melemahnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat. Menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang saat ini banyak terjadi di Indonesia juga mendapat angka yang fantastis. Meningkatnya konflik horizontal dan vertikal dan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membangun modal budaya dan sosial.

Ketiga, isu pembangunan infrastruktur yang meliputi menurunnya alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur, meningkatnya variasi kebutuhan pelayanan infrastruktur di kota metro dan besar, meningkatnya kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara Jawa dan luar Jawa, menurunnya kapasitas sumber tenaga listrik, Terbatasnya kapasitas pemerintah dalam pengelolaan.

Keempat, isu pembangunan hukum, politik, dan pemerintahan meliputi melemahnya penegakan hukum keadilan serta penghargaan terhadap HAM. Adanya

pembaharuan sistem politik yang kurang mendukung efisiensi dan produktivitas ekonomi. Munculnya eksese negatif dalam penerapan sistem demokrasi politik dan otonomi daerah. Selain itu, adanya pembaharuan sistem demokrasi politik dan otonomi daerah dan meningkatnya gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kelima, isu pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang meliputi menurunnya produktifitas lahan untuk produksi bahan pangan di Jawa, meningkatnya konservasi pertanian ke non pertanian, melemahnya kemampuan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam (kelautan, kehutanan, dan pertambangan), meningkatnya pengerusakan kawasan lindung, area hutan tropis dan resapan air, meningkatnya kadar polusi lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan dan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian SDA dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, wacana dan praktek pembangunan berada dalam kondisi ketidakselarasan yang kritis. Gagasan tentang pembangunan dalam kecenderungan intervensionisnya dewasa ini semakin kehilangan reputasinya dalam dasawarsa terakhir. Dalam dunia akademis, gagasan pembangunan mengalami demistifikasi melalui perdebatan beberapa mazhab pemikiran. Etika atau moralitas sering menunjukkan alasan-alasan dan pembenaran etik dari tindakan tertentu. Maka etika pembangunan ekonomi diartikan sebagai alasan-alasan moral dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu perwujudan masyarakat yang adil makmur material

dan spiritual. Etika juga merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik-buruk tindakan itu.

Secara denotatif kata pembangunan memiliki beberapa makna positif, antara lain; perubahan sosio-ekonomi, pertumbuhan, kemajuan, modernisasi. Namun istilah pembangunan juga sering dikonotasikan sebagai jargon dan semboyan yang digunakan untuk memajukan, memakmurkan dan menjawab semua tantangan kemiskinan serta keterbelakangan (*underdevelopment*) di negara-negara Dunia Ketiga (*developing countries*). Adapun yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kondisi hidup secara efektif yang diukur dengan bertambahnya *income per kapita* dan progress teknologi.

Uraian makna di atas mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai esensi makna yang luhur dan terpuji. Akan tetapi, pada tataran praktis-empirik sering kali terjadi apa yang disebut dengan paradoks pembangunan. Pembangunan justru menciptakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia (seperti; ketidakadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi), terutama bagi mereka yang mayoritas tinggal di negara-negara berkembang.

Merujuk pada pendapat Amartya Sen (1999) yang menyatakan bahwa pembangunan sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah proses meluasnya kebebasan hakiki yang dapat dinikmati oleh setiap individu dalam masyarakat. Pembangunan bukan hanya diukur dari bertambahnya GNP atau *income*

per capita nasional, atau meningkatnya industrialisasi, atau masyarakat yang *modern*. Namun keberhasilan pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya bila diukur dengan parameter kebebasan. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan di sini, yaitu; apakah tujuan-tujuan pembangunan yang dilakukan benar-benar telah memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti; pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut atau dengan kata lain seberapa besar masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan.

3.6 Politik Pembangunan *Dalihan Na Tolu*

Bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, politik yang akan diperjuangkan oleh Kepala Daeah, pemangku kepentingan (stakeholder kepemimpinan politik) di Tapsel? Kedepan masyarakat Tapsel semakin cerdas dan dicerdaskan, suatu saat mereka akan protes terhadap tanahnya ketika diambil atas nama pembangunan (investor), tambang dan PLTA sebagai kebanggaan, tapi menolak jika sungai Batang Toru tercemar dan ganti rugi yang tidak sesuai, tanah-tanah adat belum diakui dsb, konflik horizontal semakin menurun.

Berdasarkan wawancara dengan S. Sinaga pada Senin, 7 Februari 2022 bahwa:

“Sejak kehadiran tambang emas ini ada banyak ketakutan masyarakat seperti pembuangan limbah dan ancaman mencuri. Sejak kejadian tahun 2012 dimana masyarakat protes dan melakukan unjuk rasa atas pembuangan

limbah ke sungai Batang Toru, ada trauma masyarakat atas kejadian *'Batang Toru Berdarah'*, sampai saat ini lokasi masih dijaga aparat TNI. Kita masyarakat tetap ada rasa ketakutan seperti minum air bawah tanah (sumur), banyak sekarang ikut air PAM. Kalau dilihat dari dekatnya tambang dengan pemukiman berkisar 1 KM, setahu saya dulu sejak SBY ada saya dengar pidato bahwa jaraknya sekitar 30 KM, tapi rupanya dihitung dari Kota Padangsidempuan bukan dari Batang Toru. Inilah beban kita di sini, apa boleh buat sudah diteken tokoh-tokoh masyarakat di sini”.

Begitu juga mempertanyakan bagaimana nasib petani, peternak dan konsep pariwisata di Danau Siais untuk menguatkan UMKM pertanian. Nasib pertanian akibat luapan sungai Batang Toru, sentuhan anggaran ke daerah pariwisata, daerah seakan terpingirkan padahal memiliki potensi PAD dari wilayah ini yang belum digali. Begitu juga upaya menggali potensi kopi yang berdampak bagi petani, pengusaha kopi di Sipirok.

Bagaimana program pemerintah membangun perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan rumah ibadah yang tidak menyalahi aturan, sekolah yang dibutuhkan di desa seperti SMP di Desa Gunung Baringin dll. Membangun berbasis HAM terutama daerah kawasan hutan perlu kajian agar masyarakat bisa hidup layak, pembangunan SDM Tapsel di wilayah ini terus diprioritaskan.

Dampak kebijakan

Disatu sisi harus diakui keberhasilan Bupati terpilih dua kali Bapak Syahrul Pasaribu, membangun kantor bupati dan mesjid yang megah Mesjid Syahrul Nur, membangun jalan

kabupaten, provinsi dan nasional serta infrastruktur lainnya apakah irigasi, jembatan, pertanian dan pengelolaan keuangan dengan predikat WTP. Kondusifitas dan kerukunan masyarakat terjaga. Menurut M. Harahap yang merupakan putra kelahiran Wek I Batang Toru menyebutkan bahwa :

“CSR tambang ada lebih pada pembangunan fisik seperti SMK Pertambangan di Parsariran dan SMK Pertanian lewat Aek Pining, membangun jembatan rambin, raja ada Hatobangon di sini di samping aparat desa juga dipercaya oleh tambang, sulit saling percaya antar warga, banyak penduduk lokal yang mestinya diterima kerja tapi sekarang banyak orang luar, dulu ada organisasinya lupa saya namanya ini yang jadi jembatan untuk aspirasi masyarakat, sekarang ada yang bayar 5 sampai 15 jt untuk masuk kerja. Inilah orang kita ada saja oknum yang bermain mencari keuntungan sekarang distop tambang, mungkin ada juga yang bekerja lewat CV. Inilah paling yang membantu, kalau usaha yang bersifat UMKM menurut saya belum terlihat, bagi pelaku usaha mikro padahal lahan pertanian seperti jagung, ubi masih bisa dibuat pabrik sederhana agar usaha pemasaran bisa cepat, menghindari tengkulak yang memainkan harga”

Perlu juga ada *check and balance* atas kondisi masyarakatnya saat ini untuk evaluasi dan kritik secara sehat (konstruktif). Menurut H Syahrul M Pasaribu, SH, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2010-2015 dan 2016-2021 menyebutkan komponen dalam menentukan IPM antara lain penurunan angka kemiskinan, usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk tahun anggaran 2020 di era pandemi covid-19, nilai yang di peroleh Tapsel saat diumumkan oleh BPS 5 Februari 2021 banyak keberhasilan yang di terima seperti IPM dengan 70,12 Poin (kategori tinggi),

penurunan penduduk miskin sehingga menjadi 8,47 %, gini ratio ekonomi 0,271 % dan gini ratio kependudukan 0,20 % (kategori ketimpangan rendah), nilai LPPD dari Kemendagri dengan skor 3.2225 (prestasi tinggi) dan Opini BPK RI atas LKPD TA 2020 adalah WTP (tujuh kali).

Bahwa kondisi ekonomi rakyat bawah semakin sulit untuk hidup, masyarakat bawah di sekitar pemberlakuan kenaikan tarif dasar listrik dan juga bila harga bahan bakar minyak (BBM) juga naik. Kemiskinan di Tapsel akibat harga sawit turun, petani salak, petani sawah, karet, aren dll, akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dari sisi teori politik, rakyat akan merasakan ada negara jika mereka menikmati beberapa hal: pertama, keamanan di wilayahnya; kedua, harkat diri karena tersedianya pekerjaan baik di sektor formal maupun informal; ketiga, tersedianya kebutuhan pokok dengan harga terjangkau; keempat, tersedianya pendidikan yang tidak mendiskriminasi antara yang kaya dan yang miskin; kelima, kebanggaan bagi negerinya yang termashur di seantero bumi karena pencapaian posisi penting di bidang olah raga atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintahan di daerah antara elite politik yang menikmati kekuasaan politik dan gambaran antrean panjang rakyat yang akan mengambil bantuan. Data BLT di desa se Tapsel seakan belum selesai. Perlu dukungan termasuk perantau untuk menguatkan pendidikan di desa. Perlu kajian akademis melihat dampak pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Tapsel. Semoga masyarakat Tapsel semakin sejahtera.

Keberadaan ratusan tenaga kerja asing di kabupaten Tapanuli Selatan terutama yang dipekerjakan di proyek pembangunan PLTA Batangtoru dan di tambang emas PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine terus mendapat sorotan dan jadi perbincangan publik. Tentang masih adanya yang mempertanyakan keberadaan TKA di Tapanuli Selatan itu dikarenakan beberapa hal, diantaranya soal legalitas, jumlah dan kontrak kerja para TKA tersebut.

Untuk menjawab keresahan masyarakat itu, maka pemerintah harus memberikan penjelasan dan pengawasan intensif terkait keberadaan TKA tersebut. Jika tidak ditangani secara baik, ia dikhawatirkanakan terjadi benturan dengan budaya dan agama lokal. Adaptasi bahasa dan kebiasaan sering menjadi masalah, ini harus jadi perhatian pemerintah. Kemudian seiring dengan itu, respon masyarakat lokal sebaiknya positif dan siap bersaing dengan TKA. Jangan sampai terjadi perlawanan yang akan merugikan kita sendiri. *'Batangtoru Berdarah'* cukup menjadi pengalaman terhadap penolakan anti tambang. Menurutny, kedepan yang perlu dilakukan adalah mendorong peningkatan kemampuan dan daya tahan pekerja lokal dengan gaji UMP di tengah persaingan pekerja asing.

Dalam kondisi sekarang ini yang penting digalakkan gerakan perubahan kultural dan mentalitas baru bagi generasi millennial untuk membangkitkan kesadaran atas ketertinggalan SDM masyarakat Tapanuli Selatan. Menurut S. Harahap mengatakan :

“Karenanya kita mendesak pemerintah biar berlaku adil dan memberi dukungan serta pelatihan kepada

pekerja lokal,” tegas Suheri. Selain itu, Suheri meminta agar para ilmuwan putra-putri Tapanuli Selatan, baik yang berada di Tapanuli Selatan atau yang di perantauan, agar mentransfer pengetahuan dan pengalamannya untuk memajukan Tapanuli Selatan”.

Kedepan, semoga ada solusi segera dan cepat sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Semoga rakyat kita semakin sadar, berharga dan berwibawa dimata perusahaan asing di daerah kita ini. Jangan pula mereka pikir kalau sudah ada perhatian sosial, pembagian sembako, bansos, mereka anggap sudah hebat. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tapanuli Selatan, sehingga dapat bersaing dan menjadi tuan di rumah sendiri.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang dikabarkan berkapasitas $4 \times 127,5$ MW berlokasi di Sungai Batang Toru, desa Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara harus diawasi. Masyarakat Tapanuli Selatan harus mengawasi terutama masuknya kepentingan politik global dan investasi negara Cina yang menguasai energi di Indonesia. Lebih-lebih di wilayah Tapanuli Selatan yang memiliki identitas budaya dan agama yang kuat. Untuk itu kita harapkan, kebijakan yang muncul dikemudian hari harus tetap mempertimbangkan pembangunan yang ramah lingkungan, analisis Amdal yang dibuat berdasarkan hasil kajian yang bisa dipertanggung jawabkan. Kegelisahan masyarakat atas dampak bendungan jika terjadi gempa dapat disosialisasikan secara ilmiah. Begitu juga dengan pelestarian hutan dan orang utan.

Persoalan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Tapanuli Selatan khususnya wilayah desa terdekat, kedepan perlu dan harus dikaji dengan melibatkan *stakeholder* dan kalangan akademisi. Sebab kita masih mempunyai tenaga kerja buruh kasar dan akan jauh tertinggal dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki skill secara profesional. Untuk itu, masyarakat kampus di Tapanuli Selatan harus bisa beradaptasi dan mampu mempersiapkan sumber daya lewat pembukaan jurusan atau prodi yang mendukung di bidang PLTA dan tambang. Masyarakat Tapanuli Selatan harus memperkuat secara kelembagaan tentang masyarakat adat yang memiliki legitimasi raja-raja adat di Luat Angkola Sipirok. Jangan hanya sebagai alat kepentingan kekuasaan dan berorientasi sesaat. Kita harus menjaga air, tanah dan kekayaan alam kita buat generasi yang akan datang. Untuk itu, mari kita kawal kebijakan pembangunan PLTA di Batang Toru Tapanuli Selatan. Dikatakannya, proyek yang memiliki *catchment* area seluas 2.405 hektare ini berkontribusi sekitar 15 persen dari beban puncak Sumatera Utara.

Kekuatan ekonomi-politik ke wilayah Tapanuli Selatan secara bertahap. Harus putra-putri Tapanuli Selatan yang jadi pemborong atau pengusaha ke depan, jelas kampungnya di wilayah Tapanuli Selatan, kita latih, kita buka kran utk mereka tampil, asosiasi-asosiasi yang ada apakah HIPMI, real estate, Kadin, kita dorong agar bisa mengutamakan putra-putri Tapanuli Selatan. Banyak perusahaan-perusahaan besar masih didominasi orang tertentu kalangan dari luar Tapanuli Selatan, baik di bprokrasi, tambang emas, perkebunan, badan usaha

daerah. Jadi yang pengusaha muda harus berani, punya nyali bersaing dan pemerintah mendorong kompetisi, jadi pulang kampung bukan untuk menganggur, tapi menciptakan lapangan kerja baru. memperkuat BLKI (Balai Latihan Kerja Industri), Bumdes, yang penting bisa menciptakan pengusaha-pengusaha muda baru Tapanuli Selatan kedepan.

Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang, coba kita lihat siapa-siapa pengusaha di Tapanuli Selatan sekarang ini, baik perhotelan, kesehatan, pengangkutan, AMP, panglong, alat berat, buku, agen gas, pupuk, gula, dan sebagainya. Perguruan Tinggi menjadi pintu gerbang kemajuan daerah.

Menurut T. Harahap bahwa dalam wawancara bulan Mei 2020 yaitu :

“Pendidikan harus menjadi barometer kemajuan sebuah daerah tapi kenapa sumber. Manusia terdidik belum menjadi skala prioritas di sebuah daerah. Apa yang terjadi di Tapanuli Selatan bahwa kita punya perguruan tinggi tapi semua berada di Padangsidimpuan seperti IAIN, Politekes, UMTS, IPTS UGN, Universitas Aufa Royhan, STAITA, Pertinu, Stikes Mitra Husada, Akbid Sentral, Akbid Matorkis, Akbid Dharmais”.

Saatnya kebijakan pemerintahan daerah berbasis riset (penelitian), menguatkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan. Menyiapkan industri dan lapangan kerja baru bagi putra/putri Tapanuli Selatan. Mari kita jadikan perguruan tinggi sebagai instrumen melahirkan pemimpin. Lihatlah alumni-alumni yang mengisi pekerjaan PNS, dosen, satpam, guru, dokter, tenaga profesional, dan lain-lain akan datang dari luar,

dampak ekonomi tidak tumbuh di wilayah-wilayah desa dengan program unggulan di bidang pertanian, pariwisata, perkebunan.

Untuk UMKM yang terus digalakkan Pemkab Tapsel, tapi untuk eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau disebut juga pedagang informal (informal sektor) hingga saat ini sangat dilematis. Disatu sisi membawa implikasi atas kesamrawutan wajah kota/kabupaten, tapi disisi lain harus mampu mendorong perekonomian mikro. Namun tidak demikian bila dilihat dari sisi tata ruang kota, dimana ruang terbuka publik telah terkontaminasi oleh keberadaan yang tidak terorganisir sehingga mencela hak-hak warga negara lain dalam penggunaan fasilitas negara berupa ruang publik yang hijau, nyaman dan aman.

Sektor informal (pasar tradisional) sering menjadi tertuduh sebagai ladang kebanjiran sanitasi yang tersumbat, tidak adanya ketertiban dalam pengumpulan sampah dan pemerintah sering mengatasi persoalan ini dengan relokasi (zonasi) dan penggusuran serta membuka ruang hadirnya persaingan baru dengan menyediakan alternatif pasar modern. Persoalan menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal serta menata pasar-pasar tradisional adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor informal ini, seban lapangan kerja sektor formal belum cukup, masyarakat masih membutuhkan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi barang (dulu namanya jual beli sistem barter) dan pusat interaksi sosial antara masyarakat di desa.

Pasar tradisional sebagai pusat interaksi pedagang PKL dianggap semrawut, kotor, jorok, menimbulkan aroma

tidak sedap, dan pemerintah sering memperlakukan konsep perekonomian modern (mall, plaza, hypermart dan lainnya) sebagai wujud sistem yang dianggap lebih nyaman, aman, sehat sehingga bisnis ini masuk begitu cepat ke seluruh wilayah di Sumatera Utara, tak terkecuali Tapanuli Selatan meski belum banyak tapi sudah ada di Sipirok.

Kenapa kita perlu mempertahankan pasar tradisional di Tapanuli Selatan? Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab moral bagi pemimpin kedepan agar sistem perekonomian rakyat tidak hancur. Berdasarkan aturan yang ada seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan, bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.

Menurut E. Harahap dalam wawancara bulan Mei 2020 bahwa :

“Tapanuli Selatan jelas sudah ada payung hukum, yakni Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan (2017 – 2037). Perda ini harus terus diperkuat agar pasar-pasar tradisional tetap eksis di bumi *dalihan na tolu* Tapanuli Selatan. Lantas, bagaimana dengan data pasar tradisional kita sekarang ini? Tentu ini menjadi bentuk kewaspadaan kita menjaga agar pasar *modern* tidak masuk dan menguasai sistem ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di desa-desa.”

Data PODES (BPS) 2018, menyebut jumlah pasar tanpa bangunan di Tapanuli Selatan yaitu; Batang Angkola (5), Sayur

Matinggi (3), Angkola Timur (1), Angkola Selatan (9), Angkola Barat (0), Batang Toru (1), Marancar (1), Muara Batang Toru (0), Sipirok (3), Arce (0), Saipar Dolok Hole (0) dan Aek Bilah (3). Data ini menyebutkan belum ada pasar modern di setiap kecamatan. Mampukah kita mempertahankan ini atau bagaimana kemungkinan munculnya pasar modern sekarang ini?

Tentu kita mengapresiasi Bupati Tapanuli Selatan Bapak Drs. H. Syahrul M. Pasaribu yang menjabat sepuluh tahun terakhir ini yang mendorong kekuatan ekonomi rakyat Tapanuli Selatan terlihat ada pasar tradisional yang diresmikan seperti peresmian pasar tradisional di Situmba kecamatan Sipirok (anggara dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan biaya Rp. 900 juta yang langsung dilaksanakan oleh Koperasi Wanita Saroha). Potret pasar tradisional lainnya seperti apa yang ada di pasar Sitinjak (Angkola Barat), Pasar Tolang (Sayur Matinggi), Pasar Sangkunur (Angkola Sangkunur), Pasar Huta Tonga (Batang Angkola), pasar Sampurna (Marancar), Pasar Batang Toru (Batang Toru) dan lain-lain.

BAB IV KESIMPULAN



4.1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan suatu proses yang ditimbulkan demi terciptanya kondisi kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam pembangunan dibutuhkan beberapa kriteria agar pembangunan dapat berhasil dengan baik. Adapun kriteria itu, antara lain ialah: *Pertama*, faktor ekonomis yang primer, antara lain sumber alam yang kaya, tenaga kerja massal dan modal yang cukup, *Kedua*, faktor sosial budaya, *Ketiga*, faktor etika.

Suku Batak Angkola adalah salah satu sub-etnis dari Suku Bangsa Batak, di samping Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing. Suku Batak Angkola memiliki hubungan yang sangat erat hubungan kekerabatan marga-marga (*Tarombo*) Batak Toba dan juga memiliki kekerabatan yang kuat dengan Batak Mandailing disebabkan adanya persamaan bahasa, budaya, dan agama yang dianut.

Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa (sering disingkat sebagai suku) adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan

sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.

Kemajemukan etnis di Indonesia menghadirkan sebuah identitas etnik yang khas dalam masing-masing kelompok etnik. Etnisitas sebagai simbol identitas kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan menarik dukungan komunitas etnis dalam proses dominasi praktek politik lokal. Banyak kepala daerah di negara kita yang terpilih bukan karena sosok negarawan sehingga mereka menjadi seorang kapitalis, dan mereka melihat wilayah kerjanya dipandang dengan tenor waktu dan uang dari periode mereka agar dianggap populer, tanpa memikirkan cadangan waktu untuk generasi. dan mereka memacu mendatangkan investor yang menghabiskan kekayaan untuk anak cucu setelah itu habis terjual. apa yang mereka lakukan sifatnya hanya pribadi dan tidak ada sebutan pahlawan, dan anak cucu hanya melihat puing-puing dari industri kapitalis yang sudah ditinggalkan.

Kalau seorang negarawan dia tidak akan menghilangkan cadangan tersebut, dan dia lebih memikirkan bagaimana masyarakatnya bisa mengelola sendiri, dan tidak tergesa-gesa, juga selalu hemat dengan disiplin waktu, agar anak cucu selamat dan daerah menghasilkan industri dan integritas serta bangga akan daerahnya, sukunya dan negaranya, seperti bangsa Inggris.

Masyarakat adat di tanah ulayat marga Harahap, Siregar, Dalimunthe, Pulungan di Angkola dan '*Hatobangon*' dari marga-

marga lain tetap bersatu dalam konsep *Dalihan Na Tolu* dimana kewenangan penguasaan atas tanah ulayat dan tanah komunal akan dilindungi pemerintah. Kedepan perlu kerjasama dalam menguatkan masyarakat adat beberapa perselisihan selain lewat peradilan, mestinya juga dilakukan lewat mediasi agar masyarakat *dalihan na tolu* tetap kuat dan bersatu.

Penyelesaian konflik tanah ulayat yang ideal dilakukan melalui negosiasi ekonomi yang dimediasi oleh lembaga adat bersandarkan kearifan lokal, melibatkan unsur *dalihan natolu* sebab menurut pribahasa orang Batak, tanah ulayat ibarat '*ulos na sora ni buruk' (boru tulang)* serta mengkaitkan masyarakat hukum adat dan hukum negara.

Model penyelesaian konflik tanah ulayat, model alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), bahwa model penyelesaian konflik diluar pengadilan yang diarahkan pada suatu kesepakatan (*win-win solution*). Aktor yang bersengketa memilih jalur mediasi menggunakan pihak ketiga untuk mencari jalan keluar dan rembuk untuk mencapai kesepakatan.

Pembangunan di Tapanuli Selatan mestinya memperkuat eksistensi masyarakat pemilik tanah ulayat daan mayarakat adat yang memiliki latar belakang historis, asal usul budaya lokal Batak Angkola yang tetap dilestarikan sebagai kekuatan budaya, perekat persatuan yang berbeda budaya dan agama. Karena itu, pembangunan harus memiliki kekuatan ideologis yang dimiliki daerah etnik. Sebagai warga negara budaya lokal *Dalihan Na Tolu* bagi masyarakat Batak Angkola sejalan dengan Pancasila.

5.2 Saran

Mengajak masyarakat untuk memperkuat adat istiadat budaya *Dalihan Na Tolu* sebagai pilar pembangunan di Tapanuli Selatan. Pemerintah Tapanuli Selatan kiranya memperkokoh pilar budaya sebagai alat pemersatu. Kepada masyarakat adat agar terus menjaga nilai-nilai sosial lewat *surat tumbaga holing* sebagai aturan hukum adat yang tak tertulis tapi memiliki ajaran-ajaran yang luhur untuk generasi muda saat ini agar memiliki benteng pertahanan budaya akibat era glonalisasi dan modernisasi.

Dalam menggerakkan berbagai kebijakan di Tapanuli Selatan hendaknya mengajak institusi adat untuk menyelesaikan berbagai konflik-konflik tanah serta menghindari konflik vertikal dan horizontal dengan perusahaan. Menguatkan Visi Tapanuli Selatan untuk kesajahteraan bersama. Tapsel *Sahata Saoloan* (seia sakat) adalah wujud adanya kebersamaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal yang ada serta swasta (pengusaha) saling asah, asih, asuh. Horas.

DAFTAR PUSTAKA

- 
- Aditjondro, J, George. 2003. *Korban-korban Pembangunan Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Banoewidjojo, Moeljadi. 1979. *Pembangunan Pertanian*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Tapanuli Selatan Dalam Angka*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi.
- Crocker, A. David. 2008. *Ethic of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy*, Cambridge University Press.
- , 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.

- Geertz, Clifford. 1981. *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, Inc, New York.
- Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman Siahaan, 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Perilaku Batak Toba dan Angkola dan Mandailing*. William Iskandar, Jakarta.
- Ishomuddin. 2001 *Diskursus Politik dan Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang.
- IAIN SU, 1975. *Dokumentasi Penulisan Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka Sumatera Utara*, Medan.
- Kamaluddin, 2022, *Akulturası Budaya Lokal dan Islam dalam Pernikahan Adat Angkola di Tapanuli Bagian Selatan*, Jurnal At-Taqhyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Vol. 4, No. 2 .
- Koentjaraningrat, dkk, (2004), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan ke 20, Djambatan, Jakarta.
- Kriesberg, Louis. 2003. *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*. (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc).
- Laswell, Harold D, 1970. dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, Yale University Press, New Haven.
- Leatherman, Janie. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Machiavelli, Nicolo. 2007. *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Pulungan, Abbas, 2003. *Interaksi Adat dan Islam pada Dalihan Na Tolu (Siriaon dan Siluluton)*, Disertasi, Yogyakarta
- Paulus Wirutomo, dkk. 2015. *Sistem Sosial Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Simatupang, Togar S. 1997. "Studies on the Liturgy of the Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) in Indonesia" karya. Terbitan Luther Seminary, North Adelaide, S. Aust.
- Sinamo, Jansen (ed), (2015), *Menggulirkan Revolusi Mental di Berbagai Bidang*, Institut Darma Mahardika, Jakarta
- Sonjaya, Jajang A. 2008. *Melacak Batu Menguak Mitos: Petualangan Antarbudaya di Nias*, Yogyakarta: Impuls dan Kanisius.
- Subhilhar. 2008 *Etika Pembangunan: Kajian Alternatif Dalam Studi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soerjono, Soekanto. (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sukarno, 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama. Jakarta: Panitia.

_____, 1990. *Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966*. Jakarta: Penerbit cv. Haji Masagung.

Widodo, Joko. 2004. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia, Surabaya.

<https://www.tribunnews.com/regional/2016/06/02/pemkab-tapanuli-selatan-dituding-serobot-tanah-masyarakat>

<https://www.mandailingonline.com/sengketa-lahan-dengan-pt-anj-kelompok-tani-andalan-napa-datangi-dprd-tapsel/>

<https://daerah.sindonews.com/read/1350143/191/pemuda-di-tapsel-dukung-pembangunan-plta-batangtoru-1540803627>

<https://m.merdeka.com/peristiwa/nistakan-agama-timbulkan-kerusuhan-remaja-16-tahun-dibekuk-polisi.html>

<https://elsam.or.id/konflik-perkebunan-pt-anj-agri-siais-tidak-menjalankan-nota-kesepahaman/>

<https://m.detik.com/news/berita/d-1939624/konflik-lahan-warga-bakar-mobil-perusahaan-tambang-di-tapanuli-selatan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



AKTIFITAS MASYARAKAT ADAT DI TAPANULI SELATAN

I. Masjid Tertua Se Tabagsel ada di Kota Padangsidimpuan



Sejumlah tokoh masyarakat di kota Padangsidimpuan, berharap Pemerintah kota (Pemko) Padangsidimpuan memberikan perhatian serius terhadap keberadaan masjid ini, karena masjid ini aset yang harus dijaga dan dilestarikan

Dibangun Tahun 1901 Masjid tertua se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tidak banyak mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Masjid Syekh Zainal Abidin yang terletak di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua merupakan masjid tertua di kota Padangsidimpuan dan Tabagsel, masjid yang berornamen perpaduan antara gaya Arab dan Jawa tersebut selesai dibangun pada tahun 1901.

Melihat komposisi bangunan Masjid Syekh Zainal Abidin di antaranya terbuat dari susunan batu kapur dan tanah, ditopang

1 pilar di dalam ruangan dan 8 pilar di bagian luar masjid, daya tampung masjid ini diperkirakan bisa menampung 100 jamaah bahkan lebih. Selain itu, masjid ini juga memiliki lima buah menara, Walaupun bangunannya masih bergaya lama, tapi kemegahan dan kekokohan masjid yang berada di sudut simpang empat by pass dengan jalur Silandit-Lopo Ujung ini masih dapat dilihat hingga kini.

Begitu juga jamaah yang datang juga tidak pernah sepi atau cukup banyak menyempatkan salat di Masjid Syekh Zainal Abidin tersebut, lokasi masjid yang berada di pinggiran persawahan *ring road by pass* membuat posisi masjid cukup strategis, sehingga sering didatangi para pelintas yang kebetulan lewat dan singgah. Apalagi jamaah juga disuguhi pemandangan hamparan sawah yang eksotik *plus* kesejukan dan kenyamanan, meskipun sebenarnya kondisi masjid tidak disentuh AC ataupun kipas angin jamaah yang singgah untuk beribadah di Masjid tersebut merasa nyaman dan tenang.

Satu daya tarik dan cukup unik masjid ini karena dari keseluruhan arsitekturnya sangat berbeda dari masjid lainnya di kota Padangsidempuan, desain dari dinding yang begitu tebal pada bagian atas yang berhubung dengan bagian atapnya tidak datar seperti pada umumnya seluruh bangunan dan masjid. Akan tetapi keseluruhan dinding bagian atasnya melengkung dan sepertinya menggambarkan lafaz Allah. Masjid ini juga sampai sekarang tak banyak berubah dari bentuk aslinya, namun akibat telah berumur ribuan tahun sudah banyak yang direnovasi seperti di bagian luar. Yakni, bak penampungan air yang digunakan sebagai tempat mengambil air *wudhu'* bagi yang hendak salat, saat ini lantai telah dikeramik.

Begitu juga daun jendelanya telah diganti dan lantai bagian dalam masjid juga telah direhab dan dijadikan keramik, bangunan masjid Syekh Zainal Abidin dengan luas sekitar 12 x 11 meter memiliki ketebalan dinding dengan diameter sekitar 60 hingga 80 centimeter. Terdapat jendela besar sebanyak empat sebagai ventilasi udara, serta terdapat jendela dengan ukuran yang lebih kecil sebanyak 4 buah, memiliki 1 pilar penyangga di bagian ruangan dalam, dan 8 pilar di bagian luar.

Generasi keempat dari almarhum Syekh Zainal Abidin yaitu Yunan bercerita sepintas perjalanan panjang dari Syekh Zainal Abidin yang kemudian membangun masjid hingga akhir hayatnya dan dimakamkan bertempat di Pemakaman Tor Gubah atau sekitar 1 kilometer dari masjid. Masjid Zainal Abidin dibangun pada tahun 1901, sebelumnya di tempat yang sama sejak tahun 1800-an juga berdiri masjid, tapi masih berbentuk panggung, dulu masjid tersebut selain untuk sarana tempat beribadah bagi masyarakat juga pernah dijadikan sebagai tempat parsulukan, ujar Yunan.

Lebih lanjut Yunan mengisahkan, sesuai penuturan yang didapatnya dari ayah dan kakeknya serta kakek buyutnya mengungkapkan sedikit perjalanan Syekh Zainal Abidin yang sudah melanglang buana menuntut ilmu agama bahkan hingga sampai ke Banten dan ke jazirah Arab. Hal itu juga membuktikan tingkat keilmuannya yang sudah tinggi sehingga beliau (Syekh Zainal Abidin) bukan hanya dikenal di seantero Tabagsel, tapi dikenal sampai ke Medan, Duri Riau, bahkan salah satu sumber pernah bercerita di tempat asalnya di daerah Ciomas Banten juga terdapat nama masjid yang sama, begitu juga gaya arsitekturnya,

memang kalau dirunut ke belakang dari perjalanan beliau lama di daerah tersebut, ungkapnya.

Yunan menambahkan, dirinya tidak banyak mengetahui bagaimana detail perjalanan hidup Syekh Zainal Abidin, tapi yang jelas Syekh Zainal Abidin adalah pengembang syiar agama Islam yang sangat terkenal. Sebenarnya saat ini tidak banyak referensi yang bisa didapat dan yang bisa diketahui dari beliau, contohnya saja tulisan kaligrafi serta ornamen indah di dinding masjid tidak diketahui apa artinya, makanya kita sangat berharap ciri khas dan bangunannya tetap terjaga, pungkasnya. Kakan Kemenag Padangsidimpuan Drs Efri Hamdani Harahap kepada Antara mengatakan, sesuai data yang dimiliki pihaknya, masjid yang paling tua di Kota Padangsidimpuan dan umurnya telah mencapai satu abad yakni Masjid Syekh Zainal Abidin di Desa Pudun Jae. Kemudian disusul Masjid Raya Lama tepatnya di Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Sejumlah tokoh masyarakat di kota Padangsidimpuan berharap memberikan perhatian serius terhadap keberadaan masjid ini, karena masjid ini aset yang harus dijaga dan dilestarikan serta bukti peninggalan sejarah tentang pengembangan agama Islam di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Tidak hanya itu, banyak pihak meyakini Syekh Zainal Abidin Harahap, termasuk salah satu ulama besar di wilayah Tapanuli Bagian Selatan pada waktu zaman pra kemerdekaan, yang memiliki andil untuk melawan penjajahan kolonial Belanda, dan mendidik masyarakat dengan ilmu-ilmu agama, sehingga kehidupan masyarakat pada zaman itu bisa lebih baik dan taat menjalankan ibadah sesuai perintah agama.

II. Istana Hasadaon di Tapanuli Selatan (Raja kerajaan Tano Tombangan)



Dr. Joonner Rambe, SE MM gelar Ompu Sri Paduka Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon. Pada tgl 29 Mei 2010 beliau dinobatkan lagi manjadi: “Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Tapanuli Selatan”. Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon adalah keturunan dari Baginda Raja Sojuangon Rambe yang memiliki kerajaan di Tanah Rambe Holbung, kec. Aek Bila, kab. Tapanuli Selatan dengan Sipiongot- Paluta. Beliau berasal dari kota Tua kec. Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan dan memiliki usaha di Jakarta dan mendirikan Istana Hasadaon di Sialang kec. Sayurmatinggi Tapanuli Selatan.

Dr. Joonner Rambe, SE MM gelar Baginda Agung Panuturi Hasadaon Rambe yang merupakan Raja Tano Tombangan (Tantom), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mendapatkan gelar tertinggi dalam kerajaan, dan resmi menyandang gelar baru, Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Rambe dalam sebuah

acara silaturahmi raja-raja se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Istana Hasadaon; kota Tua, kec. Angkola Tantom. Daulat Raja Agung Panuturi Rambe dalam sambutannya mengatakan, dirinya diangkat menjadi baginda di Tantom adalah atas dasar musyawarah raja-raja, hatobangan, tokoh agama, masyarakat, pemangku adat kepala desa se-Tantom untuk kemudian dirinya mendapat pengakuan dari sejumlah sultan dan raja di Nusantara.

Dikatakannya bahwa penabalan dirinya menjadi baginda di Tantom yakni pada tanggal 29 Desember 2009 lalu yang dilaksanakan dalam sebuah acara adat di Istana Hasadaon. Selain itu, kepada raja-raja se Tabagsel ini bahwa dirinya juga sudah mendapatkan pengakuan sekaligus juga menjadi anggota dari Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan (AKKI) sesuai dengan surat keputusan No.057/S.Kep-AKKI/2010 tertanggal 17 Mei 2010 lalu yang ditandatangani Presiden AKKI, Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang juga Sultan Palembang. Daulat Raja Agung Panuturi Rambe dan istrinya, Dra. Carolina Lumban Tobing gelar Ratu Namora Hasayangan, merupakan putra daerah Tantom yang sejak SMP sudah meninggalkan Tantom untuk bekerja dan kuliah di Jakarta dan saat ini memiliki 5 perusahaan di Jakarta mengatakan,

Bahwa keinginannya kembali ke kampung halaman adalah dikarenakan banyak perantau yang tidak tahu lagi Batak Angkola. Hal inilah yang menuntutnya perlu dikembangkan, agar batak perantau tidak sampai kehilangan identitas sebagai suku batak. Selain menjadi anggota AKKI, Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Rambe juga sudah mendapatkan pengakuan dari dari Sutan Kumala Pulungan gelar Raja Panusunan Bulung Adat Luat Sayur Matinggi dari Bagas Godang Sayur Matinggi.

III. Sejarah Singkat Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) di Tapanuli Selatan



GKPA adalah suatu sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berkantor pusat di Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. GKPA pada awalnya merupakan bagian jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Untuk menunjukkan ciri khasnya huruf A (Angkola) ditambahkan di belakang nama HKBP, seperti misalnya nama gereja yang terbentuk pada tahun 1940-an di daerah Bona Bulu Luat Angkola diberi nama HKBPA. Kemudian jemaat ini dimekarkan dan menjadi satu sinode yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA).

Awal berdirinya GKPA berasal dari pergumulan Putra-putri Angkola tentang pentingnya Berita Kesukaan/Injil disampaikan, dan dengan mudah dimengerti oleh orang-orang Angkola. GKPA semula bernama HKBPA dan berdiri sendiri dari HKBP tanggal 26 Oktober 1975, dan sejak semula telah memiliki

misi: *“Patanakkon Hata Ni Debata di Luat Angkola”*, adalah penggabungan dari HKBPA dan GPA yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1988. Saat ini jemaat GKPA tersebar di seluruh Indonesia, dan terdiri dari 6.291 KK dan 29.511 jiwa.

Berbekal dari pengakuan Pemerintah c.q. Depag RI No. 1 Ket/413/159277 tertanggal 19 Oktober 1997, No. 75 tanggal 10 Maret 1988 dan No. 21 TAHUN 1995, serta berdasarkan UU No. 8 / 1985 Tambahan Berita Negara RI No. 17 tanggal 26 Pebruari 1999 GKPA tetap memberitakan Kristus walaupun menghadapi banyak pergumulan dan tantangan. GKPA berdenominasi Lutheran, Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) adalah suatu sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berkantor pusat di Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Organisasi gereja ini secara resmi didirikan pada tanggal 26 Oktober 1975 ketika memperoleh otonomi dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dengan nama HKBP-A.

Pada tahun 1988 bergabung dengan “Gereja Protestan Angkola (GPA)”, dan mulai mengambil nama “Gereja Kristen Protestan Angkola”. GKPA melayani masyarakat Batak Angkola dalam bahasa daerah mereka. Dinyatakan dalam tujuan pelayanannya sebagai “menguatkan Kekristenan dalam lingkungan Islam” dengan upaya mempererat saling pengertian dan toleransi yang baik di antara umat Kristen dan Islam. (Simatupang, 1997).

KILAS BALIK KONFLIK DI TAPANULI SELATAN

Data dan peristiwa konflik masyarakat adat di Tapanuli Selatan dari tahun 2012, data ini diambil dari berita media.

1. Tahun 2012

Konflik warga Muara Batang Toru Dusun Pulo Godang dengan PT. Agincourt Tambang Emas Batang Toru. Pemicu disebabkan Pembuangan limbah tambang di areal PTP III menuju sungai.

2. Tahun 2013

Konflik Desa Tolang Jae dan sekitarnya dengan suku Nias di Dusun Adian Goti. Pemicu berawal dari penggarapan tanah dan pembangunan rumah di kawasan hutan register 6 Angkola

3. Tahun 2016

Konflik warga Desa Janji Mauli Kec. Sipirok dengan Pemkab Tapsel. Pemicunya adalah penyerobotan tanah masyarakat adat Janji Mauli dan Pemindahan kuburan.

4. Tahun 2017

Konflik kepemilikan lahan warga dusun Binasari Kec. Sias dengan PT. ANJ Agri Sias.

5. Tahun 2019

Konflik warga masyarakat Muara Upu dengan PT. Maju Indo Raya. Pemicu kasus Perampasan tanah adat Desa Muara Upu.

6. Tahun 2019

Konflik masyarakat adat lobu marga Sitompul dengan PLTA (NSHE). Dipicu persoalan ganti rugi lahan.

a. Catatan Peristiwa Konflik di Tapanuli Selatan

1) Pemkab Tapanuli Selatan Dituding Serobot Tanah Masyarakat



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh Bupati Syahrul Pasaribu dituding menyerobot lahan masyarakat yang tinggal di Desa Janji Mauli, kec. Sipirok, kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemkab Tapanuli Selatan juga dituding kerap mengintimidasi warga dengan mengerahkan aparat TNI dan Polri. “Sudah lebih dari ratusan tahun warga tinggal di Desa Janji Mauli. Namun, tiba-tiba saja pemerintah kab. Tapanuli Selatan menyerobot lahan masyarakat,” teriak Saddam Husain dari Posko Perjuangan Rakyat yang mendampingi warga di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (2/6/2016).

Menurut massa aksi, penyerobotan lahan milik warga ini dilakukan tanpa adanya dialog. Rencananya, tanah warga itu bakal digunakan Pemkab Tapanuli Selatan untuk rumah dan kantor pemerintah daerah setempat. “Mereka telah semena-mena menyerobot lahan warga. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan,” kata Sadam. Ia mengatakan, sebelum negeri ini merdeka pun, warga Desa Janji Mauli sudah tinggal di sana. Mereka menggarap lahan dan membangun pemukiman di sekitar wilayah Desa Janji Mauli. “Jadi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ini jelas-jelas menganggangi hak rakyat. Mereka harus diberi sanksi tegas,” kata Saddam

2) Konflik Perkebunan: PT. ANJ Agri Siais Tidak Menjalankan Nota Kesepahaman



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) sedang melakukan pendampingan dan pertemuan klarifikasi konflik kepemilikan lahan warga dusun Binasari Tapanuli Selatan edan yang saat ini lahannya dikuasai PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Siais.

Awal Mula Keberadaan Masyarakat Dusun Binasari

Pada tanggal 28 Agustus 1998, Bupati Tapanuli Selatan Bapak Soaloon Siregar mewakili Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan meresmikan keberadaan BINASARI (Binaan Sarikat Islam) menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS. Hal ini ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Desa Persiapan Binasari. Sejak tahun 1996, warga Binasari telah menempati wilayah ini dengan awal jumlah 100 KK. Melalui program transmigrasi lokal yang terdiri dari gabungan anggota transmigran lokal, anggota kelompok tani Napa dan anggota Sarikat Islam, saat peresmian warga desa ini telah berjumlah 567 KK.

Sejak pertama kali menetap hingga sekarang, kegiatan utama warga Desa Binasari adalah bertani dan berkebun. Mulai dari daerah tersebut dikenal dengan nama Paraupan, mereka telah diberikan izin untuk pembukaan lahan seluas 1.050 ha untuk mengelola lahannya menjadi berbagai perkebunan seperti karet, coklat, kopi, kemiri, pisang, padi, tanaman palawija dan lain-lain. Setelah lima tahun berlangsung dengan status Desa Persiapan, Binasari berubah menjadi Dusun Binasari, Desa Pardomuan, Kecamatan Siais. Hal ini bermula karena Camat Siais mengeluarkan surat untuk mengangkat Amron Pohan menjadi Kepala Dusun. "Dahulu daerah ini adalah kawasan hutan, kemudian ada pembukaan jalan yang dilakukan oleh perusahaan

HPH PT. Bhara Induk (BI) yang membuka jalan mulai dari Aek Lobu (sekarang Janjimatogu) melewati Aek Sibarabara, Paraupan sampai ke kawasan Hutan di Duatalaga di kaki Dolok Sombaon di pinggiran Sungai Batang Gadis, telah menjadikan daerah mulai dari Aek Lobu (Janjimatogu) sampai ke Paraupan yang dulunya terisolir menjadi daerah yang terbuka dan gampang untuk diakses oleh warga masyarakat.” jelas Ketua Dusun, Amron Pohan.

Menurut Amron Pohan, tahun 1996 setelah jalan terbuka, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program Transmigrasi Lokal (TRANSLOK) menempatkan 100 KK dengan luas areal masing-masing 2,5 ha/KK. Pada tahun yang sama Kelompok Tani Napa (KTNA) mengajukan permohonan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan, yang kemudian Bupati Tapanuli Selatan memberikan lahan seluas 1.050 ha untuk KTNA. “Setelah TRANSLOK dan Kelompok Tani Napa (KTNA) mendapatkan lahan, kemudian pada 1 April 1996, Sarikat Islam ranting kecamatan Siais kabupaten Tapanuli Selatan melalui surat nomor Ist/SI-IV/96, mengajukan permohonan pembukaan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan. Kemudian permohonan kami itu dikabulkan dan juga dijelaskan bahwa lahan yang dimohonkan oleh SI berada disekitar Daerah paraupan dengan keadaan tanah basah dan sangat cocok untuk pembukaan persawahan,” lanjut Amron.

ANJ Agri Siasis Mulai Merebut Lahan

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan yang memberikan izin usaha perkebunan kepada PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) pada tanggal 8 September 2003 yang memberikan mendatangkan malapetaka bagi dusun Binasari. Tahun berikutnya, Bupati kembali menerbitkan Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit untuk PT yang sama-sekarang berubah nama menjadi PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siasis (PT ANJ)-seluas 8.000 Ha di Kecamatan Batang Angkola dan Siaisi (sekarang Angkola Selatan), Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bermodalkan izin lokasi tersebut maka PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) melakukan aktifitas perkebunan mulai dari pembukaan lahan, pembersihan dan penanaman, bahkan juga sudah mulai melakukan pembebasan lahan. Hanya berselang 4 bulan 11 hari setelah memiliki izin lokasi tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 PT. Ondop Perkasa Makmur telah mendapatkan izin Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara Kepada Pt. Ondop Perkasa Makmur (Opm) seluas 8.000 Ha.

HGU tersebut diterbitkan, dengan pertimbangan BPN bahwa tanah yang dimohonkan telah dikuasai pemohon dan di atas tanah tersebut tidak terdapat lahan garapan

masyarakat. Padahal fakta di lapangan, lahan tersebut telah dikuasi dan diusahai oleh masyarakat dengan tanaman produktif sejak tahun 1996, dan bahkan sejak tahun 1998 telah diresmikan menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS dan kemudian tahun 2003 menjadi status Dusun Binasari Desa Pardomuan Kecamatan Siais (sekarang Angkola Selatan). “Saya masih ingat, sebelum penerbitan HGU itu, Muhammad Harahap Humas PT. OPM tersebut mendatangi saya untuk menandatangani secarik kertas kosong. Saya sama sekali tidak tahu apa maksud dan tujuan dia meminta tanda tangan itu. Saya waktu itu di motor, dan dia memberhentikan saya dan meminta saya masuk kedalam mobil. Saya pun menanyakan alasan meminta tanda tangan ini, apakah ini surat jual beli? Karena saya sudah yakinkan diawal tanah kami tidak dijual.” jelas Amron.

Humas PT Human menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut hanya untuk laporan ke Jakarta, dan tidak ada tujuan untuk membuat perkebunan. Ketika proses tanda tangan, tidak ada sama sekali pembicaraan soal perkebunan, dan mengatakan hanya ingin bekerja sama. “Kemudian saya dikasih uang sejumlah 50 ribu. Pertemuan itu hanya berlangsung selama satu jam. Saya sangat menyesal dan ternyata dia hanya berbohong dan memanfaatkan tandatangan saya sebagai izin. Camat sendiri pun waktu itu memanggil kepala desa dan bertanya juga mengapa ditandatangani,” lanjut Amron menjelaskan.

Pernyataan serupa juga diutarakan Bahktar salah satu tokoh masyarakat Dusun Binasari. Menurutnya

perusahaan tidak pernah datang untuk meminta izin atau sekedar 'permisi' untuk melakukan kegiatan bisnis perkebunan sawit mereka. Padahal masyarakat sudah lebih dahulu memiliki izin sah dari Bupati Tapanuli Selatan untuk menggarap lahan dari berahun-tahun yang lalu. "Mereka sangat kejam mengusir kami dari lahan yang sedang kami garap. Rumah tinggal kami dirusak, tanaman yang kami tanam mereka rusak dan juga sebagian warga kami mengalami kekerasan ketika mempertahankan lahan perkebunan mereka." jelas Bahktar.

Bahktar juga menceritakan bahwa, Ibu Rostipa hampir terkena tembakan yang berasal dari senapan api laras panjang milik salah satu brimob yang sedang mengawal becko. Mereka berniat menggusur tanaman di lahan milik Ibu Rostipah yang kala itu sedang mempertahankan lahan dan tanamannya. Pada tahun 2006 masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Hasilnya lahir nota kesepahaman antara DPRD Tapanuli Selatan dan Pihak PT ANJ Agria mengenai penyelesaian permasalahan Dusun Binasari dan Kelompok Tani KTNA dengan PT OPM. Dalam nota kesepahaman tersebut, disebutkan pihak perusahaan akan mengangkat warga sekitar lokasi HGU menjadi pekerja di perusahaan mereka.

Termasuk mempertahankan area perumahan dan lahan pekarangan warga asli Dusun Binasari dan KTNA yang berada di sepanjang jalan antar batas luar HGU. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman tersebut, pihak

perusahaan juga berjanji membangun kebun dengan pola kemitraan yaitu 2 Ha untuk setiap keluarga. Perusahaan juga berjanji menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan *Corporate Social Responsibilities* terhadap warga binasari dan KTNA. Bukti lain yang memberatkan pihak perusahaan juga muncul. Pada tahun 2009 laporan panitia khusus pembahasan permasalahan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan PT.OPM, menjelaskan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pansus juga menyimpulkan bahwa penerbitan HGU PT. ONDOP PERKASA MAKMUR (OPM)/PT. ANJ AGRIA cacat hukum.

Namun sayangnya, Bakhtar menjelaskan bahwa nota kesepahaman itu tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Parahnya kesepakatan tersebut justru menimbulkan perpecahan diantara masyarakat sendiri. Isi nota itu dimanfaatkan untuk mengkambing hitamkan masyarakat asli Dusun Binasari dengan masyarakat pendatang. Hanya 81 KK yang diberikan lahan plasma dengan luas bervariasi (mulai dari 1 Ha hingga 2 Ha). Konflik horizontal semakin meningkat ketika lahan plasma itu salah sasaran dan diberikan kepada masyarakat pendatang.

Ondop Perkasa Makmur telah berubah namanya menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais dan telah diakuisisi oleh PT. Austindo Nusantara Jaya yang sekarang telah menjadi holding dari PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS). PT. Austindo Nusantara Jaya (PT.

ANJ) sebenarnya telah menjadi anggota dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sejak 26 Februari 2007, perusahaan tersebut terdaftar dengan kategori sebagai *ordinary membership* dalam sektor perkebunan minyak kelapa sawit. Hingga saat ini PT. ANJAS sebagai *subsidiary company* dan *supply base* untuk PT. ANJ masih sedang menjalani proses penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO sejak 18 Juli 2016 oleh lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari dan belum memiliki status *approved*.

Padahal konsekuensi tergabung dalam anggota RSPO cukup jelas: perusahaan terkait harus mematuhi dan menjalankan seluruh ketentuan prinsip dan kriteria yang telah disepakati dan dibentuk melalui RSPO. Maka seluruh prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh perwakilan anggota baik yang *ordinary*, *affiliate*, dan *supply chain associate* terikat dan harus dipatuhi.

Namun praktiknya perusahaan ini masih banyak melakukan pelanggaran prinsip RSPO itu sendiri. Terutama pelanggaran terhadap pihak-pihak yang mempertahankan lahan garapan. Perusahaan melakukan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh militer dan aparat keamanan yang dibayar oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis. Termasuk perusakan tempat tinggal masyarakat Dusun Binasari hingga penembakan yang dilakukan oleh aparat Brimob suruhan PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis.

Fakta tersebut menunjukkan pelanggaran PT OPM dan PT ANJ melanggar Prinsip 2: Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan Jo. Prinsip dan Kriteria

No 2.2. Kriteria tersebut memuat ketentuan terkait hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal. Termasuk pelanggaran poin Indikator 2.2.3 yang menyatakan: “Apabila terdapat atau telah terjadi perselisihan, bukti tambahan atas akuisisi hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan *free, prior and informed consent (FPIC)*” Indikator tersebut jelas belum dijalankan oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siais.

Hal ini menunjukkan ada persoalan hukum khususnya pengakuan kepemilikan lahan oleh masyarakat Dusun Binasari yang masih belum terselesaikan dengan baik. Khususnya pengingkaran dan ketidakpatuhan atas prosedur prinsip dan kriteria RSPO.

3) Konflik Lahan, Warga Bakar Mobil Perusahaan Tambang Emas PT. AR di Tapanuli Selatan



G-Resource Martabe dengan warga Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut. Pada Selasa (12/6/2012), konflik itu memicu pembakaran mobil dan pipa limbah milik perusahaan tambang itu. Keterangan diperoleh menyebutkan, pembakaran itu terjadi dusun Pulo Godang, Batang Toru yang masih masuk areal perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara III, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

Kejadian bermula ketika ratusan warga asal desa Hutaraja, Muara Hutaraja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir, Raniate, dan Bandar Tarutung, kecamatan Muara Batang Toru, datang ke lokasi dengan mengendarai sejumlah kendaraan bak terbuka. Mereka berusaha menghentikan proses penanaman pipa pembuangan limbah yang sedang berlangsung. Aliran pipa itu rencananya akan berakhir di tepian sungai. Satuan pengamanan perusahaan yang mengendarai mobil Ford Ranger sempat berusaha menghadang massa. Tidak terima dengan penghadangan itu, massa kemudian membakar kendaraan bak terbuka tersebut. "Pembakaran itu sekitar jam 13.30 siang tadi," kata E. Nasution, salah seorang warga yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu.

Tak hanya membakar mobil, warga juga membakar pipa-pipa milik *G-Resource* yang akan mengalirkan limbah ke Sungai Batang Toru. Asap hitam membubung ke atas. Sejumlah pohon sawit yang berada di sekitar pipa ikut terbakar. Tindakan warga dipicu kekecewaan karena perusahaan tetap membuang limbah ke sungai.

Sebelumnya, warga meminta hal itu tidak dilakukan, pembuangan limbah itu dinilai akan menghancurkan kehidupan warga yang bersumber di sungai itu. Langkah yang diambil warga hari ini, diharapkan dapat menjadi perhatian pihak perusahaan. Kerugian akibat kejadian ini mencapai ratusan juta, namun belum ada keterangan dari pihak G-Resource terkait masalah ini.

4) Dalang Kerusuhan SARA di Tapsel Ditangkap



Dalang kerusuhan yang berujung pada kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di perbatasan desa kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel), 20 September 2016 lalu, akhirnya ditangkap polisi, Jumat (21/10). “Tersangka bernama Ari Bangsa Silitonga (16) warga Desa Purbatua, kecamatan Tantom Angkola, kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel),” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes

Pol Rina Sari Ginting di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Rina mengatakan, polisi mengamankan barang bukti satu bundelan hasil *screenshoot* akun Facebook Ari Bangga yang dilengkapi foto tersangka, ada juga foto profil pelaku mengenakan baju kaos oblong warna abu-abu berkerah hitam sambil mengangkat tangan, satu unit HP merk Advan warna hitam dan satu unit HP merk Nokia warna hijau “Dia yang menyebarkan penghasutan kebencian terhadap umat Islam dengan membajak akun Facebook (FB) milik Toni Darius Sitorus. Dia juga menggunakan dua akun FB miliknya untuk melakukan penistaan agama Islam,” ungkapnya.

Penistaan agama itu oleh pelaku membuat masyarakat menjadi emosional dan melakukan penyerangan. Empat warga mengalami luka akibat tertembak dan empat rumah dirusak. Bargot Pulungan (35), luka tembak senapan angin pada pinggul sebelah kiri dan Saripada Nasution, warga desa Aekbadak Julu, kecamatan Sayur matinggi, Tapsel luka tembak pada lengan. Korban luka lainnya adalah Zul Lubis (19) warga desa Aekbadak Julu yang mengalami robek kepala sebelah kiri dan Idris Nasution (36) warga desa Aekbadak Jae, kecamatan Sayur matinggi, kabupaten Tapsel luka di kening sebelah kiri.

Menurutnya, penangkapan itu dilakukan polisi setelah menerbitkan surat pelaporan terhadap AB Silitonga, atas nama Jama K Purba, sesuai Laporan Polisi No: 143/X/2016/SU/Tapsel/Reskrim tanggal 20 Oktober 2016. Pelaku dipersangkakan Pasal 28 (2) UU No. 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 156 (a) KUH Pidana. “Setelah kerusuhan itu, Polda Sumut bersama dengan Polres Tapsel melakukan penyelidikan. Tim *cyber* kemudian melacak keberadaan tersangka dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan,” sebutnya.

5) Pemkab Tapsel Caplok Lahan Adat Janji Mauli jadi Perkantoran



Lagi-lagi, lahan adat terancam, tak hanya oleh ekspansi perusahaan juga pemerintah. Kali ini, wilayah adat Janji Mauli kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan, akan menjadi perumahan, dan perkantoran swasta maupun BUMD. Pemegang proyek PT Tapanuli Selatan Membangun, BUMD milik pemerintah Tapanuli Selatan. Roganda Simanjuntak, ketua BP Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, kepada *Mongabay* mengatakan, ada pelanggaran UU oleh pemerintah Tapsel dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat bukan hutan negara. “Mereka mencaplok dan menguasai hutan adat Janji Mauli, untuk perumahan, dan perkantoran,” katanya Rabu malam (13/8/14) di Medan.

AMAN sudah protes tetapi diabaikan, malah pembangunan dan perusakan hutan adat Janji Mauli terus berlangsung, tanpa memperhatikan dampak negatif bagi alam dan warga. “Kearifan lokal terancam, hutan adat terancam, ekosistem rusak, dan habitat satwa terancam.” Menurut dia, akibat arogansi Pemerintah Tapanuli Selatan, masyarakat Janji Mauli terancam. Terlebih, dengan rencana pemekaran, yang akan membongkar makam para leluhur. Sebelumnya, beberapa rumah dibongkar paksa dan tanaman masyarakat dirusak tanpa ganti rugi. Sampai saat ini konflik terus terjadi, masyarakat Janji Mauli tetap bertahan, menolak hutan adat seluas 461 hektar dirusak.

AMAN telah membuat surat protes, mendesak Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu, menghentikan rencana pembongkaran makam leluhur masyarakat Janji Mauli. Juga menghentikan perampasan tanah adat. “Kami juga mendesak menghentikan intimidasi terhadap masyarakat, bupati harus mengakui dan melindungi tanah adat melalui Perda atau SK Bupati.”

Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu mengatakan: sebelum membangun perkantoran di lokasi baru, telah mengkaji terlebih dahulu, termasuk dengan anggota DPRD dan pemerintah pusat. Mengenai penolakan warga karena masuk wilayah adat, katanya, Pemkab Tapsel telah sesuai prosedur termasuk meminta pendapat Kementerian Kehutanan. Bahkan, kata Syahrul, pembangunan itu diperkuat surat Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011. Menhut memberikan

izin pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok, untuk pembangunan pertapakan kantor Bupati Tapsel. Ia terletak di Sipirok, Tapsel seluas 271,10 hektar. “Jadi tidak benar kami membangun melanggar aturan dan UU. Semua sudah perencanaan matang, sudah beres dan kita siap bekerja di gedung baru.”

6) Aspirasi warga soal konflik lahan PLTA Simarboru Tapsel



Pihak PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku kontraktor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru, kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga telah menyerobot lahan masyarakat sekitar lokasi, khususnya Desa Aek Batang Paya dan Desa Luat Lombang, tanpa ganti rugi. Sejumlah poin keluhan dan aspirasi warga pun disampaikan kepada Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, saat reses, kemarin. Warga menyampaikan, sejak rencana pembangunan PLTA itu disosialisasikan, masyarakat sesungguhnya menyambut

baik. Tidak ada penolakan dari masyarakat sepanjang pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman dilakukan secara baik. Ketika sosialisasi dilakukan, pihak PT. NSHE berjanji melakukannya, tu membuat masyarakat yakin bahwa tanah dan tanaman akan dibayar dengan layak.

Dengan polosnya, masyarakat lantas menandatangani dokumen yang kemudian dijadikan dasar persetujuan pembebasan lahan. Masyarakat tidak pernah menduga, bahwa dokumen yang mereka tandatangani, tanpa pernah dipahami isinya, menjadi senjata makan tuan. Masyarakat tidak lagi memiliki *bargaining* terkait ganti rugi lahan maupun tanaman. Masyarakat kedua desa itu akhirnya melawan. Mereka tidak setuju dengan ganti rugi lahan sebesar Rp40.000 hingga Rp 60.000 per meter persegi. Tanaman juga tidak dibayar ganti bibitnya. Penolakan terhadap skema pembayaran ganti rugi diganjar oleh intimidasi dan tekanan yang dilakukan oknum PT NSHE dengan dukungan dari oknum aparat TNI dan Polri. Masyarakat dipaksa dengan dokumen yang ditandatangani sekitar 2013 untuk menerima skema pembayaran ganti rugi. Masyarakat secara kolektif, akan kehilangan tanah seluas 250 hektar dengan skema ganti rugi seperti di atas.

Padahal, tanah masyarakat tersebut menjadi satu-satunya tempat mereka bertani dan berkebun demi kelangsungan hidup. Dengan ganti rugi yang sangat rendah, maka dapat dipastikan masyarakat tidak mampu mencari lahan pengganti, untuk melanjutkan aktivitas

bertani dan berkebun. Program pembangunan nasional sejatinya menghadirkan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi, dengan cara seperti yang dilakukan PT NSHE, masyarakat menderita, ketakutan dan kelak menjadi dendam kepada negara. Kegiatan yang dilakukan PT NSHE akan berdampak secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Sekilas, desa Aek Batang Paya memiliki luas 28,78 kilometer persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.500 jiwa. Desa ini dibentuk tahun 2008 dari penggabungan desa Dano Lombang, desa Gunung Hasahatan dan desa Paske. Sedangkan desa Luat Lombang memiliki luas wilayah 19,64 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.700 jiwa, desa ini dibentuk Tahun 2008 dari penggabungan desa Bulu Payung, desa Gunung Sari, desa Hutaimbaru, dan Desa Pengkolan. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan

umum ditetapkan oleh penilai (Pasal 33 jo.a Pasal 32). Penilai ditetapkan oleh lembaga pertanahan (Pasal 31 Ayat 1), nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 34).

Penetapan besaran ganti kerugian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sementara itu nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 34 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2012). Sedangkan penentuan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sesuai Pasal 37 Ayat 1 dan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2012).

Terkait kondisi ini perlu diberi respon sebagai berikut:

1. Pihak PT NSHE bersama oknum aparat TNI dan Polri diminta untuk menghentikan tekanan dan intimidasi kepada seluruh warga masyarakat di desa Aek Batang Paya dan desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan seharusnya diberikan secara sukarela. Sepanjang ada reaksi dari masyarakat, berarti masih ada hal yang belum tuntas.

2. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan diminta untuk pro aktif dalam meresponi persoalan pembayaran ganti kerugian masyarakat akibat hadirnya PLTA Simarboru.
3. PT NSHE diminta untuk menghentikan segala aktivitas di lapangan sampai masalah penyelesaian ganti kerugian dengan masyarakat diselesaikan.
4. PLTA Simarboru maupun PT NSHE diminta berhenti menyebut bahwa proyek pembangunan PLTA Simarboru sebagai program Nawacita Presiden RI Joko Widodo hanya untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Seluruh program pemerintah tahun 2014-2019 ada dibawah kendali presiden. Sehingga tidak perlu melibatkan nama presiden jika ada penolakan dari masyarakat.
5. Masyarakat sejak semula menyambut, menerima bahkan mendukung kehadiran PLTA Simarboru. Penolakan dan perlawanan masyarakat terjadi akibat masyarakat merasa ditipu dan ganti kerugian tidak adil dan tidak layak.

PROGRAM POLRES TAPANULI SELATAN

Mari Kita Dukung Tim Anti Kejahatan Polres Tapanuli Selatan



Menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Kapolres Tapsel AKBP. Irwa Zaini Adib, SIK, MH membentuk satuan anti kejahatan yang diberi nama Tim Huraba Anti Bandit, yang launchingnya dilaksanakan di halaman Mapolres Tapsel, Senin (17/2). *Launching* Tim Huraba Anti Bandit yang beranggotakan 30 orang personil dari Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Tapsel, dihadiri Waka Polres Tapsel Kompol Jumanto, SH, MH, para Kabag, Kasat, Kapolsek, para perwira dan personil Polres Tapsel, yang diawali dengan pembacaan ikrar anti bandit.

Tim Huraba Anti Bandit ini merupakan tim khusus untuk menanggulangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai jawaban atas keinginan masyarakat agar

terciptanya situasi keamanan di wilayah hukum Polres Tapsel meliputi kabupaten Tapsel dan kabupaten Padang Lawas Utara. Kapolres menyebutkan, Tim Huraba Anti Bandit itu beranggotakan 30 personel, terdiri dari polisi laki-laki dan juga polisi wanita dari Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba, yang dipilih secara khusus dan dilengkapi senjata serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai, yang nantinya akan siap beraksi dalam penanggulangan kasus kriminal jalanan juga kasus narkoba.

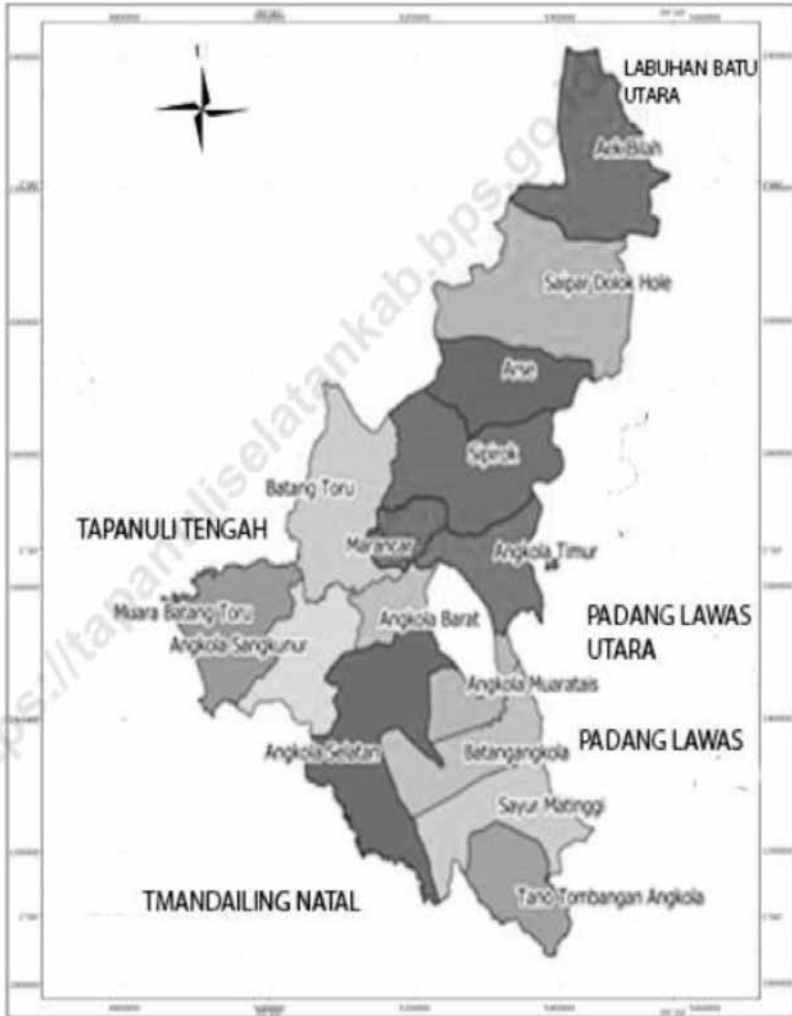
Nantinya tim ini dikoordinasi langsung Kasat Reskrim AKP. Ginanjar Fitriadi, SH, SIK dan Kasat Resnarkoba AKP. Eddy Sudrajat, SH, dan melaporkan segala perkembangan dan kemajuan penumpasan angka kriminalitas kepada saya selaku Kapolres Tapsel. Menurut Kapolres, dalam tugasnya di lapangan, tim ini akan dipimpin oleh seorang personil Reskrim dan Sat Resnarkoba, yang telah berpengalaman di bidangnya. Sedangkan tugas khusus tim ini adalah mengungkap dan memburu para pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat) dan penyalahgunaan narkoba, serta menekan tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tapsel.

Tim yang di bentuk ini merupakan tidak lanjut atas intruksi Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, yang menghidupkan kembali Tim Reserse Mobil (Resmob) atau Team Khusus Anti Bandit (Tekab). Sementara Kasat Reskrim AKP. Ginanjar Fitriadi, SH, SIK dan Kasat Resnarkoba AKP. Eddy Sudrajat, SH menambahkan, dalam peresmian Tim Huraba Anti Bandit ini, seluruh personil juga membacakan ikrar, dengan

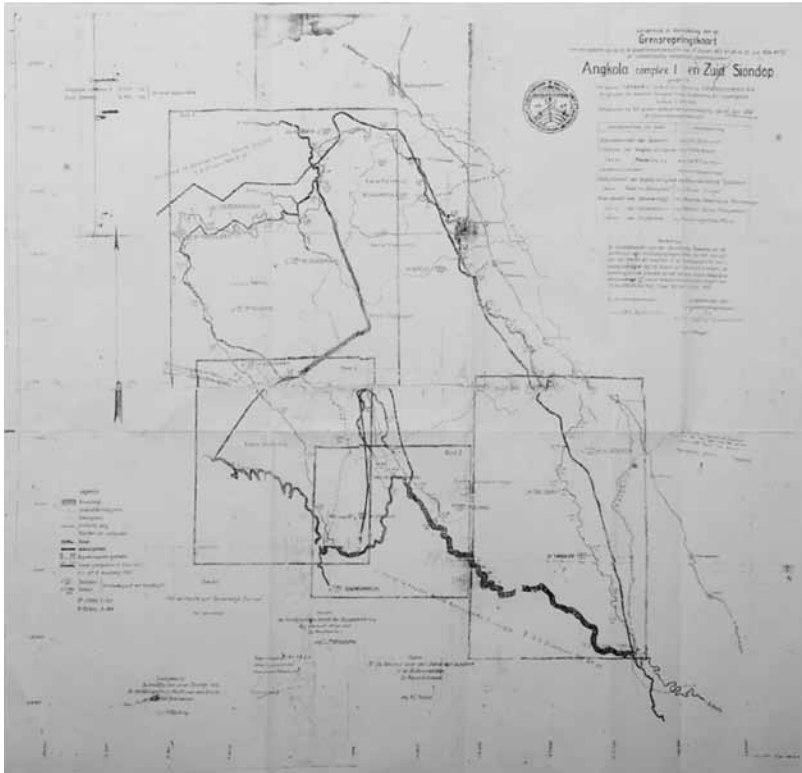
tujuan memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa Tim Huraba Anti Bandit bersungguh-sungguh dalam menangani masalah Curat, Curas, Curanmor dan Narkoba (3CN) di tengah masyarakat.

Selain patroli dialogis tim huraba anti bandit juga melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat hal ini di aplikasikan dengan sosialisasi hukum tentang tindak pidana cabul ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tapsel. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi untuk ikut menjaga keamanan dari tindak pidana 3CN dengan cara berani melaporkan segala bentuk tindak pidana kepada kami melalui Telp, 08116122009, atau melalui media sosial kami di Instagram: @satreskrimtapsel, Facebook: Satreskrim Polres Tapanuli Selatan dan Twitter : @satreskrim-ts.

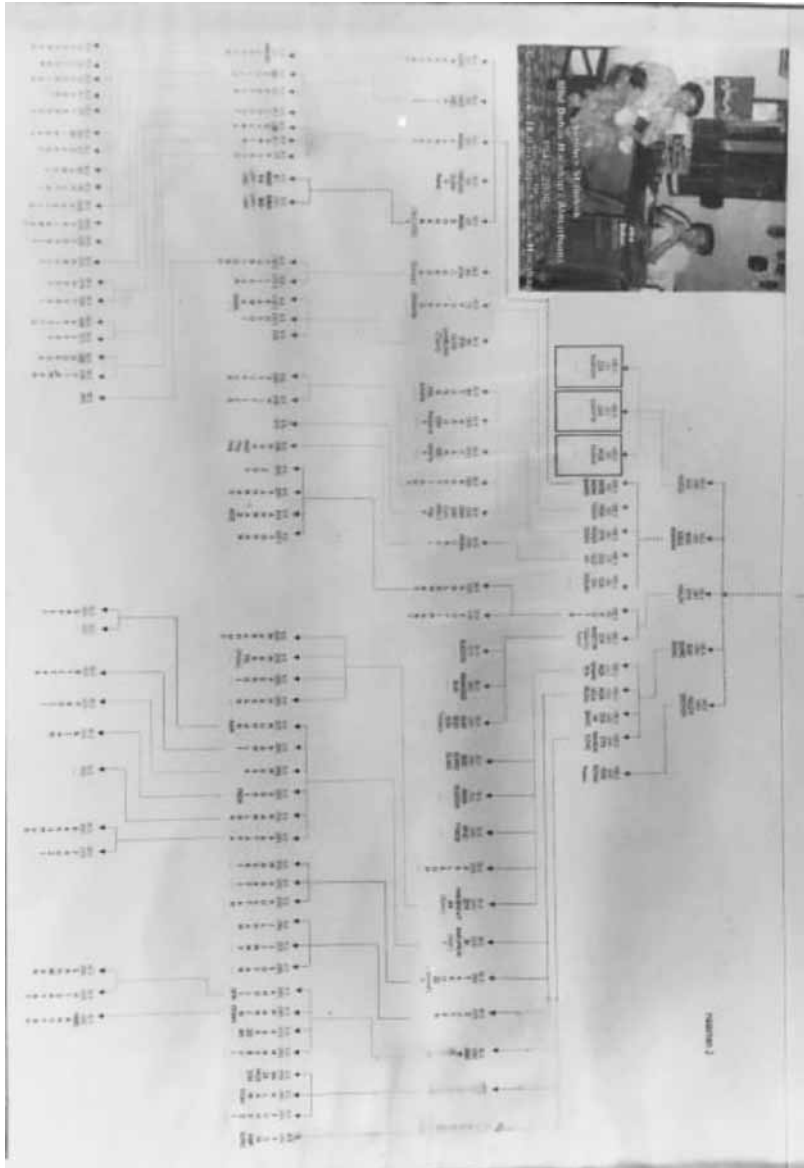
PETA WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
MAP OF TAPANULI SELATAN REGENCY



PETA ANGKOLA



CONTOH SILSILAH MARGA HARAHAP OMPU SARUDAK



CONTOH SK BELANDA RESIDEN TAPANULI
KERAJAAN KEKURIAN HUTAIMBARU



CONTOH RUMAH ADAT ANGKOLA (BADAS GODANG)



BIODATA PENULIS



SUHERI HARAHAP, M.Si

BIODATA PENDIDIKAN :

1. SD Hutalambung
2. MTSN Padangsidempuan
3. MAS YPKS Padangsidempuan
4. UIN Sumatera Utara
5. S2 UNIMED
6. S3 USU

PENGALAMAN :

1. Ketua Umum IMM Sumut
2. Wakil Ketua AMPI Sumut
3. Sekretaris DPD KNPI Sumut
4. Wakil Ketua SOKSI Sumut
5. Ketua IMPB (Angkola Barat)
6. Ketua GM MARTABE Sumut

Catatan

TAPANULI SELATAN

BUMI DALIHAN NA TOLU

(Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama dan Budaya)

Pembangunan di Tapanuli Selatan diharapkan mampu meningkatkan potensi sumber daya manusia yang unggul dan kekuatan sosial budaya *Dalihan Na Tolu* dalam rangka mempercepat pembangunan. Sebab masyarakat yang kuat agama dan budaya sebagai pilar pembangunan yang seimbang. Keberlanjutan pembangunan sangat ditentukan oleh keberadaan masyarakat yang mendiami sebuah wilayah, maka perlu dipadukan strategi pembangunan berbasis komunitas.

Keragaman budaya Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokal di dalamnya salah satu kearifan lokal yang menonjol adalah berkaitan dengan adat istiadat. Masyarakat Batak Angkola kearifan lokal yang menarik dan unik untuk dipelajari atau ditularkan kemasyarakat lainnya di Sumatera Utara khususnya dan nusantara pada umumnya. Budaya Batak Angkola yang saling memberi informasi, kesulitan akan berkurang saling tolong menolong, *marsitorangan*, *martahi*, *marsialap ari* di era digital, katalog tak bertemu tapi saling menyapa, memberi keberhasilan untuk petani. *Anggo adong namasa akkon tangi di siluluton ette di siriaon*, *markoum marsisolkot marsiholongan*, *marsitorangan*.

Strategi pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan bersama, kemajuan ekonomi juga perlu diperhatikan untuk kesejahteraan lewat '*negosiasi ekonomi*' dengan strategi budaya untuk kesejahteraan bersama semua etnis dan agama, jauh dari kecemburuan sosial, bersatu dalam budaya *Dalihan Na Tolu* sebagai katup pengaman persatuan dan kesatuan menuju pemerataan pembangunan bidang kehidupan masyarakat, ikut serta mensukseskan program pemerintah lewat kerjasama masyarakat adat menuju Indonesia sejahtera. Mendukung program BUMDes berbasis SDGs Desa. Memperkuat *poda na lima* dan surat *tumbaga holing*.

Motto :

Salaklak Sasikkoru Sasanggar Sariaria Saanak Hita Saboru
SumanMarsada Ina Manat Markahanggi Elek Maranak Boru
Hormat MarmoraTapanuli Selatan Bumi Dalihan Na Tolu

Diterbitkan Oleh :
CV. MANHAJI
Medan 2020



ISBN 978-602-0746-80-7

